DEWAN PENGAWAS SYARIAH, *CORPORATE GOVERNANCE* DAN KINERJA BANK SYARIAH

DISERTASI
Program Doktor Ilmu Ekonomi

Oleh
Rr. Dian Indriana Trilestari
11931008

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

DEWAN PENGAWAS SYARIAH, *CORPORATE GOVERNANCNE* DAN KINERJA BANK SYARIAH

Disertasi
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Oleh :
Rr. Dian Indriana Trilestari
11931008

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376,
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

BERITA ACARA

UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR)

Pada hari ini Selasa, 08 Desember 2020 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan Ujian Terbuka (Promosi Doktor) untuk mahasiswa:

Nama	:	**Dian Indriana Trilestari, SE., M.Si., AK.**
Nomor Mahasiswa	:	11931008
Konsentrasi	:	Manajemen Keuangan
Judul Disertasi	:	Dewan Pengawas Syariah, Corporate Governance dan Kinerja Bank

Dewan Penguji :

• Prof. Jaka Sriyana, SE., M. Si., Ph.D	Ketua Sidang
• Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.	Promotor
• Dr. Zaenal Arifin, M.Si.	Co Promotor I
• Dr. D. Agus Hardjito, M.Si.	Co Promotor II
• Dr. Kumalahadi,MS., Ak.	Penguji I
• Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.	Penguji II
• Dra. Ataina Hudayati, M.Si., Ph.D., Ak.	Penguji III

1. Berdasarkan nilai hasil ujian Disertasi tersebut, Dewan Penguji menyatakan Saudara Dian Indriana Trilestari, SE., M.Si., AK. **LULUS** dengan nilai: **A-**

2. Setelah memperhitungkan Hasil penilaian Disertasi dan Indeks Prestasi Mata Kuliah yang pernah diambil, maka Saudara dinyatakan **LULUS** dengan predikat **Sangat Memuaskan** dengan Indeks Prestasi Kumulatif: **3,66**

Yogyakarta, 08 Desember 2020
Ketua Sidang,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Prof. Jaka Sriyana, SE., M. Si., Ph.D

Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, 7 Desember 2020

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Promotor



(Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.)

Co Promotor I

(Dr. Zaenal Arifin, M.Si.)

Co Promotor II

(Dr. D. Agus Hardjito, M.Si.)

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Promotor

(Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.)

Co Promotor I



(Dr. Zaenal Arifin, M.Si.)

Co Promotor II

(Dr. D. Agus Hardjito, M.Si.)

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Promotor

(Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.)

Co Promotor I

(Dr. Zaenal Arifin, M.Si.)

Co Promotor II



(Dr. D. Agus Hardjito, M.Si.)

Pernyataan Keaslian Karya

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rr. Dian Indriana Trilestari

NIM : 11931008

Program Studi : Program Doktor Ilmu Ekonomi

Fakultas : Bisnis dan Ekonomika

Dengan ini saya menyatakan, bahwa disertasi ini yang berjudul **Dewan Pengawas Syariah, *Corporate Governance* dan Kinerja Bank Syariah** adalah benar karya saya dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2020



Rr. Dian Indriana Trilestari

Scanned with CamScanner

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta`ala, bahwa dengan ridhoNya lah maka penyusunan disertasi ini dapat diselesaikan. Penulisan Disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor dari Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam proses penyusunan disertasi ini banyak pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Disertasi ini tidak akan selesai tanpa bantuan waktu, sumbangan pemikiran dan juga doa dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian disertasi ini.

Pertama penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Direktur Program Studi Magister dan Doktor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh dosen dan karyawan atas kesempatan dan bimbingannya selama penulis menempuh studi S3 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof . Dr. Hadri Kusuma, MBA sebagai Promotor disertasi ini. Beliau memberikan inspirasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Bimbingan, perhatian, nasehat dan dukungan yang diberikan oleh beliau memberikan motivasi dan membangkitkan semangat terutama dalam mengatasi berbagai kesulitan yang penulis hadapi dalam proses penyelesaian disertasi ini.

Terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis sampaikan kepada Dr. Zaenal Arifin, M.Si sebagai Ko-Promotor yang memberikan perhatian sangat besar dalam proses penyelesaian disertasi ini. Beliau memberikan bimbingan dengan sabar dan pendapat beliau merupakan masukan yang sangat berharga dalam proses penyelesaian disertasi ini

Terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis sampaikan kepada Dr. D. Agus Hardjito, M.Si sebagai Ko-Promotor yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau dan banyak memberikan masukan dan saran yang sangat membantu dalam proses penyelesaian disertasi ini.

Terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis sampaikan kepada Dr. Kumalahadi,MS.,Ak sebagai Ketua Tim Penguji disertasi ini yang memberikan perhatian sangat besar dalam proses penyelesaian disertasi ini dengan pengetahuan dan pengalaman beliau.

Terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis sampaikan kepada Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri ujian-ujian

yang diselenggarakan dan memberikan komentar-komentar yang membantu proses penyempurnaan disertasi ini.

Terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis sampaikan kepada Prof. Dra. Ataina Hudayati, M.Si., Ak., DBA yang telah banyak membantu memberikan saran dan pendapat yang konstruktif demi menyempurnakan disertasi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Muladi, SH selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Universitas Semarang dan Prof. H. Abdullah Kelib, SH. selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Universitas Semarang yang sudah banyak memberikan kesempatan, dorongan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian disertasi.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada suami Haris Murwanto dan kedua anak kami Ilham dan Rizki, atas pengertian dan kesabarannya yang tak terhingga selama penulis menempuh studi S3. Terima kasih pula kepada ayah tercinta (alm) Ir. Widjatmoko Sadiman dan Ibu (almh) Bagyaswati serta ayah mertua (alm). Letjend. (Purn) Harsudiono Hartas dan ibu Wiroso Murni, serta adik-adik dan semua kerabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti.

Penulis berharap disertasi ini dapat bermanfaat dalam bidang keilmuan dan memberikan kemaslahatan bagi banyak orang.

Terimakasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
BERITA ACARA UJIAN TERBUKA ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN KEASLIAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAK xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 15
1.3. Tujuan Penelitian 17
1.4. Manfaat Penelitian 18
1.4.1. Manfaat Teoritis 18
1.4.2. Manfaat Empiris 19
1.5. Kontribusi Penelitian 20
BAB II TINJAUAN LITERATUR 22
2.1. *Corporate Governance* 22
2.1.1. Definisi *Corporate Governance* 22
2.1.2. Prinsip-Prinsip *Governance* 23
2.1.3. Struktur *Governance* 27
2.1.4. Manfaat Penerapan *Corporate Governance* 29
2.2. *Corporate Governance* Di Perbankan 30
2.3. Corporate Governance di Perbankan Syariah 34
2.3.1. Mekanisme *Corporate Governance* di Perbankan Syariah 35
2.3.1.1. Mekanisme Monitoring 37
2.3.1.2. Mekanisme Monitoring Oleh DPS 39
2.3.1.3. Mekanisme Bonding 43
2.4. Teori *Corporate Governance* 45
2.4.1. *Agency Theory* 45
2.4.2. *Stakeholder Theory* 49
2.4.3. *Resource Dependence Theory* 50
2.5. *Corporate Governance* dan Kinerja Bank Syariah 51
2.6. Perumusan Hipotesis 54
2.6.1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah 54
2.6.2. Pengaruh Kualitas Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah 56
2.6.3. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah 57
2.6.4. Mediasi Kualitas Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah 59
2.6.5. Mediasi Kualitas Penerapan *Corporate Governance* terhadap Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Bank Syariah 61
2.7. Model Penelitian 63
BAB III METODE PENELITIAN 64
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 64
3.2. Jenis dan Sumber Data 66

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 67
3.3.1. Variabel Dependen 67
3.3.2. Variabel Independen 68
3.3.3. Variabel Intervening : Kualitas Penerapan *Corporate Governance* 70
3.3.4. Variabel Kontrol 71
3.4. Metode Analisis 75
3.4.1. Evaluasi Model PLS-SEM 78
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 79
4.1. Analisa Statistik Deskriptif 79
4.2. Hasil Analisa Data PLS-SEM 81
4.2.1. Analisis Pengukuran Fit Model dan Faktor Konfirmatori 84
4.2.2. Penghitungan Nilai VAF untuk Pengujian Variabel Intervening 92
4.2.3. Uji Koefisiensi Determinasi 95
4.3. Pengujian Hipotesis Penelitian 96
4.3.1. Hasil Analisa Pengujian Hipotesis 1 96
4.3.2. Hasil Analisa Pengujian Hipotesis 2 96
4.3.3. Hasil Analisa Pengujian Hipotesis 3 97
4.3.4. Hasil Analisa Pengujian Hipotesis 4 98
4.3.5. Hasil Analisa Pengujian Hipotesis 5 98
4.4. Hasil Pengujian Variabel Kontrol 98
4.4.1. Ukuran Perusahaan 99
4.4.2. Struktur Kepemilikan 100
4.5. Pembahasan 102
4.5.1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Penerapan *Corporate Governance* 102
4.5.2. Pengaruh Kualitas Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Bank Syariah 107
4.5.3. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah ... 111
4.5.4. Pengaruh Kualitas Penerapan *Corporate Governance* dalam memediasi Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Kinerja Bank Syariah 116
4.5.5. Kualitas Penerapan *Corporate Governance* dalam memediasi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Kinerja Bank Syariah 119
BAB V PENUTUP 123
5.1. Kesimpulan 123
5.2. Implikasi Teoritis 126
5.3. Implikasi Empiris 131
5.4. Implikasi Praktis 133
5.5. Keterbatasan Penelitian 134
5.6. Agenda Penelitian Mendatang 135
DAFTAR PUSTAKA 136
LAMPIRAN 154

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Kinerja Bank Syariah Kurang Baik Dikaitkan Dengan DPS..... 8
Tabel 2.1. Perbedaan Fungsi dalam Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah 34
Tabel 3.1. Daftar Bank Syariah Periode 2010-2017 65
Tabel 3.2. Proses Pemilihan Sampel 66
Tabel 3.3. Jenis Pengendalian Saham 72
Tabel 3.4. Definisi Operasional 73
Tabel 3.5. Kriteria Pengukuran 80
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 79
Tabel 4.2. Pengukuran Fit Model 85
Tabel 4.3. Estimasi Koefisien Persamaan 87
Tabel 4.4. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Syariah Melalui Peningkatan Kualitas Penerapan *Corporate Governance*..... 93
Tabel 4.5. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Bank Syariah Melalui Peningkatan Kualitas Penerapan *Corporate Governance* 94
Tabel 4.6. Ringkasan Koefisien Determinasi 95
Tabel 4.7. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 96
Tabel 4.8. Nilai Total DPS, Nilai Komposit, ROA dan ROE 107
Tabel 4.9. Jumlah Komite Audit, Jumlah Dewan Direksi, Nilai Komposit, ROA dan ROE 116
Tabel 4.10 Nilai Total DPS, Nilai Komposit, ROA dan ROE 118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema Riset Gap 13
Gambar 2.1. Prinsip-Prinsip GCG 24
Gambar 2.2. Perangkat *Governance* 27
Gambar 2.3. Model *Governance* Untuk Dual Board di Indonesia (Model Continental European) 28
Gambar 2.4. Perbedaan Mekanisme Corporate Governance Perbankan 36
Gambar 2.5. Theory Agency 49
Gambar 2.6. Model Penelitian 1 63
Gambar 2.8. Model Penelitian 2 67
Gambar 3.1. Model Penelitian Persamaan 1 77
Gambar 3.2. Model Penelitian Persamaan 2 77
Gambar 3.3. Model Penelitian Persamaan 3 78
Gambar 4.1. Ilustrasi Model Penelitian Persamaan 1 88
Gambar 4.2. Ilustrasi Model Penelitian Persamaan 2 89
Gambar 4.3. Ilustrasi Model Penelitian Persamaan 3 90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Disertasi
Lampiran 2. Output Persamaan 1
Lampiran 3. Output Persamaan 2
Lampiran 4. Output Persamaan 3

ABSTRAK

Mekanisme *corporate governance* sangat penting untuk industri perbankan, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu alat untuk menjamin manajemen perusahaan bertindak yang terbaik menurut kepentingan pemegang saham. Fenomena di Indonesia masih ada beberapa bank syariah yang mengangkat Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena figur orang tersebut yang disegani, namun perlu diuji kompetensinya melalui *fit and proper test*. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang *corporate governance* terhadap Kinerja Bank Syariah belum ada yang meneliti peran DPS dalam model pengawasan di Bank Syariah yang dikaitkan dengan kualitas laporan pelaksanaan *corporate governance* sehingga dapat meningkatkan kinerja Bank Syariah. Penelitian sebelumnya kebanyakan fokus pada struktur model pengawasan DPS yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan dan fatwa yang berlaku di masing-masing negara dalam menerapkan *shariah compliance*.

Penelitian ini meneliti pengaruh Dewan Pengawah Syariah, Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah dengan variabel intervening atau mediasi Kualitas penerapan *Corporate Governance*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari data Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan *Corporate Governance* yang diperoleh dari web site masing-masing Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2010-2017. Sampel dalam penelitian yang memenuhi kriteria adalah 9 Bank Syariah. Metode analisa yang digunakan menggunakan metode PLS-SEM yang bertujuan untuk menguji secara simultan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap Kualitas Penerapan *Corporate Governance*. Temuan ini sejalan dengan *Resource Dependence Theory.* Teori ini menyatakan bahwa peran sumber daya manusia (SDM) sangat diperlukan dalam organisasi atau perusahaan. Variabel Mekanisme *Corporate Governance* dan Kualitas penerapan *Corporate Governance* berpengaruh secara langsung terhadap Kinerja Bank Syariah. Hasil pengaruh mediasi menunjukkan bahwa variabel Kualitas penerapan *Corporate Governance* mampu memediasi pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah. Hasil pengujian variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan (*size*) dan struktur kepemilikan dan pengendalian saham menunjukkan yang hasilnya signifikan adalah struktur kepemilikan dan pengendalian saham.

Kontribusi penelitian ini menggunakan pengukuran peran DPS berdasarkan pedoman dari *Operating Procedures of the Shariah Board yang terdapat dalam Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang merupakan *Guiding Principles On Shariah Governance System for Institutions Offering Islamic Financial Service* dan model penelitian yang menambahkan Kualitas penerapan *Corporate Governance* sebagai efek mediasi. Saran penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan metode observasi terhadap beberapa bank syariah sebagai pembanding dan menggunakan metode wawancara dengan kuesioner dalam penilaian *self assessment* sehingga bisa memperoleh informasi mengenai kinerja *board governance* sesuai dengan kondisi riilnya dan mengembangkan model penelitian dengan menambah variabel misalnya penegakkan hukum (*law enforcement*), budaya perusahaan.

Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah, Mekanisme *Corporate Governance,* Kualitas Penerapan *Corporate Governance,* Kinerja Bank Syariah, *Size,* Struktur Kepemilikan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mekanisme *corporate governance* sangat penting untuk industri perbankan tidak hanya pada *power* kepemilikan namun sudah mengarah pada penggunaan *critical resources* (Rajan dan Zingales 1998)**.** Colley et al (2003) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu alat untuk menjamin manajemen perusahaan bertindak yang terbaik menurut kepentingan pemegang saham. Penerapan *corporate governance* di perbankan Indonesia diawali dengan adanya regulasi atau peraturan dari Bank Indonesia yaitu PBI No.8/4/PBI/2006 yang berisi tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum yang kemudian peraturan tersebut diubah dengan PBI No.8/14/2006. Prinsip *corporate governance* ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan di Indonesia dapat bersaing dengan perusahaan asing. Salah satu prinsip *corporate governance* adalah memberikan perlindungan bagi para pemegang saham dan investor sehingga mereka merasa yakin akan mendapatkan *return* dari investasi yang dilakukannya. Demikian juga dengan perbankan syariah diharapkan dapat mengimplementasikan GCG dengan adanya peraturan UU RI No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga banyak bank syariah bermunculan.

Perkembangan perbankan syariah saat ini masih jauh dari harapan. Kondisi di Indonesia dengan mayoritas penduduk Muslim tidak dapat menjamin perkembangan perbankan syariah dengan cepat. Masalah tata kelola di Bank Syariah masih harus terus ditingkatkan selain keandalan SDM syariah yang sering menjadi kendala. Menurut Biro Riset Infobank, kinerja Bank Syariah tidak membaik sejak tahun 2012 hal itu bisa dilihat dari nilai ROA yang terus menurun. Pada tahun 2012, ROA perbankan syariah sebesar 2,14%, setahun berikutnya menurun dan terus menurun hingga puncaknya tahun 2014 sebesar 0,79%. Pada

tahun 2017 ROA perbankan syariah sebesar 1,17% namun secara kualitas belum membaik (Setiawan 2018).

Menurut Chapra dan Ahmed (2002) melakukan pemetaan terhadap komponen *corporate governance* dalam lembaga keuangan syariah menjadi 4 kelompok yaitu (1) lingkungan yang meliputi sistem ekonomi, keuangan dan hukum secara keseluruhan, pemerintah (hukum dan regulasi untuk lembaga keuangan syariah dan sistem akuntansi); (2) institusi publik yang meliputi pengawas dan asosiasi perbankan; (3) perusahaan yang meliputi pemegang saham, dewan direksi, manajemen senior, audit internal, karyawan dan DPS; dan (4) lainnya yang meliputi deposan, auditor eksternal dan auditor syariah. Menurut Ahmed (2014) terdapat pemain kunci yang khas dalam pelaksanaan GCG dalam rangka pemenuhan prinsip syariah, yaitu dewan pengawas syariah (DPS). DPS adalah pihak yang melakukan audit syariah selain audit yang lazim untuk memastikan pelaksanaan *corporate governance* berbasis norma-norma syariah.

Fungsi kerangka *corporate governance* syariah ada enam yaitu (1) pengawasan; (2) akuntabilitas dan tanggung jawab dewan; (3) kemandirian; (4) kompetensi; (5) kerahasiaan; dan (6) konsistensi dan kepatuhan. Dalam kerangka konseptual ini menyatakan bahwa konsep akuntabilitas Islam, indepedensi, kompetensi dan transparansi harus menjadi dasar landasan dalam mengembangkan kerangka kerja konseptual untuk tata kelola perusahaan syariah. Kasim, Htay dan Salman (2013) menyatakan bahwa kinerja bank Islam tidak hanya berpengaruh pada aspek internal kuantitatif yaitu rasio keuangan tetapi juga internal kualitatif seperti aspek manajerial, sehingga disarankan untuk bank Islam harus mempunyai penasehat syariah yang memiliki pengetahuan yang baik tentang keuangan untuk membantu mengelola bank dengan mengembangkan produk baru sesuai dengan prinsip syariah.

Pada bank syariah tujuan *corporate governance* lebih dikhususkan untuk memastikan *fairness* ke semua *stakeholder* (Choudhury dan Hoque 2006)**.** Hal ini dapat dicapai melalui

transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik (Chapra dan Ahmed 2002). Ahmad (2000) menunjukkan bahwa implementasi *corporate governance* perusahaan yang baik dapat memaksimalkan nilai perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Peningkatan kualitas implementasi *corporate governance* yang baik di Indonesia masih sangat rendah.

Bank syariah menurut konsepsi idealnya harus lebih dari sekedar lembaga usaha (ijara) yang diperkenankan mengoptimalkan usahanya, namun juga harus mempunyai dimensi sebagai institusi yang mempunyai peran dalam mendorong terciptanya sistem ekonomi dan kegiatan usaha yang berkeadilan, menerapkan kaidah-kaidah moral dan tata nilai yang menuju kepada kebaikan dan kemashlahatan orang banyak (Choudhury dan Alam 2013). *Corporate governance* konvensional dan *corporate governance* perspektif Islam memiliki banyak perbedaan dari sudut pandang (Choudhury, Hoque and Nayarana 2006). Yang paling pertama adalah peletakan ideologi tauhid dalam perspektif Islam dan ideologi rasionalisme dalam perspektif konvensional. Kedua, tujuan dari sebuah usaha dalam perspektif konvensional pada umumnya adalah maksimalisasi keuntungan, sementara pada perspektif Islam lebih bertujuan pada kesejahteraan umum. Ketiga, mekanisme *corporate governance* bank syariah diwajibkan untuk mendirikan Dewan Syariah (*Shariah Board*) dimana dalam struktur bank konvensional tidak ada. Fungsi dari Dewan Syariah adalah bertanggung jawab dan memastikan bahwa transaksi perbankan dilakukan sesuai dengan hukum syariah. Kegiatan dalam bank syariah memiliki kewajiban terhadap karyawan, masyarakat dan pihak yang terkait dalam organisasi. Staf di bank syariah harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mematuhi ajaran Islam. Standar akuntansi di bank syariah harus mempertimbangkan bahwa perbankan syariah tidak dikenakan bunga bank.

Mekanisme *corporate governance* pada bank syariah berbeda dengan bank umum (konvensional). Perbedaannya adalah mekanisme *corporate governance* pada bank syariah

terdiri dari struktur kepemilikan, peran dan struktur dewan direksi, pengungkapan dan transparansi serta peran dan struktur dewan syariah. Mekanisme *corporate governance* syariah ada tiga yaitu (1) manajer syariah; (2) dewan syariah; dan (3) komite syariah (Sulaiman dan Joriah 2013). Dalam struktur *corporate governance*, bank syariah memiliki dua *board* yaitu *board of directors* seperti halnya pada bank konvensional dan *sharia supervisory board* (SSB) atau seperti yang sudah disebutkan sebelumnya yaitu DPS. Menurut Nomran, Haron dan Hassan (2018) perbankan syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). *Sharia compliance* secara detail mengatur bagaimana aktivitas operasional harus berlandaskan etika dan tata nilai Islam seperti keharusan transparansi, larangan berbuat kezaliman, larangan mendistorsi informasi dan lain sebagainya. Tugas DPS adalah untuk memastikan operasional bank dan kontrak-kontraknya sesuai *sharia compliance*. DPS memastikan transaksi berdasarkan prinsip syariah yang meliputi persaudaraan (ukhuwah), keadilan (`adalah), kemasalahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun) dan universalisme (syumuliah) (IAI 2009). Masuknya DPS dalam mekanisme *corporate governance* di bank syariah diharapkan akan meningkatkan kualitas dan efektivitas monitoring sehingga pengembangan produk atau jasa dan juga operasional bank sesuai dengan hukum dan norma Islam. Adanya potensi asimetri informasi pada perbankan syariah maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal tersebut terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham.

Fenomena yang terjadi saat ini dalam praktik pengawasan bank syariah di Indonesia adalah peran DPS yang belum berjalan secara optimal. Frekuensi kehadiran DPS masih kurang, ada yang hadir hanya seminggu sekali bahkan sebulan sekali. Apabila DPS hadir, namun tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya misalnya memeriksa format mengenai akad, proses restrukturisasi, penetapan margin dan lain-lain. Hal itu disebabkan mereka

kurang memahami tentang sistem dan mekanisme operasional bank syariah. Fenomena lain adalah dominannya para ulama senior yang dianggap memiliki kharismatik dan ahli ilmu fikih diangkat menjadi DPS. Peran DPS yang lemah dalam bank syariah menimbulkan penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen bank syariah (Sutedi 2009). Terdapat kasus bank syariah yang pada akhirnya melibatkan DPS sebagai saksi di persidangan. Kasus yang terjadi pada bulan Agustus 2011 di Bank Jateng Syariah adanya kredit fiktif senilai Rp 94 miliar dan Bank Jateng Cabang Semarang juga kebobolan kredit senilai Rp 18 miliar. Kejadian tersebut tidak bisa kita anggap remeh karena kasus pembobolan Bank Jateng ini adalah kasus ke-9 yang terbesar di Indonesia pada tahun 2011 (Kompas 2011).

Kasus lain yang terjadi adalah terjadinya kredit fiktif yang disalurkan oleh Bank Mandiri Syariah cabang Bogor sebesar Rp 102 miliar kepada 197 debitur fiktif melalui akad pembiayaan Al-Murabahah untuk bisnis perumahan dan properti (Prabowo 2013). Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) yang melakukan survei terkait praktik GCG di industri perbankan yang menunjukkan bahwa penerapan GCG di perbankan terlihat mulai mengendur ketika maraknya pembobolan dana ataupun *fraud* yang menimpa perbankan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Lando Simatupang dalam seminar di Jakarta, Selasa 31 Juli 2018. Berdasarkan riset yang telah dilakukan LPPI, dalam 10 tahun terakhir yaitu sejak 2007-2017 menyimpulkan bahwa nilai komposit penerapan GCG yang dilakukan perbankan memang masih dalam kisaran baik yaitu 2,02 yang diperoleh data dari 90 bank yang mengirimkan laporan *self assessment*-nya. Namun dalam perjalanannya nilai tersebut berfluktuasi. Riset LPPI pertama kali tahun 2006 nilai rata-rata GCG perbankan berada di kisaran I yang berarti sangat baik, sepanjang tahun 2008-2010 penerapan GCG terlihat ada perbaikan. Setelah itu peringkatnya lembali memburuk dan mencapai puncaknya tahun 2015. Hal tersebut disebabkan tahun 2011-2015 perbankan menghadapi masalah semakin banyaknya praktik kecurangan atau penipuan (Nisaputra 2018). Pernyataan Sigit Pramono

dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) mengatakan bahwa GCG perbankan di Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan dari 50 perusahaan terbuka yang penerapan GCG nya baik di ASEAN tahun 2017 negara Indonesia hanya masuk lima perusahaan yang penerapan GCG dalam kategori baik dengan tiga diantaranya adalah bank dengan modal besar. Hal itu menunjukkan bahwa penerapan GCG di Indonesia masih lemah terutama di industri perbankan (Umbu 2018).

Beragamnya sudut pandang di dalam memahami fenomena *corporate governance* secara umum manfaat penerapan *corporate governance* adalah upaya untuk meningkatkan nilai bagi berbagai pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam suatu organisasi (korporasi) dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya. Terlaksananya suatu *sound corporate governance practices* diharapkan dapat membantu berjalannya aktivitas korporasi secara lebih baik dan kepentingan para *stakeholders* dapat dilindungi. Manfaat berikutnya yang diharapkan adalah meningkatnya akses korporasi tersebut terhadap pasar modal (OECD 1999) serta terjadinya peningkatan daya saing korporasi (Lukviarman 2016). Secara makro, OECD (1999) berpendapat penerapan *corporate governance* yang "benar dan sehat" akan mempengaruhi kredibilitas ekonomi (pasar) suatu negara dalam rangka menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktiknya timbul keberagaman konteks "lingkungan" *corporate governance* yang bersifat dinamis dan rentan terhadap perubahan. Hal ini sesuai dengan konsep divergensi di dalam memahami fenomena *governance* diikuti perlunya pemahaman perkembangan *corporate governance* sebagai *work in progress* (OECD 1999). Variasi di dalam praktik dan aplikasi sistem *corporate governance* dapat dianggap sebagai fenomena yang penting. Variasi tersebut diharapkan dapat mengacu pada upaya pengembangan suatu sistem atau mekanisme *governance* yang semakin efisien sehingga diharapkan dapat memaksimumkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Lukviarman 2016).

Selama ini banyak kasus penyimpangan yang terjadi di bank syariah dalam praktik operasionalnya dan dilaporkan ke Bank Indonesia. Menghadapi fenomena tersebut maka Bank Indonesia dan para ulama melakukan pemurnian prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah. Kemurnian prinsip syariah harus ditingkatkan agar bank syariah dapat beroperasi benar-benar sesuai prinsip syariah serta dapat memaksimalkan resiko yang terkait dengan citranya sebagai lembaga syariah. Terkait dengan fungsi dewan syariah menurut Grais dan Pellegrini (2006) dalam Sulaiman dan Joriah (2013) mencakup independensi, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan pengungkapan.

Sammy dan Vincent (2013), Ghayad (2013), dan Sulaiman dan Joriah (2013) menyatakan bahwa peran dewan syariah sangat penting karena diharapkan peran dewan syariah dapat digunakan sebagai dimensi religius untuk membantu menawarkan produk syariah bagi nasabah. Contoh bank konvensional seperti Citibank mempunyai produk perbankan syariah namun dalam organisasinya tidak mempunyai dewan syariah sehingga nasabah kurang mempercayai produk syariah yang ditawarkan dan nasabah lebih percaya bank syariah murni dimana di dalam organisasi perbankan tersebut terdapat dewan syariah yang membantu mereka dalam memilih produk syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Pellegrini (2006) dan Ahmed (2014) terdapat pemain kunci yang khas dalam pelaksanaan *good corporate governance* dalam rangka pemenuhan prinsip *syariah*, yaitu dewan pengawas *syariah* (DPS). Peran DPS menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOFI) dan DSN-MUI dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di Bank Syariah adalah sebagai berikut : (1) *Directing*; (2) *Reviewing*; (3) *Supervising*; dan (4) *Marketing*. DPS dalam struktur Bank Syariah berada setingkat dengan komisaris. Jika komisaris adalah sebagai pengawas kinerja manajemen maka DPS adalah pengawas manajemen bank yang berkaitan dengan operasionalnya sehari-sehari agar selalu sesuai dengan prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS

diharapkan dapat menjamin dan memastikan bahwa suatu Bank Syariah dalam kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Peran DPS yang sesuai prinsip-prinsip GCG tersebut akan meningkatkan kualitas penerapan *corporate governance* di Bank Syariah yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja Bank Syariah. Berikut ini data kinerja Bank Syariah yang diukur dengan ROA dan ROE yang mempunyai krteria "tidak baik" dan "kurang baik" dikaitkan dengan peran DPS dalam melakukan pengawasan terhadap Bank Syariah

Tabel 1.1
DATA KINERJA BANK SYARIAH KURANG BAIK DIKAITKAN DENGAN DPS

NAMA BANK	TAHUN	TDPS ≤ 10 SKOR	ROA	KATEGORI	ROE	KATEGORI
Bank BCA Syariah	2010	8	0,78%	Cukup Baik	1,70%	Kurang Baik
Bank BNI Syariah	2010	10	0,61%	Cukup Baik	3,65%	Kurang Baik
Bank Bukopin Syariah	2010	10	0,74%	Cukup Baik	9,65%	Cukup Baik
Bank Panin Syariah	2010	7	-2,53%	Tidak Baik	-4,71%	Tidak Baik
Bank Victoria Syariah	2010	9	-10,77%	Tidak Baik	-94,01%	Tidak Baik
Bank BCA Syariah	2011	8	0,90%	Cukup Baik	2,30%	Kurang Baik
Bank Bukopin Syariah	2011	10	0,52%	Cukup Baik	6,19%	Cukup Baik
Bank Bukopin Syariah	2012	10	0,55%	Cukup Baik	7,32%	Cukup Baik
Bank Bukopin Syariah	2013	9	0,69%	Cukup Baik	7,63%	Cukup Baik
Bank BCA Syariah	2013	10	1,01%	Cukup Baik	4,30%	Kurang Baik
Bank Panin Syariah	2013	10	1,03%	Cukup Baik	4,44%	Kurang Baik
Bank BCA Syariah	2014	10	0,80%	Cukup Baik	2,90%	Kurang Baik
Bank Bukopin Syariah	2014	10	0,27%	Kurang Baik	2,44%	Kurang Baik
Bank BCA Syariah	2015	9	1,00%	Cukup Baik	3,20%	Kurang Baik
Bank Bukopin Syariah	2015	10	0,79%	Cukup Baik	5,35%	Cukup Baik
Bank Panin Syariah	2015	10	1,14%	Cukup Baik	4,94%	Kurang Baik
Bank Bukopin Syariah	2016	10	-1,12%	Tidak Baik	-13,74%	Tidak Baik
Bank Panin Syariah	2016	10	0,37%	Kurang Baik	1,76%	Kurang Baik
Bank Bukopin Syariah	2017	10	0,02%	Kurang Baik	0,20%	Kurang Baik
Bank Panin Syariah	2017	10	-10,77%	Tidak Baik	-94,01%	Tidak Baik

Sumber : data sekunder yang diolah (2019)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa total item pengukuran peran DPS yang mempunyai nilai lebih kecil atau sama dengan 10 mempunyai kinerja yang diukur dengan ROA dan ROE dengan kriteria "tidak baik", "kurang baik" dan "cukup baik". Bank Syariah yang mempunyai kriteria kinerja "tidak baik" ada 2 yaitu Bank Panin Syariah (tahun 2010) dan Bank Victoria Syariah (tahun 2010). Sedangkan Bank Syariah yang mempunyai kriteria "kurang baik" dan "cukup baik" antara lain Bank BCA Syariah (tahun 2010, 2011, 2013, 2014 dan 2015), Bank BNI Syariah (tahun 2010), Bank Bukopin Syariah (tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015) dan Bank Panin Syariah (tahun 2013 dan 2015).

Beberapa penelitian tentang pelaksanaan *corporate governance* yang dilakukan oleh IRTI di perbankan syariah di berbagai Negara menunjukkan pelaksanaan *corporate governance* belum terlaksana dengan baik. Penerapan GCG terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Kegagalan dalam penerapan *corporate governance* di lembaga keuangan syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85 persen (Chapra dan Ahmed 2002)**.** Bank-bank di Negara berkembang mememiliki peran substitusi yang memungkinkan mereka untuk bertindak sebagai sarana atau media untuk menerapkan *corporate governance* (Chahine dan Safieddine 2013)**.** Menurut Al-Hussain (2013) adanya hubungan yang kuat antara efisiensi struktur *corporate governance* dan kinerja perbankan di Arab Saudi. Penelitian Karwowski (2009) menyatakan peranan Bank Islam di Malaysia sangat penting untuk stabilitas perekonomian negara secara keseluruhan. Dampak *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan juga terlihat di Negara Pakistan, bahwa *corporate governance* mempengaruhi kinerja bank syariah di Pakistan tahun 2007-2009. Dalam aspek pengawasan lebih ditekankan pada *Board of Director* (BOD) dan CEO (Mahmood dan Abbas 2013)**.**

Menurut Owolabi dan Dada (2011) konsep mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari BOD, manajemen dan auditor baik auditor internal maupun auditor eksternal. Menurut Mahmood dan Abbas (2013) ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan sedangkan Manaseer et al (2012) hasilnya berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Variabel komposisi anggota dewan independen yang diteliti oleh Manaseer et al (2012) hasilnya tidak berpengaruh signifikan sedangkan Mahmood dan Abbas (2013) hasilnya berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Tidak konsistennya hasil penelitian disebabkan adanya perbedaan regulasi mengenai penerapan *corporate governance* di setiap negara. Regulasi yang terkait dengan regulasi atau peraturan di setiap negara berbeda-beda. Penerapan *corporate governance* di Negara berbasis Islam yaitu Pakistan dan Jordania dimulai pada tahun 2007, dibandingkan dengan negara-negara lain penerapan *corporate governance* mengalami sedikit keterlambatan. Selain itu kondisi perekonomian di setiap negara berbeda-beda sehingga menyebabkan hasil penelitian yang berbeda.

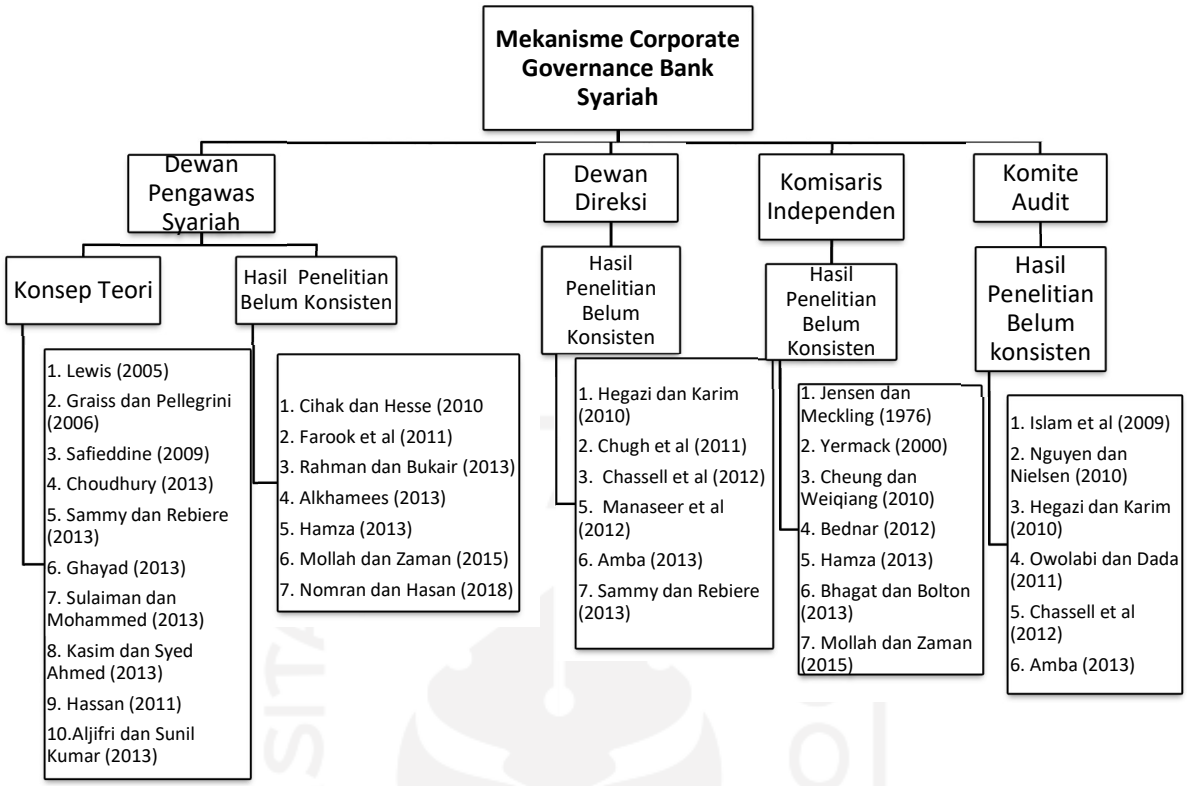
Penelitian mengenai *corporate governance* di Indonesia pada perbankan syariah pernah dilakukan oleh Syam dan Nadja (2012), Laela (2012), dan Nur'ainy et al (2013). Penelitian Syam dan Nadja (2012) dan Triyono (2012) meneliti hubungan *corporate governance* yang diukur dengan indeks *corporate governance* dengan tingkat pengembalian ROA dan resiko pembiayaan NPF atau *Non Performing Finance*. Tertius dan Christiawan (2015) meneliti hubungan *corporate governance* dengan indikator keadilan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, moralitas, komitmen, independensi terhadap kinerja bank umum syariah dengan indikator kemampuan laba, pangsa pasar, simpanan, kepuasan nasabah, loyalitas nasabah, tingkat loyalitas. Penelitian Laela (2012) yang membandingkan peran DPS bank syariah dan bank konvensional terhadap kualitas laba. Hasilnya menyatakan bahwa peran dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai mekanisme *corporate governance* di perbankan syariah ada yang masih berupa konsep teori dan ada yang menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian yang menggunakan variabel Dewan Pengawas Syariah yang masih berupa konsep teori antara lain Lewis (2005), Graiss dan Pellegrini (2006), Safieddine (2008), Choudhury (2013), Sammy dan Rebiere (2013), Ghayad (2013), Sulaiman dan Mohammed (2013), Kasim dan Syed Ahmed (2013), Hassan (2011), Aljifri dan Sunil Kumar (2013). Penelitian Cihak dan Hesse (2010), Farook et al (2011) dan Rahman dan Bukair (2013) hasilnya tidak berpengaruh signifikan sedangkan penelitian Alkhames (2013), Hamza (2013), Mollah dan Zaman (2015), Nomran dan Hasan (2018) hasilnya berpengaruh signifikan. Variabel Dewan Direksi sebagai salah satu pembentuk mekanisme *Corporate Governance* hasil penelitian sebelumnya belum konsisten, penelitian Hegazi dan Karim (2010), Chugh et al (2011) dan Chassell et al (2012) hasilnya tidak signifikan sedangkan Manaseer et al (2012), Amba (2013), dan Sammy dan Rebiere (2013) hasil berpengaruh signifikan. Penelitian variabel Komisaris Independen yang dilakukan Jensen dan Meckling (1976), Yermack (2000), Hamza (2013), Bhagat dan Bolton (2013), dan Mollah dan Zaman (2015) hasilnya berpengaruh signifikan sedangkan yang dilakukan oleh Cheung dan Welqiang (2010) dan Bednar (2012) hasilnya tidak berpengaruh signifikan. Variabel Komite Audit penelitian yang dilakukan Islam et al (2009), Nguyen dan Nielsen (2010), Owolabi dan Dada (2011) hasilnya tidak berpengaruh signifikan sedangkan Hegazi dan Karim (2010), Chassell et al (2012) dan Amba (2013) hasilnya berpengaruh signifikan.

Penelitian sebelumnya yang meneliti kinerja Bank Syariah dengan menggunakan pengukuran ROA antara lain Naceur (2003); Cheung dan Weiqiang (2010); Khatab et al (2011); Chugh et al (2011); dan Alali et al (2011) hasilnya tidak berpengaruh signifikan sedangkan penelitian Bednar (2012); Manaseer et al (2012); Amba (2013); Bhagat dan Bolton (2013); Grassa dan Mataousi (2014); Mollah dan Zaman (2015); Pratiwi (2016); dan

Musibah dan Alfattani (2017) hasilnya berpengaruh signifikan. Penelitian kinerja Bank Syariah dengan variabel ROE antara lain Samontaray (2010) hasilnya tidak berpengaruh signifikan sedangkan Naceur (2003); Khatab et al (2011); Chugh et al (2011); Manaseer et al (2012); Amba (2013); Grassa dan Mataousi (2014); Mollah dan Zaman (2015); Pratiwi (2016); Musibah dan Alfattani (2017) hasilnya berpengaruh signifikan. Penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel kualitas *Corporate Governance* di Indonesia antara lain Syam dan Taufik (2012); Laela (2012); dan Pratiwi (2016) hasilnya mempunyai pengaruh signifikan. Sedangkan penelitian sebelumnya yang meneliti ukuran perusahaan (*size*) sebagai variabel kontrol antara lain Samontaray (2010); Zerni et al (2010); Cheung dan Weiqiang (2010) hasilnya tidak berpengaruh signifikan sedangkan penelitian Khatab et al (2011); Alali et al (2011); Bednar (2012); Manaseer et al (2012); Bhagat dan Bolton (2013) hasilnya berpengaruh signifikan.

Perbedaan hasil penelitian mengenai *corporate goverance* dengan menggunakan indikator DPS, Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Komite Audit bisa dilihat di skema di bawah ini:



Gambar 1.1.

SKEMA RISET GAP

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang *corporate governance* terhadap Kinerja Bank Syariah belum ada yang meneliti peran DPS dalam model pengawasan di Bank Syariah yang dikaitkan dengan kualitas laporan pelaksanaan *corporate governance* sehingga dapat meningkatkan kinerja Bank Syariah. Penelitian sebelumnya kebanyakan fokus pada struktur model pengawasan DPS yang disesuaikan dengan peraturan-peraturan dan fatwa yang berlaku di masing-masing negara dalam menerapkan *shariah compliance*. Bahkan ada penelitian yang masih berupa konsep teori dalam penerapan DPS atau yang disebut sebagai *Shariah Supervisory Board* (SSB). *Shariah Supervisory Board* (SSB) di setiap negara mempunyai peraturan dan struktur yang berbeda. Di Indonesia peran DPS berada di bawah pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga prosedur pemilihan DPS termasuk tugas dan tanggung jawab DPS selain di sesuaikan dengan aturan dari PBI No. 11/33/PBI/2009 maka juga harus

menyesuaikan fatwa dari MUI. Fungsi utama DPS adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Ada beberapa model pengorganisasian DPS yaitu model penasehat, model pengawasan dan model departemen. Penelitian sebelumnya belum ada yang fokus pada peran DPS dari tiga model pengorganisasian tersebut dimana semua model pengorganisasian tersebut bisa diterapkan di semua Bank Syariah di Indonesia. Fenomena di Indonesia anggota DPS yang diangkat disebabkan oleh karisma dan kepopulerannya di masyarakat, bukan karena kompetensi keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah. Anggota DPS seharusnya selain memahami *fiqh muamalah* juga memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah, seperti ilmu ekonomi moneter. Selain itu ada DPS datang sekali sebulan atau sekali seminggu bahkan ada yang berbulan-bulan tidak datang ke Bank Syariah yang seharusnya diawasinya. Model pengawasan demikian jelas tidak signifikan dalam pengawasan perbankan syariah karena peran DPS ditempatkan hanya sebagai penasehat. Hal tersebut akan berdampak pengawasan dan peran strategis lainnya sangat tidak optimal. Apapun model pengorganisasian DPS seharusnya akan berpengaruh terhadap Bank Syariah yang diawasi, sehingga akan meningkatkan kinerja Bank Syariah.

Dengan adanya beberapa model pengawasan DPS tersebut dan hal itu juga berlaku di Bank Syariah di Indonesia, maka kebaharuan dalam penelitian ini yaitu pada peran DPS yang merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance* di Bank Syariah, sehingga dapat meningkatkan kinerja Bank Syariah melalui kualitas laporan pelaksanaan *corporate governance*, dan sebagai salah satu indikator untuk menilai kualitas penerapan *corporate governance* dalam bentuk *self assessment*. Pengukuran variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) menggunakan indikator item berdasarkan *Operating Procedures of the Shariah Board* yang terdapat dalam *Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang merupakan *Guiding Principles On Shariah Governance System for Institutions Offering Islamic Financial Service*

dimana pengukuran tersebut belum pernah diteliti sebelumnya. Peran DPS dalam penelitian ini menggunakan pengukuran, berdasarkan pengukuran tersebut dibagi menjadi lima indikator yaitu: (1) Independensi; (2) Kompetensi; (3) Komunikasi; (4) Komposisi; dan (5) Performa, dengan keseluruhan terdapat 18 item. Pengukuran yang dipakai ini diasumsikan bisa mewakili dalam menilai peran DPS dengan model pengorganisasian yang berbeda-beda tersebut, namun tetap memenuhi kriteria sesuai *Islamic Financial Services Board* (IFSB) sebagai pedoman DPS dalam melakukan tugas dan kewajibannya di Bank Syariah. Penelitian ini juga menggunakan model penelitian yang berbeda yaitu dengan menambahkan variabel mediasi yaitu Kualitas Penerapan *Corporate Governance*. Variabel kualitas penerapan *corporate governance* diukur dengan pengukuran *self assessment* yang wajib dilakukan oleh perbankan sesuai Peraturan OJK (POJK) No.55/POJK.03/2016, salah satu aturan tersebut adalah melakukan *self assessment* secara mandiri yang diperkuat dengan peraturan BI dan OJK yang tecantum dalam SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata kelola bagi Perbankan meliputi 11 faktor GCG perbankan dengan menggunakan ketentuan formula dan pembobotan seperti yang pernah diteliti oleh Syam dan Nadja (2012); Laela (2012).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi asimetri informasi yang sangat tinggi dalam bank syariah, maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal tersebut berkaitan dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham (Laela, 2012; Nur'ainy et al, 2013). Penelitian mengenai *corporate governance* pada bank syariah sangat penting dilakukan karena tingkat resiko bank syariah lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Dua resiko yang menimbulkan potensi *moral hazard* yang lebih besar adalah *equity investment risk* dan

rate of return risk (IFSB 2009). *Equity investment risk* merupakan pengelolaan resiko bagi pembiayaan dengan system bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang digunakan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam pembiayaan tersebut ada potensi dana bank akan hilang apabila debitur mengalami kerugian dalam usaha, sehingga yang terjadi bukan bagi hasil namun kerugian. Sementara itu *rate of return risk* merupakan potensi resiko larinya dana pihak ketiga ke bank konvensional karena suku bunga yang ada di pasar melebihi imbal hasil yang diberikan bank syariah. Hal itu disebabkan karena imbal hasil untuk simpanan pada bank syariah fluktuatif mengikuti kinerja dari pembiayaan, berbeda dengan bank konvensional yang telah menentukan besarnya bunga tetap untuk dana pihak ketiga. Oleh sebab itu, bank syariah memerlukan penerapan *corporate governance* yang lebih ketat dibandingkan bank konvensional dengan menerapkan *sharia compliance* yang diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi dengan pengawasan dari DPS.

Fungsi dan peran DPS di Bank Umum Syariah memiliki hubungan yang kuat dengan manajeman resiko perbankan syariah yaitu resiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada resiko lainnya, seperti resiko likuiditas yang berdampak pada kinerja. Pelanggaran syariah *compliance* yang dibiarkan DPS atau tidak terdeteksi oleh DPS akan merusak citra dan kredibilitas Bank Umum Syariah (BUS) di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada BUS. Maka peran DPS di BUS harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat. Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan masih banyak beberapa kelemahan kinerja DPS yaitu: (1) Anggota DPS diangkat karena karisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah; (2) Masih banyak ulama sebagai DPS yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga; (3) Perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan yang bersifat syar`i; (4) Masih banyak ditemukannya

pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah, khususnya perbankan yang konversi ke syariah; dan (5) Apabila ada kasus yang menyimpang dari syariah Islam di bank syariah yang mengetahui lebih dulu adalah Bank Indonesia.

Fungsi mekanisme *corporate governance* lainnya adalah jumlah anggota dewan direksi, komposisi jumlah anggota dewan independen, dan komite audit yang juga dapat menjadi indikator untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG dan juga dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah. Berdasarkan uraian rumusan masalah maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Bagaimana pengaruh DPS terhadap kualitas penerapan *corporate governance*?
2. Bagaimana pengaruh kualitas penerapan *corporate governance* terhadap kinerja Bank Syariah?
3. Bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja Bank Syariah?
4. Bagaimana kualitas penerapan *corporate governance* memediasi pengaruh DPS terhadap kinerja Bank Syariah?
5. Bagaimana kualitas penerapan *corporate governance* memediasi pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja Bank Syariah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris:

1. Pengaruh DPS terhadap kualitas penerapan *corporate governance*.
2. Pengaruh kualitas penerapan *corporate governance* terhadap kinerja Bank Syariah.
3. Pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja Bank Syariah.
4. Kualitas penerapan *corporate governance* yang memediasi pengaruh DPS terhadap kinerja Bank Syariah.

5. Kualitas penerapan *corporate governance* yang memediasi pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja Bank Syariah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat membuktikan kesenjangan dalam penelitian *corporate governance* dimana mempunyai dua perspektif yang berbeda yaitu perspektif *shareholding* dan perspektif *stakeholding*. Perbedaan mendasar atas dua perspektif tersebut disebabkan dari sudut pandang tujuan keberadaan dari suatu organisasi serta struktur *governance* yang dianut dalam mencapai tujuan tersebut. Perspektif *shareholding* dianggap sebagai pandangan tradisional dengan mengasumsikan organisasi sebagai instrumen legal pemilik dalam memaksimalkan keuntungan melalui pencapaian tujuan organisasi. Perspektif *shareholding* didasarkan pada kepemilikan individu yang merupakan prinsip kapitalisme (Letza, Sun and Kirkbride 2004). Dengan demikian, *individualism* menjadi karakteristik dan acuan utama *corporate governance* menurut perspektif *shareholding*, sehingga ideologi individualistis yang dimaksud diakomodasi dalam bentuk undang-undang perusahaan *(corporate law)*. Perspektif *shareholding* ini mempunyai kelemahan yaitu tidak adanya proteksi kepentingan *shareholder* secara efektif secara legal dan institusional, sehingga muncul konsep yang menjelaskan hubungan antara pemilik *(principal)* dan pengelola *(agents)*. Konsep dalam hubungan antara *principal* dan *agent* inilah yang memunculkan *agency theory* dimana teori tersebut untuk mengatasi adanya konflik kepentingan *(agency problem)* antara prinsipal *(shareholders)* dan manajemen *(agent)*. Jadi sebenarnya *agency theory* muncul berdasarkan perspektif *shareholding* untun meminimalisir adanya konflik kepentingan (Lukviarman 2016).

Sedangkan perspektif *stakeholding*, memandang organisasi secara berlawanan dengan perspektif sebelumnya, dengan asumsi bahwa suatu organisasi merupakan jaringan relasional antara berbagai pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* secara lebih luas. Perspektif *stakeholding* ini mempunyai pandangan bahwa perusahaan sebagai entitas sosial dimana perusahaan terlibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial sehingga keberadaannya membawa dampak pada masyarakat, baik dari segi kemampuan meningkatkan kesejahteraan maupun dampak resiko yang ditimbulkannya. Secara legal perspektif *stakeholding* didukung oleh asas *"corporation as an independent legal person"* namun dalam konteks yang lebih luas dibanding paham individualistik (Lukviarman 2016). Dalam struktur organisasi perbankan di Indonesia dimana semua kegiatan perbankan harus berdasarkan peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka dapat diasumsikan mengarah pada perspektif *stakeholding*. Sehingga terjadi kecenderungan perubahan pendekatan dari kerangka *agency theory* dan lebih mengarah kepada kerangka *stakeholder theory*, dengan penekanan kepada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan yang lebih luas terhadap berbagai pihak yang berkepetingan dengan perusahaan. Pada umumnya pedoman *corporate governance* di dominasi oleh persepektif *shareholding* dimana menggunakan pendekatan *agency theory* dengan fokus utama kepada upaya rekonsiliasi konflik kepentingan antara pihak manajemen dan pemilik yang sering ditemui di negara maju.

1.4.2. Manfaat Empiris

Penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia dan diharapkan dapat, memberikan manfaat (1) bagi pembuat kebijakan, dalam hal ini Bank Indonesia dapat memberikan masukan untuk membuat regulasi atau peraturan yang dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah melalui mekanisme *corporate governance*;

(2) bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Jasa Keuangan termasuk perbankan syariah di Indonesia; (3) bagi para peneliti dan akademisi, hasil temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi yang tertarik pada isu *corporate governance* perbankan syariah sehingga hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian literatur yang membahas mengenai mekanisme *corporate governance* pada perbankan syariah; dan (4) diharapkan hasil temuan penelitian ini memberikan manfaat pada praktik perbankan syariah di Indonesia, baik bagi praktisi keuangan, *stakeholder* yang terkait, investor dan juga deposan.

1.5.Kontribusi Penelitian

Kontribusi empiris penelitian ini adalah (1) membuktikan seberapa besar peran DPS, mekanisme *corporate governance* terhadap kualitas penerapan *corporate governance* sehingga dapat meningkatkan kinerja bank syariah. Penelitian ini menggunakan variabel DPS berdasarkan artikel konseptual dari Chapra dan Ahmed (2002); Choudhury dan Hoque (2006); Sammy dan Vincent (2013); Ghayad (2013); Sulaiman dan Joriah (2013); Kasim, Htay dan Slaman (2013); Aljifri dan Khandelwal (2013); Hamza (2016); Mollah dan Zaman (2015); Nomran, Haron dan Hassan (2018) . Pengukuran variabel DPS menggunakan indikator item berdasarkan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) tentang *Operating Procedures of the Shari`ah Board* yang menjadi pedoman untuk DPS. Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi model penelitian bagi bank syariah mengenai pola peningkatan kinerja keuangan bank syariah dengan kualitas penerapan *corporate governance* karena dalam model penelitian ini menambahkan variabel mediasi yaitu kualitas laporan pelaksanaan *corporate governance* berdasarkan penelitian (Lukviarman 2016), yang

menyatakan bahwa dalam perkembangan riset terkait mekanisme *corporate governance* penelitian berkembang dalam upaya peningkatan kualitas penerapan *corporate governance* dengan pendekatan *stakeholder-oriented*.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. *Corporate Governance*

2.1.1. Definisi *Corporate Governance*

Definisi *Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* atau FCGI (2001) yang menggunakan definisi *Cadbury Committee* yaitu: Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Sedangkan definisi menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan bahwa *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan usaha perusahaan. *Corporate Governance* juga mencakup tugas, hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, dan *stakeholder* yang lain. Agar dapat mewujudkan tujuan GCG, yaitu mewujudkan *shareholders value*, maka dalam pelaksanaannya memerlukan seperangkat prinsip-prinsip yang mendukung.

Menurut Daniri (2005) GCG didefinisikan sebagai system yang mengatur pengelolaan dan pengawasan bisnis korporasi, mengatur hak dan kewajiban pihak terkait yaitu *Board of Commissioners*, *Board of Directors*, *Shareholders* dan *Stakeholders* lainnya, memuat aturan main dan prosedur yang harus ditempuh dalam membuat keputusan yang terkait dengan keputusan korporasi, merumuskan mekanisme untuk penetapan yang objektif dan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai objektif serta pemantauan kerja.

2.1.2. Prinsip-prinsip *Governance*

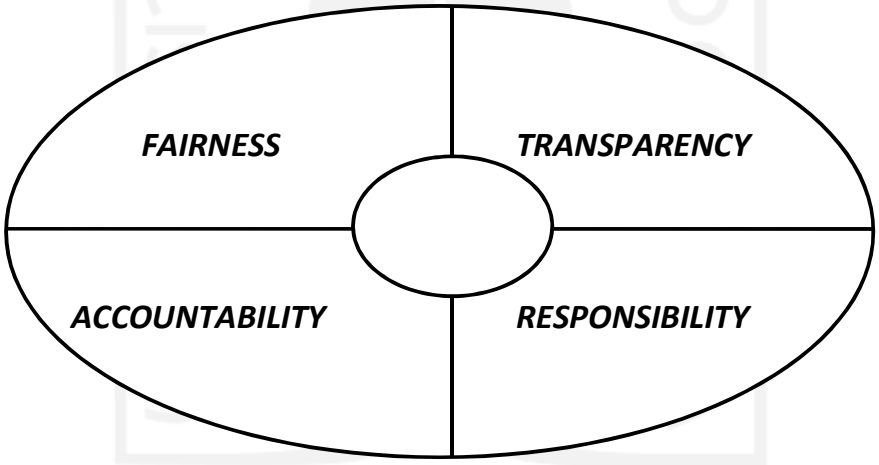
Pentingnya hubungan agensi sebagai salah satu unsur tata kelola perusahaan nampak pada prinsip–prinsip internasional mengenai tata kelola perusahaan, prinsip ini juga dipakai oleh FCGI, antara lain mencakup:

1. Hak–hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan–perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
2. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.
3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antar perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan.
5. Tanggung-jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggung-jawaban kepada perusahaan dan pemegang saham.

Di lihat dari prinsip–prinsip tersebut, nampak bahwa pemegang saham merupakan pihak yang paling mendapatkan perhatian dalam tata kelola perusahaan. Prinsip– prinsip tersebut dimaksud untuk mengevaluasi dan meningkatkan hukum, institusi dan kerangka peraturan untuk tata kelola perusahaan.

Dalam konteks penerapan tata kelola perusahaan, OECD telah mengembangkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan perkembangan hukum, budaya dan sosial di suatu negara. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman yang penting dalam mengelaborasi praktik terbaik *(best practice)* didalam kerangka meningkatkan *shareholder value* dan kelangsungan hidup perusahaan. Prinsip–prinsip tersebut dapat diringkas menjadi: transparansi *(transparency)*, akuntabilitas (*accountability*), kewajaran *(fairness),* dan pertanggung jawaban *(responsibility)*. Keempat prinsip tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Prinsip – prinsip *GCG*



(sumber: FCGI, 2002)

1. *Fairness* (Kewajaran)

Kewajaran dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak–hak pemegang saham, dengan keterbukaan informasi bagi berbagai pihak, baik pemegang saham minoritas maupun mayoritas. Daniri (2014) mengungkapkan bahwa secara sederhana kesetaraan dan kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* diwujudkan antara lain dengan membuat

peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, adanya peraturan korporasi yang melindungi terhadap perbuatan orang dalam yang merugikan pemegang saham.

2. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi diartikan sebagai pengungkapan informasi material secara terbuka kepada semua pihak mengenai perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara terbuka dan tepat waktu, dan dapat juga berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan–perubahan yang mendasar atas perusahaan. Dengan diterapkannya prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah pembagian yang jelas mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan akan berjalan dengan efektif.

Menurut FCGI (2002)**,** prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan *(financial statement)* pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat; mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan komisaris; mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra *business strategic* berdasarkan *best practices* (bukan sekedar audit). Transformasi menjadi "*Risk based audit*"; menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan *(dispute);* penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi); dan menggunakan *external auditor* yang memenuhi syarat (berbasis *profesionalisme*).

4. *Responsibility* (Pertanggung-jawaban)

Menurut Daniri (2005) pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa

tanggung jawab adalah konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggung jawab sosial; menghindari penyalagunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung tinggi etika bisnis; dan tanggung jawab sosial.

Disadari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Peran dan tuntutan investor serta kreditur asing mengenai penerapan tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi suatu perusahaan. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan pada dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan bisnis agar perusahaan-perusahaan yang ada mampu menghadapi persaingan bisnis global.

Meskipun upaya penerapan tata kelola perusahaan terus berlangsung, namun praktek tata kelola perusahaan pada perusahaan di Indonesia masih ada kelemahan–kelemahan. Menurut Herwidayatmo (2003) praktik–praktik di Indonesia yang bertentangan dengan konsep tata kelola perusahaan dapat dikelompokkan menjadi:

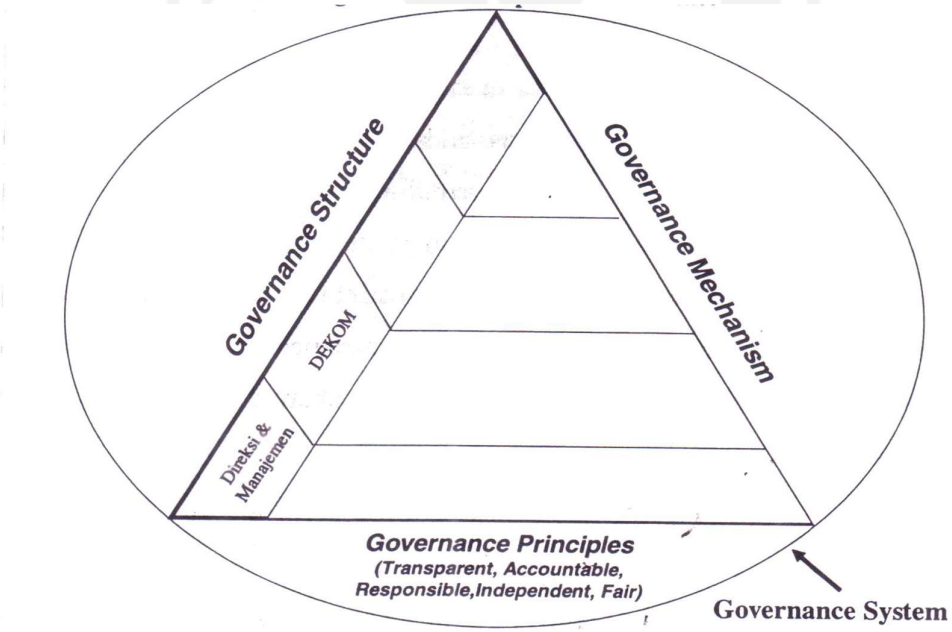
1. Adanya konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan;
2. Tidak efektifnya dewan komisaris; dan
3. Lemahnya penegakan hokum *(law enforcement).*

Berdasarkan gambar 2.1 perangkat *governance* dari suatu organisasi terdiri dari: (1) Prinsip-prinsip *Governance*; (2) Struktur *Governance*; dan (3) Mekanisme *Governance*.

Mekanisme *governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya *governance system* dalam sebuah organisasi (Lukviarman 2016)**.** Mekanisme eksternal disebut juga sebagai mekanisme pasar dalam mengendalikan perusahaan. Menurut Lukviarman (2016) fungsi kontrol ini dilakukan oleh kompetisi pasar sebagai bagian dari instrumen *corporate governance* di dalam mendisiplinkan manajemen. Mekanisme pasar ini dilakukan oleh mekanisme pasar modal (*capital market*), pasar produk (*product market*) serta

pasar tenaga kerja (*labour market*). Mekanisme pasar modal bekerja melalui indikator harga saham, mekanisme pasar produk bekerja jika produk yang dihasilkan manajemen tidak kompetitif di pasar sedangkan untuk mekanisme pasar tenaga kerja melalui penilaian kinerja manajerial. Mekanisme internal terdiri dari mekanisme *board governance*, monitoring oleh pihak perbankan sebagai penyedia sumber pembiayaan (bank *governance*) serta mekanisme insentif dan kompensasi untuk eksekutif (*executive compensation*). Mekanisme melalui *board governance* dapat difungsikan secara efektif sebagai perantara antara RUPS dan dewan direksi (manajemen) yang menjembatani keduanya.

Gambar 2.2
Perangkat *Governance*



(sumber: FCGI, 2002)

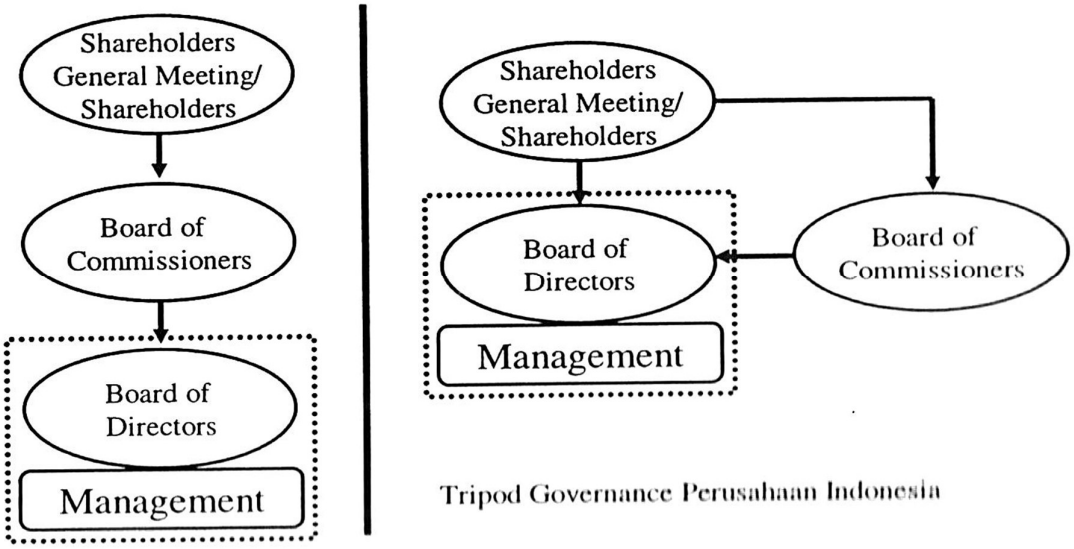
2.1.3. Struktur *Governance*

Struktur *Governance* merupakan suatu kerangka di dalam organisasi bagaimana berbagai prinsip *governance* dapat dibagi, dijalankan, dan dikendalikan. Secara spesifik struktur *governance* harus didesain untuk mendukung berjalannya aktivitas organisasi secara

bertanggung jawab dan terkendali. Penekanan pengendalian menjadi sangat penting karena *governance* berhubungan dengan atas pertanyaan "*who control whom*" yang muncul dari pentingnya pemisahan antara "pihak yang mengambil keputusan" (*decision making*) dengan "pihak yang mengontrol keputusan tersebut" (*decision control*).

Perusahaan di Indonesia struktur *governance* menggunakan model *Continental European* dalam bentuk dual board (*two-tier board*) di dalam struktur mereka. Struktur utama dalam model ini terdiri dari: (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); (2) Dewan Komisaris (*supervisory board*); dan (3) Dewan Direksi (*management board*).

Gambar 2.3
Model *Governance* Untuk *Dual Board* di Indonesia
(Model *Continental European*)



(Sumber : Daniri, 2005)

Konsep *corporate governance* dan berbagai aturan implementasinya diadopsi dari Negara Barat. Jika dihubungkan dengan sistem yang akan digunakan dalam menjalankan konsep *corporate governance*, maka *system governance* dapat diklasifikasikan menjadi (1) *system* yang berdasarkan pada "dominasi pasar" (*market dominated*) dan (2) *system* yang

berdasarkan "dominasi bank" (*bank dominated*) (Syahkhroza 2005). atau ada juga yang mengklasifikasikan sebagai *market based system* dalam model Anglo Saxon dan *Group-based System* dalam model *Continental European* (Syahkhroza 2005).

Model *governance* yang dimiliki Indonesia dapat dianggap mengikuti model *Continental European* dengan karakteristik *system* yang mengacu pada "*insider dominated control*" sebagaimana yang terdapat dalam model *bank-oriented system*. Menurut Lukviarman (2016) beberapa ciri yang mengacu pada sistem ini adalah : (a) Undang-undang perusahaan di Indonesia diadopsi menurut "*French Civil-Law Tradition"* dari *Continental European*, (b) digunakannya struktur dua dewan perusahaan (*two-tier board system*) sebagaimana juga ditemukan pada berbagai negara *Continental European*, (c) terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan, bahkan yang sudah *go public* pada sekelompok orang, (d) dominannya sumber pembiayaan perusahaan dari luar perusahaan berupa hutang *(external-bank financing)*, serta (e) tidak likuidnya pasar modal dan tidak berjalannya mekanisme kontrol oleh pasar.

2.1.4. Manfaat Penerapan *Corporate Governance*

Esensi peningkatakn *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Lukviarman 2016)**.** *Good corporate governance* (GCG) memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif. Manfaat penerapan GCG menurut *Bassel Committee on Banking Supervision* (BCBS): (1) mengurangi *agency cost* yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk

mencegah tejadinya hal tersebut; (2) mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil sehingga resiko perusahaan semakin berkurang; (3) meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang; (4) menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka akan mendapatkan manfaat maksimal dari kegiatan operasional perusahaan dalam menciptakan kemakmuran; (5) Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku; dan (6) Menjaga *"going concern"* perusahaan.

Menurut OECD (2004) menyatakan ada dua keluaran atau output yang diharapkan dalam proses *governance* yaitu (1) mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan (2) mampu mengurangi konflik kepentingan perusahaan.

2.2. *Corporate Governance* di Perbankan

Perbankan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak. Perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perbankan ini membutuhkan adanya prinsip-prinsip dalam menjalankan kegiatan operasinya, khususnya pada kinerja keuangannya agar kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan perbankan tersebut. Dan prinsip yang paling cocok diterapkan dalam pencapaian tujuan kinerja keuangan tersebut

adalah prinsip *corporate governance* (Tertius dan Christiawan 2015). Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* juga dirasakan sangat kuat dalam dunia perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan sangat beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan adanya penerapan *corporate governance* perbankan. Penerapan *corporate governance* selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan *corporate governance* menjadi suatu kepercayaan mengingat industri perbankan mengelola dana publik (nasabah).

Dalam *Basel Committee on Banking Supervision* (1999) *"Enhancing Good Corporate Governance in Banking Organization"*, sekurang-kurangnya terdapat 7 (tujuh) standar untuk menerapkan GCG secara efektif pada perbankan yaitu :

1. Bank harus menetapkan sasaran strategik dan serangkaian nilai-nilai perusahaan yang dikomunikasikan kepada setiap jenjang jabatan pada organisasi.
2. Bank harus menerapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan pada organisasi.
3. Bank harus memastikan bahwa pengurus Bank memiliki kompetensi yang memadai dan integritas yang tinggi serta memahami peranannya dalam pengelolaan Bank yang sehat, independen terhadap pengaruh atau pengendalian pihak eksternal.
4. Bank harus memastikan keberadaan pengawas yang tepat oleh direksi.
5. Bank harus mengoptimalkan efektivitas peranan dan fungsi auditor eksternal (akuntan publik) dan satuan kerja audit internal.
6. Bank harus memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah konsisten dengan nilai etik, sasaran, strategi dan lingkungan pengendalian Bank.
7. Bank harus menerapkan praktek-praktek transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik.

Pada dasarnya praktek GCG pada perbankan memfokuskan pada tanggung jawab pengelolaan bank yang sehat oleh dewan komisaris dan dewan direksi. Pada saat ini secara eksplisit Bank Indonesia telah menerapkan berbagai ketentuan untuk memastikan perbankan dijalankan secara sehat oleh manajemen yang kompeten dan kredibel untuk mengakomodasikan prinsip-prinsip GCG. Beberapa kebijakan pengaturan GCG di Perbankan Indonesia yaitu UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 secara umum telah diatur mengenai hal-hal yang terkait dengan *corporate governance* di Perbankan baik yang menyangkut *governance structure, governance process* dan *governance outcomes.* Pengaturan tersebut antara lain syarat kepemilikan, dewan komisaris dan direksi serta prinsip-prinsip kehati-hatian bank yang harus ditaati.

Disamping itu, bahwa bentuk hukum bank dapat berupa perseroan terbatas (PT), perusahaan daerah dan koperasi maka *corporate governance* yang terkait juga akan mengikuti UU yang berlaku yaitu UU No.1 tahun 1995 tentang PT, UU koperasi, dan UU perusahaan daerah. Berkenaan dengan semakin kompleks dan resiko yang dihadapi perbankan di masa mendatang, Bank Indonesia akan terus mendorong agar *stakeholder* juga melakukan pengawasan terhadap perbankan melalui mekanisme pasar. Berkenaan dengan hal tersebut pelaksanaan GCG oleh perbankan menjadi semakin penting. Bank harus sadar bahwa pengelolaan yang baik sesuai prinsip GCG adalah mutlak. Sejalan dengan implementasi organisasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) maka Bank Indonesia akan memperkuat pelaksanaan GCG di perbankan Indonesia antara lain dengan:

1. *Governance Structure*: (1) Memperkuat peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi; (2) Memperjelas struktur kepemilikan bank; (3) Peningkatan efektivitas fungsi direktur kepatuhan; dan (4) Kemungkinan mengaktifkan kembali Dewan Audit.

2. *Governance Process*: Bank Indonesia terus mendorong dan mengevaluasi pengaturan dalam proses internal bank secara lebih baik seperti penguatan dan pelaksanaan *risk management*, internal audit, dan pelaksanaan *prudential regulation* lainnya.

3. *Governance Outcome*: Peningkatan kualitas transparansi kondisi keuangan bank antara lain profil dan remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan sistem honorarium bagi auditor ekternal, gugatan atas bank serta kasus pengadilan menyangkut bank, dan penerapan GCG pada bank.

Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip *corporate governance* antara lain Peraturan Bank Indonesia No.2/ 27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang bank umum yang didalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota direksi dan komisaris bank umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan dan dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Tujuan utama dari peraturan ini adalah berbagai upaya perwujudan *corporate governance* dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan opersional bank yang dilakukan oleh direksi, komisaris, maupun pemegang saham. Peraturan lainnya yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan *corporate governance* adalah Peraturan Bank Indonesia No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. PBI tersebut mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Selain itu, diatur juga mengenai kewenangan dan tanggung jawab direksi dan komisaris yang harus dilakukan terkait penerapan manajemen risiko tersebut.

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank di Indonesia terus melakukan perbaikan di bidang pengaturan dan pengawasan bank dengan tetap mengacu pada 25 *Basle Code Principle* dengan penyesuaian kondisi Indonesia.

2.3. *Corporate Governance* di Perbankan Syariah

Penerapan *corporate governance* pada bank syariah mengacu pada *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Dalam IFSB terdapat *Shari`ah Governance System* yang mengatur penerapan *corporate governance* untuk institusi syariah teruatama bank syariah.

Tabel 2.1
Perbedaan Fungsi dalam Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah

Fungsi	Lembaga Keuangan Konvensional	Lembaga Keuangan Syariah
Governance	Dewan Komisaris	Dewan Pengawas Syariah
Pengendalian	Auditor internal dan auditor eksternal	Pengawas Syariah Internal dan Pengawas Syariah Eksternal
Kepatuhan	Pejabat tinggi unit atau departemen	Unit Kepatuhan Syariah

(Sumber: IFSB *Shari`ah Governance*, 2009)

Berdasarkan Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 bahwa fungsi yang harus dimiliki pada bank syariah adalah (1) audit internal; (2) komite manajemen resiko; dan (3) fungsi kepatuhan. Keberadaan dewan syariah adalah wajib bagi lembaga yang ingin melakukan kegiatan operasional berdasarkan sistem syariah. Pengawasan penerapan prinsip syariah meliputi berbagai alur operasional lembaga keuangan baik dari sisi pengumpulan dana, investasi maupun kegiatan jasa lainnya. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, pengawasan dewan syariah dilakukan oleh dua lembaga yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun tidak memiliki hubungan struktural akan tetapi terdapat hubungan koordinatif antara DSN dan DPS.

Tugas dan fungsi DPS yaitu :

1. Mengawasi dan memantau kegiatan operasional bank untuk menjamin kepatuhannya terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Menilai dan memberi persetujuan mengenai aspek-aspek syariah pada setiap pedoman produk dan operasional perusahaan.
3. Memberikan pendapat mengenai kepatuhan syariah atas kegiatan operasional perusahaan dalam laporan publikasi.
4. Meninjau produk dan layanan baru yang belum diatur oleh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
5. Menyerahkan laporan pengawas syariah setiap 6 bulan kepada dewan komisaris, direksi, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

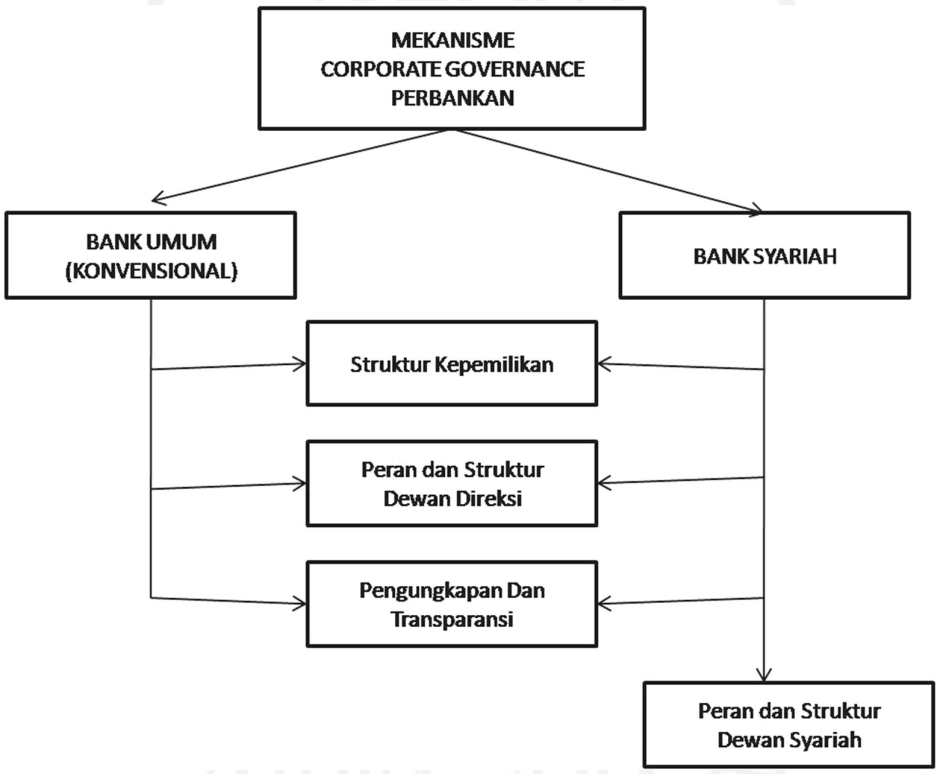
Lembaga yang kedua dalam struktur perbankan syariah adalah peran auditor internal dan eksternal. Tugas auditor internal adalah melakukan pengawasan terhadap operasional perbankan syariah yang dilakukan oleh manajemen. Pengawasan ini meliputi pengukuran standarisasi kesehatan bank berdasarkan ketentuan yang berlaku dan evaluasi kinerja manajemen dalam memperhatikan resiko seperti misalnya pembiayaan yang diberikan tidak boleh melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Pencadangan aktiva produktif dan pengelolaan resiko bank syariah lainnya termasuk pelaksanaan mekanisme operasional bank dengan prinsip syariah. Sedangkan auditor eksternal di perbankan syariah seperti halnya di perbankan konvensional memberikan penilaian terhadap laporan keuangan bank syariah dengan standarisasi akuntansi syariah yang telah ditetapkan.

2.3.1. Mekanisme *Corporate Governance* di Perbankan Syariah

Dalam penerapan *corporate governance* lembaga perbankan syariah mempunyai mekanisme yang berbeda yaitu (1) bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah *(shariah compliance)* dalam menjalankan bisnisnya. Oleh sebab itu DPS memainkan peran penting dalam *governance structure* perbankan syariah; (2) potensi terjadinya informasi asimetris sangat tinggi bagi perbankan syariah maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal ini berkaitan dengan permasalahan tingkat

akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Karena itu permasalahan *Investment Account Holder* (IAH) dalam mekanisme *corporate governance* menjadi masalah yang sangat penting dalam perbankan syariah; dan (3) Dilihat dari perspektif budaya perusahaan atau organisasi perbankan syariah semestinya melakukan transformasi budaya dimana nilai-nilai etika bisnis islami menjadi karakter yang inheren dalam praktek bisnis perbankan syariah (Syahkhroza 2005).

Gambar 2.4
Perbedaan Mekanisme *Corporate Governance* Perbankan



(Sumber : dikembangkan oleh peneliti untuk disertasi , 2018)

Pada gambar 2.4 menunjukkan skema perbedaan mekanisme *corporate governance* perbankan umum dan perbankan syariah yaitu pada peran dan struktur Dewan Syariah. Berdasarkan perbedaan mekanisme *corporate governance* tersebut diharapkan perbankan syariah mempunyai mekanisme *corporate governance* yang lebih baik dari segi pengawasan dengan adanya Dewan Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur

organisasi adalah wajib bagi lembaga yang ingin melakukan kegiatan operasional berbasis sistem syariah.

Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Dewan Pengawas Syariah; (2) komite audit; (3) ukuran dewan direksi; dan (4) komposisi anggota dewan komisaris. Mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya *agency* yaitu dengan mekanisme *monitoring* dan *bonding*. Berikut ini adalah mekanisme-mekanisme yang digunakan untuk mengurangi biaya *agency*.

2.3.1.1.Mekanisme Monitoring

Dalam perbankan syariah diperlukan mekanisme *monitoring* yaitu :

a. Pengawasan Dewan Komisaris

Berdasarkan penelitian (Mahmood dan Abbas 2013; Manseer et al 2012). Pengawasan Dewan Komisaris terdiri dari:

1. Jumlah anggota dewan komisaris (*board size)*

Dewan komisaris yang terdiri dari komisaris wakil dari pemegang saham, komisaris independen, dan komite-komite yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen. Fungsi dewan komisaris, antara lain; melakukan pengawasan terhadap direksi dalam pencapaian tujuan perusahaan dan memberhentikan direksi untuk sementara bila diperlukan. Dewan komisaris dapat melakukan tugasnya sendiri maupun dengan mendelegasikan kewenangannya pada komite-komite yang bertanggung jawab pada dewan komisaris. Dewan komisaris harus memantau efektifitas praktek GCG yang diterapkan perusahaan, bilamana perlu melakukan penyesuaian. Dewan komisaris memiliki peran dalam pengawasan perusahaan secara keseluruhan. Manaseer (2012) mengusulkan bahwa dewan komisaris (*board*) akan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya apabila jumlahnya tidak melebihi tujuh atau delapan orang. Beberapa penelitian lain yang menyatakan bahwa jumlah

dewan komisaris yang banyak lebih efektif dalam pencapaian kinerja yang lebih baik (Chen, Chen dan He, 2008; Sammy dan Vincent, 2008; Nur'ainy et al, 2013).

2. Komposisi anggota dewan komisaris (*Board Compotition)*

Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-21/MBU/2012 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Keuangan BUMN mengenai pengertian dewan komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan persero. Menurut penjelasan pasal 120 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 mengenai Pengertian dari Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah "komisaris dari pihak luar". Status independen terfokus kepada tanggung jawab untuk melindungi pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau melakukan tindak kejahatan pasar modal

3. Pengawasan Komite Audit

Keberadaan komite audit pada perusahaan publik di Indonesia diatur berdasarkan SK Bapepam LK No. Kep. 29/PM/2004, yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. SK tersebut sudah diubah menjadi Peraturan Nomor IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Per 1 Januari 2013, regulator yang menerbitkan peraturan bagi perusahaan publik bukan lagi Bapepam-LK tapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan tersebut antara lain mencakup struktur, keanggotaan, tugas, dan tanggung jawab komite audit. Komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.

Ketua komite audit adalah komisaris independen. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

2.3.1.2.Mekanisme monitoring oleh DPS

Mekanisme tugas DPS dalam melaksanakan tugas pengawasan bank terdiri dari :

1. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan setiap produk baru yang dikeluarkan oleh Bank dengan menggunakan kertas kerja yang telah ditetapkan;
2. Melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan Bank dengan menggunakan kertas kerja yang telah ditetapkan; dan
3. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan DPS yang memuat hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama 1 (satu) semester kepada Bank Indonesia paling lambat 2 bulan setelah periode semester berakhir.

Penerapan mekanisme *corporate governance* yang baik dapat tercermin dari terlaksananya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS dilihat dari laporan *self assessment* pelaksanaan *corporate governance* dan dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah.

Implementasi pengawasan dalam perbankan syariah yaitu (1) Pengawasan Rasulluloh yang di wujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh umat Islam dan (2) Pengawasan masyarakat dapat diwujudkan secara langsung atau melalui aturan-aturan yang mengatur dan membatasi. Pengawasan implementasi syariah bersifat tegas dan teliti meliputi

berbagai alur operasional lembaga keuangan baik dari sisi pengumpulan dana, penyaluran dana, investasi maupun kegiatan jasa lainnya. Hal tersebut dilakukan agar terjaminnya pelaksanaan *corporate governance* di perbankan syariah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Fungsi dan Peran DPS di bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen resiko perbankan syariah, yakni resiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada tingkat profitabilitas perusahaan. Pelanggaran *shariah compliance* yang dibiarkan DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah yang bersangkutan. Untuk itulah peran DPS di bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan di bank syariah tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, menyebutkan:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai DPS.
2. DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI.
3. DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan undang-undang tersebut, diamanatkan bahwa setiap perusahaan badan hukum yang menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah wajib mempunyai DPS.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan:

1. DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS;

2. DPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI;
3. DPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah; dan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

DPS mempunyai peranan yang sangat penting dalam perbankan/institusi keuangan syariah yaitu:

1. Membuat persetujuan garis panduan operasional produk perbankan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disusun oleh DSN.
2. Membuat pernyataan secara berkala pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (*annual report*) institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat dengan jelas.
3. DPS wajib membuat laporan tentang perkembangan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah khususnya bank syariah yang berada dalam pengawasannya, sekurang-kurangnnya enam bulan sekali. Laporan tersebut diberikan kepada Bank Indonesia yang berada di ibu kota provinsi dan atau Bank Indonesia di ibu kota negara.
4. DPS juga berkewajiban meneliti dan membuat rekomendasi jika ada inovasi produk-produk baru dari bank yang diawasinya. Dewan inilah yang melakukan pengkajian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah tersebut diusulkan, diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN.
5. Membantu sosialisasi perbankan / institusi keuangan syariah kepada masyarakat.

6. Memberikan masukan (*input*) bagi pengembangan dan kemajuan institusi keuangan syariah.

Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, maka seorang DPS mesti memenuhi kualifikasi tertentu. Artinya, untuk menjadi DPS tidak sembarang orang, DPS tidak cukup hanya mengerti ilmu keuangan dan perbankan namun juga menguasai ilmu agama dan fiqih. Pedoman pengawasan DPS di Bank Syariah mencakup aspek kepatuhan syariah baik dalam operasional maupun produk Bank Syariah. Pedoman Pengawasan Syariah ini mengacu pada:

1. Undang-undang Perbankan.
2. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.
3. Pedoman yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.
4. Prinsip-prinsip Syariah dalam *Operating Procedures of the Shariah Board* yang terdapat dalam *Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang merupakan *Guiding Principles On Shariah Governance System for Institutions Offering Islamic Financial Service.*
5. Pedoman umum dalam *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution* yang dikeluarkan oleh AAOFI.
6. Pedoman pengawasan dan pemeriksaan Bank Syariah yang diterapkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (Dpbs-BI).
7. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi perbankan syariah oleh IAI.
8. Panduan Audit Bank Syariah yang dikeluarkan oleh IAI.
9. Ketentuan umum yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan Undang-undang yang berlaku secara umum.

Mekanisme monitoring Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan untuk mengurangi masalah keagenan di Bank Syariah. Masalah keagenan perbankan berkait dengan pemisahan kepemilikan dengan pengendalian yang timbul karena pemilik tidak dapat mengawasai kegiatan perusahaan dan menyerahkan ke pengelola (manajer). Keadaan tersebut menimbulkan masalah *principal-agent* berupa konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer sebagai akibat perbedaan motif dan kepentingan di antara kedua pihak. Masalah keagenan di Bank Syariah terkait pada produk perbankan Syariah yaitu antara lain pada produk *profit loss sharing* dan *mudarabah* dimana peran DPS sangat di perlukan dalam memeriksa akad produk tersebut. Dalam *Agency Theory* menekankan pada penyelesaian masalah yang terjadi akibat hubungan kontraktual antara agent dan principal. Kontrak yang dibuat harus lengkap sehingga mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, namun pada kenyataannya untuk membuat kontrak yang lengkap membutuhkan biaya (*transaction cost*) yang mahal sehingga kebanyakan yang terjadi adalah munculnya kontrak yang tidak lengkap (*incomplete contract*).

2.3.1.3.Mekanisme Bonding

a. Struktur Hutang

Menurut Jensen dan Meckling (1993) mekanisme *bonding* melalui kebijakan dividen, struktur kepemilikan, dan struktur hutang dapat digunakan untuk mengurangi *agency costs* yang timbul dari masalah keagenan (*agency conflict*). Penggunaan hutang diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan. Penambahan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi penggunaan saham sehingga mengurangi biaya keagenan. Ketika berhutang, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayar beban bunga secara periodik. Kondisi ini menyebabkan manajer harus bekerja keras untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan cara meningkatkan laba. Namun, sebagai konsekuensi dari kebijakan ini,

perusahaan menghadapi biaya keagenan hutang dan risiko kebangkrutan (Purnomosidi, et al. 2014). Hal ini juga didukung oleh hasil Tertius dan Christiawan (2015) keberadaan kreditur dalam struktur modal merupakan salah satu alternatif mengurangi konflik keagenan. Keberadaan kreditur akan meningkatkan pengawasan dan membatasi ruang gerak manajemen. Keberadaan utang akan memaksa manajemen membatasi terjadinya *perks*, *perquisites*, dan menjalankan perusahaan dengan lebih efisien karena adanya kemungkinan terjadi *financial distress* serta kehilangan kendali dan reputasi**.** Lebih jauh dikatakan bahwa masalah agensi antara pemegang saham dan manajer tidak dapat diselesaikan hanya melalui kontrak berdasarkan aliran kas dan pengeksternalan investasi saja, tetapi dapat dikurangi dengan penerbitan hutang. Hutang digunakan sebagai alat pendisiplinan manajer agar bekerja lebih keras untuk membayar kembali hutang dan bunganya.

b. Deviden

Mekanisme bonding lainnya yaitu kebijakan dividen dapat digunakan sebagai pengurang masalah agensi antara manajer dan pemegang saham (Jensen dan Meckling 1993)**.** Pembayaran dividen dapat mengurangi *discretionary funds* yang tersedia bagi manajer, yang dapat digunakan untuk pengeluaran *perks, perquisite,* sehingga membantu mengatasi konflik antara manajer dan pemegang saham (Jensen dan Meckling 1993)**.** Dengan menggunakan teori *signaling*, Harris dan Raviv (1991) menemukan hubungan antara *growth opportunities* dan kebijakan dividen. Hasil empiris menunjukkan perusahaan dengan *high quality* dipercaya mempunyai komitmen memberikan dividen yang tinggi sebagai sinyal kepada pasar. Perusahaan yang memberikan dividen tinggi bertujuan untuk mengurangi kesenjangan informasi antara manajer dan investor, dan dividen tinggi dianggap berhubungan dengan kesempatan investasi yang tinggi. Jensen dan Meckling (1993) juga memberikan penjelasan bahwa dividen merupakan *incentive roles* dipandang dari sudut *contracting cost*.

2.4. Teori *Corporate Governance*

Konsep *Corporate Governance* yang dihubungkan dengan kerangka teoritis memunculkan teori *Corporate Governance* dengan perspektif *shareholding* dan perspektif *stakeholding* (Lukviarman 2016). Dalam berbagai penelitian mengenai *Corporate Governance* pendekatan yang sering digunakan adalah perspektif *stakeholding* dengan implikasi bahwa manajemen harus mempertimbangkan beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan kepentingan yang berbeda dalam membuat keputusan bisnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perspektif *stakeholding* dengan menggunakan teori yaitu *Agency Theory*, *Stakeholder Theory* dan *Resource Dependence Theory*. Adapun penjelasan dari masing-masing teori adalah sebagai berikut:

2.4.1 *Agency Theory*

Agency Theory (teori keagenan) mengalami perkembangan sejak pemikiran yang dilakukan oleh Berle dan Means (1934) tentang adanya pemisahan kepemilikan dalam perusahaan modern. Adanya pemisahan antara pemilik (*investor- shareholder*) dan mereka yang menjalankan perusahaan (*manager*) menimbulkan persoalan yang kemudian disebut persoalan keagenan. Jalan keluar yang termudah untuk menyelesaikan persoalan keagenan adalah membuat kontrak yang merumuskan hak-hak dan kewajiban agen seperti yang dikehendaki oleh prinsipal dan memastikan mekanisme yang memungkinkan prinsipal melakukan monitoring atas tindakan agen.

Dalam konteks ini, sebenarnya Jensen dan Meckling (1976) menginterpretasikan perusahaan sebagai "*the nexus of contracts*" antara *agent* dan *principal.* Jadi sebenarnya bukan hanya berhenti pada kontrak antara prinsipal dan agen seperti yang banyak dipahami dalam kajian keuangan. Memang tidak dapat diingkari bahwa sebuah kajian memiliki keterbatasan ruang lingkup penelitian, tetapi justru kadang-kadang persoalan keagenan sering

muncul dalam kerangka *"the nexus of contract".* Teori keagenan ini kemudian bukan hanya berbicara tentang konflik yang terjadi antara pemilik perusahaan (*shareholders*) dan manajer saja, tetapi juga dengan pemberi pinjaman (*debtholders*). Jadi pemahaman siapakah yang menjadi *principal* dalam kerangka pilihan atas hutang ekuiti dapat dirujukkan pada pemberi pinjaman karena dalam hal ini perusahaan yang diwakili oleh *shareholders* dan juga manajer ada dalam satu sisi yaitu peminjam, yang dalam hal ini berperan sebagai agen. Disini akan terjadi konflik kepentingan atas penggunaan dana antara peminjam (*shareholders dan managers*) dan yang meminjamkan (*debtholders*). Fokus teori keagenan adalah menentukan kontrak yang efisien karena adanya hubungan prinsipal – agen berdasarkan pada asumsi-asumsi yang berhubungan dengan manusia, organisasi dan informasi (Eisenhardt 1989)**.** Dalam kenyataannya informasi yang ada bersifat asimetrik. Fenomena ini menyebabkan terjadinya persoalan *adverse selection* dan *moral hazard* karena dalam situasi informasi yang asimetrik, agen akan mempunyai informasi yang lebih dibandingkan dengan prinsipal sehingga dimungkinkan agen akan mengambil tindakan-tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri (De Jong 2001) **.** Kondisi "*ex ante asymmetric information"* dapat diterangkan melalui model *adverse selection* Akerlof (1970) persoalan asimetrik informasi ini terjadi sebelum kontrak dilakukan. Situasi ini (*adverse selection*) sering dikatakan sebagai situasi dimana ada informasi yang disembunyikan (*hidden information*) oleh agen kepada prinsipal (Sweeting 2000). *"Ex post asymmetric information"* dapat dijelaskan dengan model *moral hazard*. Model *moral hazard* merujuk pada konsekuensi etis atas tindakan pelaku ekonomi dalam usahanya untuk memaksimumkan utilitas nya yang mungkin merugikan pihak lain. Pelaku-pelaku ekonomi ini tidak memperkirakan atau mau mempertimbangkan akibat-akibat yang ditimbulkan dan yang tidak diharapkan atas tindakan mereka. Disini mereka tidak menginginkan atau mau bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka (Hausman dan Mc. Pherson 2000)**.** *Moral hazard* terjadi setelah adanya transaksi. Dalam kasus pilihan

hutang – ekuiti, peminjam dapat melakukan tindakan – tindakan yang mempunyai dampak merugikan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi pemberi pinjaman dimungkinkan menderita kerugian atas tindakan (*immoral*) dari peminjam (Mishkin 1999). *Moral hazard* merujuk pada tindakan yang tersebunyi (*hidden action*) (Sweeting 2000).

Menurut Anderson, Mansi dan Reeb (2003) menegaskan bahwa perusahan yang dikendalikan secara dominan oleh keluarga, dapat mempunyai dampak yang merugikan bagi *debtholders*. Kepemilikan yang terkonsentrasi memungkinkan adanya permasalahan keagenan yang dinamakan *asset substitution* atau persoalan *risk shifting*. Ada beberapa faktor yang dapat menerangkan tentang permasalahan *asset substitution* atau *risk shifting*, misalkan kesempatan pertumbuhan dan nilai aktiva berwujud (Smith dan Watts 1992; Rajan dan Zingales 1998).

Pada negara-negara yang mempunyai kelemahan dalam sisi hukum dan adanya konsentrasi kepemilikan yang tinggi permasalahan *moral hazard* dalam pilihan hutang-ekuiti menjadi lebih besar dibandingkan pada negara yang mempunyai kerangka dan kepatuhan hukum yang memadai.

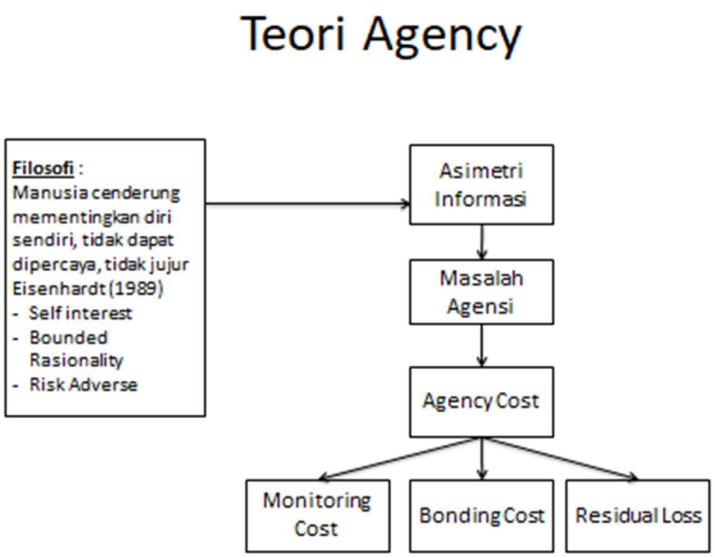
Jensen dan Meckling (1993) mengidentifikasi ada dua cara yaitu investor luar melakukan pengawasan dan manajer sendiri melakukan pembatasan atas tindakan–tindakannya, agar dapat mengurangi kesempatan manajer melakukan tindakan yang merugikan investor luar. Jensen dan Meckling (1993) menyatakan bahwa calon *investor* akan mengantisipasi adanya kedua biaya tersebut ditambah dengan kerugian yang masih muncul meskipun sudah ada *monitoring* dan *bonding,* yang disebut *residual loss*. Ketiga biaya yang didefinisikan sebagai biaya agensi *(agency cost)* yang akan terefleksi dalam harga saham yang terdiskon pada saat perusahaan menjual saham. Menurut Jensen dan Meckling (1993) hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang

pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Bagi Scott (2000) hubungan *principal* dan *agent* dalam teori keagenan merupakan sebuah proksi untuk sejumlah besar investor dan manajer, yang menggambarkan pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian sebagai sebuah model untuk dua individu yang rasional dengan kepentingan yang saling bertentangan. Perkembangan teori *governance* sangat berpengaruh di dalam munculnya berbagai model terapan yang dapat diadopsi oleh berbagai perusahaan. Berbagai perspektif yang berbeda dalam teori pada prinsipnya akan menghasilkan berbagai diagnosa dan solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan penerapan *corporate governance* di dalam prakteknya (Lukviarman dan Johan 2018).

Masalah *agency* dapat dikurangi dengan mekanisme *monitoring*, *bonding*, dan pengaturan struktur kepemilikan.

1. Mekanisme *monitoring* antara lain berupa pembentukan dewan komisaris. Jika anggota dewan komisaris didominasi oleh anggota dari luar maka diharapkan *monitoring* akan efektif (Weisbach, 2003; Shleifer dan Vishny, 1997).
2. *Bonding* dilakukan dengan mengurangi dana *free cash flow* (kelebihan dana yang ada di perusahaan setelah semua proyek investasi yang menghasilkan NPV positif dilaksanakan, caranya bisa meningkatkan hutang (mengurangi konflik investor dari luar dan manajemen) (Hilman dan Dalziel 2003). Penelitian struktur modal dan meningkatkan deviden (memungkinkan perusahaan mengambil dana dari luar bukan dari dana internal) sehingga *monitoring* investor yg baru meningkat (Hussainey dan Aljifri 2012).
3. Pengaturan struktur kepemilikan menurut (Jensen dan Meckling 1993; Demsetz dan Lehn 1985; Lukviarman dan Johan 2018) bahwa kepemilikan manajerial akan memaksimumkan utilitasnya tanpa takut ada pengawasan dari dewan komisaris ataupun investor baru.

Gambar 2.5
Teori Agency



2.4.2. *Stakeholder Theory*

Perdebatan di dalam literatur seputar *stakeholders* dan *shareholders* dilihat dari perspektif organisasi masih tetap menjadi topik hangat. Teori agensi memandang perusahaan dari konteks bahwa manajer harus memberikan kontribusi kepada *shareholders.* Sedangkan *stakeholder theory* memberikan argumentasi bahwa manajer perusahaan memiliki sejumlah keterkaitan dengan para pemangku kepentingan *(stakeholders)* yang harus dilayani (Freeman 1984). Sebagai penggagas utama *stakeholder theory* mengidentifikasi bahwa munculnya kelompok *stakeholder* sebagai elemen penting dalam pertimbangan organisasi.

Stakeholder theory bersifat manajerial karena mencerminkan dan menunjukkan bagaimana para manajer bekerja bukan mengulas teori manajemen dan ekonomi. *Stakeholder Theory* berfokus pada 2 (dua) pertanyaan inti (Freeman 1984)**:**

1. Apa tujuan perusahaan?

Dalam hal ini dukungan diberikan kepada manajer untuk menyampaikan nilai (aspirasi) yang mereka ciptakan dan apa yang dapat diberikan kepada *stakeholders.* Juga mendorong perusahaan untuk lebih maju dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik ditentukan baik oleh tujuan perusahaan maupun ukuran keuangan di pasar.

2. Apa kewajiban dari manajemen kepada *stakeholders*?

Menekankan bagaimana manajer menjalankan *business* khususnya bagaimana jenis hubungan yang mereka inginkan dan perlukan dengan *stakeholder* untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Freeman (1984) menyatakan bahwa kenyataan ekonomi saat ini menekankan pada dasar realitas yang disarankan yaitu pada inti dari *stakeholders theory*. ”Nilai saat ini adalah nilai ekonomis yang diciptakan oleh orang-orang dengan sukarela bersatu bekerja sama untuk memperbaiki keadaan tiap-tiap orang tersebut”. Para manajer harus membangun hubungan yang baik, mengilhami para *stakeholders* dan menciptakan komunitas dimana setiap orang berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam memenuhi nilai-nilai yang dijanjikan perusahaan. Pemegang saham tentunya adalah unsur pokok yang penting dan hal penting lainnya adalah laba, tetapi laba merupakan hasil bukan penyebab dalam proses pembentukan nilai.

Dalam kaitannya dengan tata kelola perusahaan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan menganut pendekatan *stakeholders*, karena tata kelola perusahaan memandang keterkaitan perusahaan secara luas, baik *shareholders*, kreditur, karyawan, pelanggan, pemerintah, pemasok, dan berbagai pihak yang berkepentingan.

2.4.3. *Resource Dependence Theory*

Resource Dependence Theory pertama kali di pelopori oleh Emerson (1962). Ia mengidentifikasi pembahasan teori ini dalam hubungan kausalitas antara konsep kekuasaaan dengan konsep ketergantungan yang menggunakan asumsi bahwa A dan B dimana pengaruh

A terhadap B didasarkan pada ketergantungan terhadap sumber daya. Organisasi mempunyai kekuasaan yang berkaitan dengan lingkungan tugasnya sejauh organisasi tersebut mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan unsur tersebut dan sejauh organisasi memonopoli kemampuan tersebut. Adanya kemungkinan bahwa bertambahnya ketergantungan dapat dilihat dari hubungan A dan B menghasilkan bertambahnya nilai *(value added)*. Diperkuat oleh Pfeffer dan Salancik (1978) dalam hubungan inter-organisasional. Argumennya adalah bahwa fenomena inter-organisasional akan mengatur secara keseluruhan berbagai tingkatan hasil performasi organisasi. Fokus teori ini lebih pada kontribusi sumber daya manusia terhadap strategi perusahaan, bagaimana strukur organisasi tergantung terhadap sifat alami dan keterbatasan (*scarcity)* dari setiap sumber daya yang dibutuhkan organisasi tersebut untuk melaksanakan akivtias operasionalnya. *Resource Dependence Theory* ini lebih memberikan penekanan pada peranan *(the role)* dari manajemen dalam menegosiasikan ketergantungan *(the dependencies)* yang diakibatkan oleh kebutuhan sumber daya organisasi.

2.5. *Corporate Governance* dan Kinerja Bank Syariah

Nur'ainy et al (2013) menemukan bahwa perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang buruk. Hal ini didukung oleh (Jensen dan Meckling 1993)**.** Mereka menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang baik benar-benar membantu pemilik untuk melakukan kontrol atas urusan perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan telah memberikan posisi yang kuat kepada pemilik untuk mengelola orang dalam perusahaan dan manajer. Kinerja keuangan merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam mencapai tujuan utama perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh laba, meningkatkan penjualan serta kesejahteraan pemilik dan pemegang saham. Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah

dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola *asset* perusahaan secara efektif selama periode tertentu.

Penilaian kinerja perusahaan sangat penting bagi investor maupun bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Bagi pihak investor, kondisi kinerja keuangan merupakan faktor penting sebelum melakukan investasi. Jika kondisi keuangan baik maka harga saham akan meningkat sehingga investor akan tertarik melakukan investasi. Bagi perusahaan kinerja keuangan digunakan manajemen untuk melakukan penilaian secara periodik mengenai operasional suatu perusahaan berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut seperti informasi kinerja perusahaan berupa penyajian laporan keuangan tahunan yang telah di publikasikan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi informasi yang menggambarkan tentang kinerja posisi keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu laporan keuangan perusahaan merupakan pertanggungjawaban kinerja manajemen sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi maupun alat ukur kinerja perusahaan untuk kelangsungan dan kesejahteraan perusahaan.

Pengukuran kinerja perbankan tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja Bank Syariah dilakukan untuk perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan Bank Syariah lainnya. Selain itu, pengukuran kinerja Bank Syariah juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Penilaian kinerja Bank Syariah sangat penting untuk setiap *stakeholders* bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank Syariah yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan dapat berkembang sehingga

dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja keuangan Bank Syariah dapat menggunakan rasio keuangan salah satunya adalah rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan *asset* dan mengelola operasinya secara efisien (Aktan, et al. 2018). Rasio Profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk para pemegang saham (pemilik perusahaan), rasio ini menunjukkan tingkat penghasilan mereka dalam investasi. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Return on Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) (Mollah dan Zaman 2015).

ROA digunakan karena dapat memberikan gambaran tingkat pengembalian keuntungan yang dapat diperoleh investor atas investasinya (Khatab et al 2011; Manaseer et al 2012). Selain itu dengan ROA, investor dapat melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk dapat memaksimalkan laba yang juga menjadi tujuan GCG untuk menggunakan aset dengan efisien dan optimal (OECD 2004). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan keseluruhan total aset yang dimiliki (Aktan, et al. 2018). ROA mengukur seberapa efektif perusahaan dapat mengubah pendapatan dari pengembalian investasinya menjadi *asset*.

ROE merupakan pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. ROE dapat dilihat dari laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan. ROE yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi

pemegang saham dan menunjukkan pertumbuhan perusahaan kedepannya. Sehingga dengan ROE yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan juga baik, yang mengakibatkan investor tertarik menanamkan modal. Sebaliknya, jika ROE yang rendah menunjukkan kondisi kinerja keuangan perusahaan yang tidak baik, sehingga investor kurang tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan yang bersangkutan (Khatab et al 2011; Kim, Rasiah dan Tasnim 2013; Mahmood dan Abbas 2013)**.** Agar perusahaan perbankan memiliki kinerja keuangan yang sehat, berkesinambungan dan dapat melindungi kepentingan nasabah maka perlu dikembangkan dengan baik penerapan GCG.

Manfaat penilaian kinerja keuangan adalah (Daniri, 2005):

1. Digunakan untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijakan investor agar dapat meningkatkan efisien dan produktivitas perusahaan.

2.6.Perumusan Hipotesis

2.6.1.Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Penerapan *Corporate Governance*

DPS adalah dewan yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI N0.11/33/PBI/2009). Menurut Musibah dan Alfattani (2017) menyatakan bahwa jumlah DPS yang semakin besar maka mekanisme *monitoring*

manajemen perusahaan akan semakin baik. Dengan demikian semakin besar jumlah anggota DPS maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak terjadi penggunaan dana yang tidak berprinsip syariah yang dapat mengurangi kinerja keuangan, maka kinerja keuangan bank akan meningkat. Perbedaan struktur oragnisasi Bank Umum Syariah (BUS) dan bank konvensional adalah DPS. DPS dapat meningkatkan kepatuhan dengan berdasarkan prinsip syariah. Peran dan tanggung jawab DPS termasuk memberi nasehat *Board of Director* (BOD), memberikan masukan saat terjadi permasalahan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga peran DPS dapat meningkatkan prosedur dan kebijakan yang terkait dengan fatwa yang akan mempengaruhi kepatuhan syariah. Peran DPS sangat kuat dalam mekanisme tata kelola internal di BUS untuk meningkatkan kinerja (Mollah dan Zaman 2015). Hal itu disebabkan bahwa mekanisme operasional dalam BUS berbasis proses Islamisasi, maksudnya adalah BUS beroperasi berdasarkan *profit and loss* dan tidak berdasarkan bunga (riba) seperti bank konvensional. Konsep dasar dari *shariah governance* ditunjukkan dengan *system control* dan arahan dari DPS untuk meningkatkan prinsip syariah sehingga meningkatkan kinerja (Nomran et al 2018). Kerangka *shariah governance* merefleksikan peran DPS dalam aktivitas yang dilakukan Bank Syariah sebagai pengendalian untuk meningkatkan kepatuhan syariah. Beberapa penelitian sebelumnya (Rajan & Zingales 1998; Brickly et al 1994; Williams 2000; Drobetz et al 2003; Byrd & Hickman 1992; Hossain et al 2000; Rosentein & Wyatt 1990; Gemmill & Thomas 2004; Weisbach 1988) menunjukkan hasil berpengaruh positif dengan berdasarkan *Resource Dependence Theory*. Pendekatan *Resource Dependence Theory* memiliki fokus kepada bagian dari strukur organisasi yang memiliki peran sebagai SDM yang dibutuhkan organisasi tersebut dalam melaksanakan aktivitas operasional organisasi. Penelitian lainnya menguji hubungan ukuran DPS, tingkat pendidikan DPS dan keahlian DPS (Mollah dan Zaman 2015) dan hasilnya berpengaruh positif .

H1: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kualitas Penerapan *Corporate Governance*

2.6.2. Pengaruh Kualitas Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah

Dalam laporan pelaksanaan *corporate governance* sesuai Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33 /PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah terdapat 11 komponen yang terdiri dari (1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris; (2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi; (3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite; (4) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS; (5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa; (6) Penanganan Benturan Kepentingan; (7) Penerapan Fungsi Audit Intern; (8) Penerapan Fungsi Kepatuhan; (9) Penerapan Fungsi Audit Eksternal; (10) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan; dan (11) Batas Maksimum Penyaluran Dana. Masing-masing item terdiri dari beberapa faktor kemudian masing-masing faktor dilakukan pemeringkatan sesuai dengan kondisi pelaksanaan *corporate governance*. Nilai komposit mempunyai lima kategori peringkat mulai dari tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Beberapa peneliti memproksikan *corporate governance* berbeda-beda. Jiang dan Peng (2011) menggunakan *Gov-Score* yang terdiri dari 51 konstruk, Larcker, Richardson dan Tuna (2007) dengan 14 ukuran *corporate governance*, Jiang, Lee dan Anandarajan (2008) dengan indeks Gomper yang terdiri dari 24 komponen *corporate governance* dan Alali, Anandarajan dan Jiang (2012) dengan menggunakan Gov-Score. Penelitian di Indonesia antara lain Nur'ainy et al (2013) di perbankan syariah menunjukkan penerapan *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Penelitian Laela (2012) menyatakan bahwa penerapan *corporate governance* berpengaruh positif terhadap ROE dan juga diperkuat oleh Aktan et al (2018)

yang melakukan pengujian secara komprehensif tentang penerapan *corporate governance* terhadap ROA. Hasilnya mengungkapkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *retun on asset* (ROA). Penelitian Triyono (2012) menunjukkan hasil yang signifikan positif bahwa kualitas penerapan *corporate governance* yang diukur dengan skor dari *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) berpengaruh tehadap kinerja yang diproksikan degnan ROA dan ROE. Namun penelitian Syam dan Nadja (2012) menyatakan bahwa kualitas penerapan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian yang diukur dengan ROA pada bank umum syariah. Teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan tersebut adalah *Stakeholder Theory*. Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Kualitas Penerapan *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah

2.6.3. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah

Beberapa penelitian terdahulu diantaranya yang dilakukan oleh Gil dan Marthur (2011) telah membuktikan bahwa dengan meningkatkan praktik *governance* dalam perusahaan maka meningkatkan kinerja perusahaan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hussainey dan Aljifri (2012), yang menemukan bukti dalam penelitiannya bahwa perusahaan dengan tingkat *corporate governance* yang tinggi dapat menghasilkan kinerja yang baik. Haji dan Mubaraq (2015) juga menyatakan bahwa ada tingkat yang tinggi antara indikator mekanisme *corporate governance* dengan kinerja dan *market valuation*. Dengan kata lain dengan diterapkannya mekanisme *corporate governance* dalam suatu perusahaan akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Hasil-hasil penelitian tersebut secara empiris dapat menjelaskan bahwa *corporate governance* yang diukur secara berbeda-beda sama-sama berpengaruh positif

terhadap kinerja perusahaan. Secara teoritis Jaffar dan Abdul Shukor (2016) menegaskan bahwa dewan direktur merupakan indikator mekanisme *governance* yang penting, karena dewan direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan dewan.

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan (Aktan, et al. 2018)**.** Investor melakukan penanaman modal salah satunya dengan melihat rasio profitabilitas .Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). ROA digunakan karena dapat memberikan gambaran tingkat pengembalian keuntungan yang dapat diperoleh investor atas investasinya (Aktan, et al. 2018)**.** Selain itu dengan ROA, investor dapat melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk dapat memaksimalkan laba yang juga menjadi tujuan GCG untuk menggunakan aset dengan efisien dan optimal (OECD 2004). Sedangkan ROE merupakan pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan didalam perusahaan (Manaseer, et al. 2012)**.** ROE dapat dilihat dari laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan. ROE yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham dan menunjukkan pertumbuhan perusahaan kedepannya. Sehingga dengan ROE yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan juga baik, yang mengakibatkan investor tertarik menanamkan modal. Sebaliknya, jika ROE yang rendah menunjukkan kondisi kinerja keuangan perusahaan yang tidak baik, sehingga investor kurang tertarik untuk menanamkan modal pada perusahaan yang bersangkutan. Hubungan mekanisme *corporate governance* dan kinerja bank syariah dapat dijelaskan dengan menggunakan *agency theory.*

H3: Mekanisme *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah

2.6.4. Mediasi Kualitas Penerapan *Corporate Governance* terhadap Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah

Beberapa artikel menjelaskan peran dewan syariah sangat penting dalam mekanisme *corporate governance* perspektif Islam. Peran dewan syariah yang lebih baik akan meningkatkan kinerja. Hubungan dewan syariah dan *stakeholder* merupakan hubungan antara *principal-agent* dalam teori agensi. Chapra dan Ahmed (2002) melakukan pemetaan terhadap komponen *corporate governance* dalam lembaga keuangan syariah menjadi 4 kelompok yaitu (1) lingkungan yang meliputi sistem ekonomi, keuangan dan hukum secara keseluruhan, pemerintah (hukum dan regulasi untuk lembaga keuangan syariah dan sistem akuntansi); (2) institusi publik yang meliputi pengawas dan asosiasi perbankan; (3) perusahaan yang meliputi pemegang saham, dewan direksi, manajemen senior, audit internal, karyawan dan DPS; dan (4) lainnya yang meliputi deposan, auditor eksternal dan auditor syariah. Menurut Mollah dan Zaman (2015) terdapat pemain kunci yang khas dalam pelaksanaan GCG dalam rangka pemenuhan prinsip syariah, yaitu DPS.

Menurut Nomran, Haron dan Hassan (2018) yang menyatakan bahwa kerangka *corporate governance* ada enam yaitu (1) pengawasan; (2) akuntabilitas dan tanggung jawab dewan; (3) kemandirian; (4) kompetensi; (5) kerahasiaan; dan (6) konsistensi dan kepatuhan. Mekanisme *corporate governance* syariah ada tiga yaitu (1) manajer syariah; (2) dewan syariah; dan (3) komite syariah. (Owolabi dan Dada, 2011; Sulaiman dan Joriah, 2013) menyatakan peran dewan syariah sangat penting karena diharapkan peran dewan syariah dapat digunakan sebagai dimensi religius untuk membantu menawarkan produk syariah bagi nasabah.

Dari sisi regulasi eksternal, yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah keterikatannya dengan *Islamic Accounting Standard Board* (di Indonesia: Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) melalui PSAK syariahnya). Dari sisi

sistem regulasi internal, dalam bank syariah terdapat DPS. DPS ini merupakan lembaga independen yang kompeten dibidang hukum Islam dan atau ahli Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bertugas mengarahkan, *mereview*, melakukan supervisi aktivitas LKS dan memastikan LKS taat pada hukum Islam (Ramli dan Ramli 2016)**.** Dari sisi sistem pengendalian internal, bank syariah berbeda dengan konvensional dalam hal kewajibannya untuk patuh terhadap hukum Islam. Dalam perbankan syariah jumlah dewan syariah mempengaruhi kualitas penerapan GCG yang terdapat dalam komponen laporan *self assessment* pelaksanaan *corporate governance* yaitu melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah (DPS) dan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa. Hal itu sesuai Peraturan Bank Indonesia PBI N0. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dan terdapat enam poin penting yang mengatur DPS yaitu (1) Persyaratan DPS; (2) Tugas dan tanggung jawab DPS; (3) Rapat DPS; (4) Transparansi; (5) Sanksi; dan (6) Laporan Hasil Pengawasan Syariah.

Dalam struktur *corporate governance* perbankan syariah memiliki *double board* yaitu *board of director* (dewan direksi/komisaris) dan *sharia supervisory board* (SSB) dalam konteks di Indonesia disebut DPS. Adanya *double board* ini secara teori akan meningkatkan proses monitoring terhadap tindakan manajer sehingga pelaksanaan *corporate governance* di perbankan syariah lebih kuat. DPS harus memiliki integritas dan pemahaman yang lebih terhadap persoalan perbankan. DPS harus memahami segala permasalahan di lapangan, apakah produk perbankan yang dihasilkan punya nilai jual di pasar, apakah produk tersebut diaplikasikan secara benar oleh petugas dan banyak lagi hal lainnya yang menjadi perhatian khusus DPS. Sehingga dengan kondisi tersebut DPS diharapkan dapat mengawasi secara langsung dan melihat bagaimana penerapan prinsip syariah di lapangan. Apabila DPS menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar operasional produk maka

diasumsikan dapat meningkatkan kualitas penerapan *corporate governance* sehingga akan terjadi peningkatan kinerja perbankan syariah. Hubungan ini bisa dijelaskan dengan *Resource Dependence Theory* dan *Agency Theory.* Berdasarkan argumen tersebut maka hipoetesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Kualitas Penerapan *Corporate Governance* memediasi Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah

2.6.5. Mediasi Kualitas Penerapan *Corporate Governance* terhadap pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah

Pada bank syariah, tujuan CG lebih dikhususkan untuk memastikan *fairness* ke semua *stakeholder* (Choudhury dan Hoque 2006)**.** Hal ini dicapai melalui transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik (Choudhury dan Hoque 2013). Dalam konteks lembaga keuangan syariah, CG seharusnya meliputi: (1) pengaturan organisasi yang mana tindakan manajer sejalan (*align*) dengan kepentingan *stakeholder;* (2) organ *governance* (yang meliputi dewan direksi, dewan pengawas syariah, manajemen) memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* dan menfasilitasi proses monitoring yang efektif sehingga penggunaan sumber daya dapat efisien; dan (3) patuh pada aturan dan prinsip hukum Islam (IFSB 2009).

Menurut Syam dan Nadja (2012) mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok. Pertama yaitu *internal mechanisms* (mekanisme internal), seperti komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif. Yang kedua adalah *external mechanisms* (mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh pasar dan *level debt financing*. Kedua mekanisme *corporate governance* ini diharapkan dapat memastikan tindakan pihak manajemen untuk bertindak bagi kepentingan *shareholders* terutama pemegang saham minoritas (Chugh, Meador dan Kumar 2011)**.**

Sedangkan menurut Hussainey dan Aljifri (2012) mekanisme *corporate governance* dapat berupa mekanisme internal yaitu: struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris, kompensasi eksekutif, struktur bisnis multi divisi, dan mekanisme eksternal yaitu; pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional, dan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal. Mekanisme *Corporate* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan direksi dan komposisi komisaris independen sebagai mekanisme internal sedangkan auditor internal dan auditor eksternal merupakan mekanisme eksternal. Dengan mekanisme *corporate governance* yang baik diharapkan akan meningkatkan kualitas penerapan *corporate governance* yang tercermin dalam laporan pelaksanaan *corporate governance* berupa hasil *self assessment* 11 item yang terdiri dari (1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris; (2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi; (3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite; (4) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS; (5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa; (6) Penanganan Benturan Kepentingan; (7) Penerapan Fungsi Audit Intern; (8) Penerapan Fungsi Kepatuhan; (9) Penerapan Fungsi Audit Eksternal; (10) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan; dan (11) Batas Maksimum Penyaluran Dana. Hasil laporan *self assesment* ini akan keluar peringkat pelaksanaan *corporate governance* mulai dari peringkat "tidak baik" sampai "sangat baik". Laporan pelaksanaan *corporate governance* ini dapat menjadi bagian dari Laporan Keuangan Tahunan maupun Laporan pelaksanaan *corporate governance* secara terpisah. Dengan adanya mekanisme *corporate governance* yang baik yang terdiri dari dewan komisaris, komisaris independen dan auditor internal serta eksternal maka diasumsikan akan meningkatkan kualitas penerapan *corporate governance* melalui peringkat nilai komposit dari laporan pelaksanaan *corporate governance*. Efek mediasi dari kualitas penerapan Corporate Governance terhadap hubungan mekanisme *corporate governance* dan kinerja bank syariah dapat dijelaskan dengan *agency*

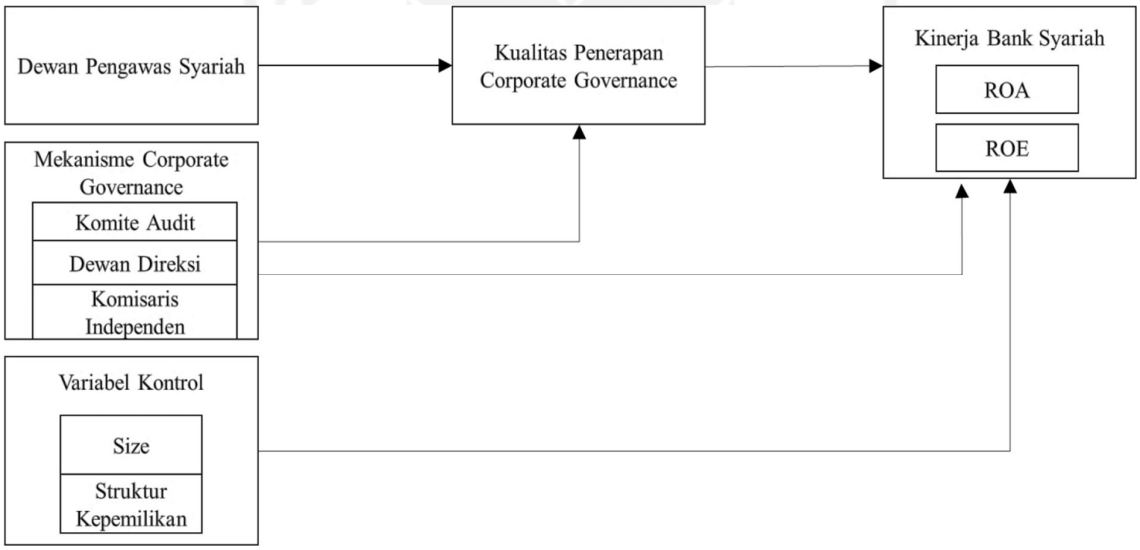
theory dan *stakeholder theory***.** Dari penjelasan tersebut maka hipotesis ke lima adalah sebagai berikut:

H5: Kualitas Penerapan *Corporate Governance* memediasi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah

2.7. Model Penelitian

Model penelitian merupakan skema kerangka pemikiran teoritis yang menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Berdasarkan gambar menjelaskan pengaruh variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS), Mekanisme *Corporate Governance* (MCG) terhadap Kualitas Penerapan *Corporate Governance* (QCG) dalam peningkatan kinerja Bank Syariah dengan variabel control yaitu ukuran perusahaan (*size*) dan struktur kepemilikan (OWN).

Gambar 2.6
Model Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia pada periode tahun 2010-2017 dan telah mempublikasikan laporan keuangannya di situs daring Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun alasan pemilihan tahun penelitian karena diasumsikan penerapan *corporate governance* sudah banyak dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2010 dan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang laporan *self assesment* dalam laporan pelaksanaan *corporate governance* untuk perbankan. Hal ini dapat dilihat melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah antara lain :

1. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 tentang penyelenggaraaan *good corporate governance* (GCG). Juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN (pasal 5 dan 6) yang mengharuskan komisaris dan direksi BUMN untuk menegakkan berbagai prinsip *governance*. Selain itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 3 ayat 1) menyebutkan bahwa keuangan negara harus dikelola secara *good governance*.
2. Aturan dari MUI mengenai Dewan Syariah Nasional (DSN) yang diatur dalam Surat Keputusan DSN MUI No. 1/2000 dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diatur dalam SK DSN MUI No.3/ 2000.
3. Berdasarkan aturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai peraturan bank Indonesia PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Perbankan syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah yang memenuhi kriteria sbb:

1. Perbankan syariah masuk dalam situs daring Bank Indonesia dan OJK dalam periode 2010-2017.
2. Perbankan syariah yang mempunyai laporan keuangan periode 31 Desember 2010-2017 secara lengkap sesuai data yang dibutuhkan peneliti.
3. Perbankan syariah yang mempunyai laporan pelaksanaan GCG.
4. Laporan keuangan perbankan syariah yang sudah menerapkan pencatatan atau akuntansi Islam (akuntansi syariah) sesuai dengan PSAK no. 103,104,105,106.

Tabel 3.1 menunjukkan jumlah Bank Syariah selama periode 2010-2017 sebesar 12 terdiri dari Bank Muamalat Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Maybank Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

Tabel 3.1
Daftar Bank Syariah Periode 2010-2017

NO	NAMA BANK
1	Bank Muamalat Indonesia
2	Bank BCA Syariah
3	Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah)
4	Bank BNI Syariah
5	Bank BRI Syariah
6	Bank Bukopin Syariah
7	Bank Mandiri Syariah
8	Bank Maybank Syariah
9	Bank Mega Syariah
10	Bank Panin Syariah
11	Bank Victoria Syariah
12	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sumber: data sekunder yang diolah (2018)

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari data Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan *Corporate Governance* yang diperoleh dari web site masing-masing Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2010-2017. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *metode purposive sampling* dengan menggunakan kriteria bahwa Bank Syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah yang mempunyai data laporan keuangan tahunan (*annual report*) lengkap berdasarkan variabel yang diteliti dan terdaftar secara berturut-turut selama periode penelitian tahun 2010-2017. Sampel dalam penelitian yang memenuhi kriteria adalah 9 Bank Syariah yaitu : Bank Muamalat Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah dan Bank Victoria. Periode penelitian ini 8 tahun yaitu dari tahun 2010-2017 dengan menggunakan metode *pooling data* maka jumlah data yang diteliti adalah 72. Berikut adalah daftar proses pemilihan sampel :

Tabel 3.2

Proses Pemilihan Sampel

Jumlah Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan OJK selama tahun 2010-2017	12
Bank Syariah yang tidak memenuhi kriteria sampel	3
Total Bank Syariah	9
Jumlah Data yang diteliti (jumlah total x periode penelitian)	72

Sumber : data sekunder yang diolah (2018)

3.3. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

3.3.1. Variabel Dependen

1. Kinerja Bank Syariah

Kinerja Bank Syariah diukur dengan menggunakan pengukuran kinerja keuangan yaitu rasio profitabilitas. Kinerja perusahaan (*corporate performance*) adalah suatu bentuk konstruksi multidimensional yang sangat kompleks, tergantung pada siapa yang sedang mengevaluasi, bagaimana dievaluasinya, aspek apa yang dievaluasi (Aktan, et al. 2018)**.** Rasio profitabilitas diukur dengan *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya variabel dependen yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan menggunakan proksi *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) (Musibah dan Alfattani 2014; Grassa dan Matoussi 2014; Mollah dan Zaman 2015; Nomran, Haron dan Hassan 2018) . Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

a. $ROA = \frac{Laba\ setelah\ pajak}{total\ aset} x100\%$

Penilaian terhadap ROA mempunyai kriteria sebagai berikut:
Kriteria sangat baik (SB) = ROA >1,5%
Kriteria Baik (B) =1,25%< ROA≤1,5%
Kriteria Cukup Baik (CB) = 0,5% < ROA ≤1,25%
Kriteria Kurang Baik (KB) = 0 < ROA ≤ 0,5%
Kriteria Tidak Baik (TB) = ROA ≤ 0%

b. $ROE = \frac{Laba\ setelah\ pajak}{equity} x100\%$

Penilaian terhadap ROE mempunyai kriteria sebagai berikut:
Kriteria sangat baik (SB) = ROE >15%
Kriteria Baik (B) =12,5%< ROE≤15%
Kriteria Cukup Baik (CB) = 5% < ROE ≤12,5%

Kriteria Kurang Baik (KB) = 0 < ROE ≤ 5%
Kriteria Tidak Baik (TB) = ROE ≤ 0%

3.3.2. Varibel Independen

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

   DPS adalah bagian dari struktur organisasi yang bertugas mengawasi, membuat laporan, dan rekomendasi mengenai pemenuhan prinsip Syariah dalam proses transaksi di Bank Syariah. Pengukuran variabel DPS menggunakan pedoman dari *Operating Procedures of the Shariah Board yang terdapat dalam Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang merupakan *Guiding Principles On Shariah Governance System for Institutions Offering Islamic Financial Service.* Pengukuran tersebut dibagi menjadi lima indikator yaitu:

   1. Independensi terdiri dari empat butir pertanyaan yaitu : (1) Apakah DPS merangkap jabatan hanya 2 (dua) BUS lainnya sebagai Ketua DPS? (2) Apakah DPS merangkap jabatan di lebih dari 2 (dua) BUS lainnya sebagai Ketua DPS? (3) Apakah DPS merangkap jabatan hanya 2 (dua) BUS lainnya sebagai anggota DPS? (4) Apakah DPS merangkap jabatan di lebih dari 2 (dua) BUS lainnya sebagai anggota DPS?
   2. Kompetensi terdiri dari empat butir pertanyaan yaitu (1) Apakah DPS memiliki kompetensi pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah Muamalah? (2) Apakah DPS memiliki kompetensi pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan dan atau keuangan? (3) Apakah DPS memiliki kompetensi pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan juga di bidang perbankan dan atau keuangan? (4) Apakah DPS mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan syariah dan *fiqh al-muamalat*?

3. Komunikasi terdiri dari empat butir pertanyaan yaitu (1) Apakah frekuensi rapat DPS minimal 2 kali dalam setahun? (2) Apakah tingkat kehadiran rapat memenuhi quorum *(quorum for meeting)*? (3) Apakah tingkat kehadiran (% presensi) Ketua DPS dalam rapat DPS sebesar 50-80%? (4) Apakah tingkat kehadiran (% presensi) Anggota DPS dalam rapat DPS sebesar 50-80%?
4. Komposisi terdiri dari dua butir pertanyaan yaitu (1) Apakah komposisi DPS terdiri dari 2 (dua) orang (1 orang ketua dan 1 orang anggota) ? (2) Apakah komposisi DPS lebih dari 2 (dua) orang?
5. Performa terdiri dari empat butir pertanyaan yaitu (1) Apakah ada sanksi terkait tindakan yang menyimpang dari tugas DPS? (2) Apakah ada pelaporan dari DPS yang terkait dalam pemenuhan tingkat kepatuhan syariah? (3) Apakah ada pelaporan dari DPS yang terkait dengan desain dan pengembangan produk syariah? (4) Apakah ada pelaporan dari DPS yang terkait pengajuan produk baru yang belum memenuhi tingkat kepatuhan syariah?

   Skala pengukuran menggunakan variabel *dummy* yaitu nilai 1 (satu) untuk jawaban "Ya" dan nilai 0 (nol) untuk jawaban "Tidak".

2. Variabel Mekanisme *Corporate Governance*

   Mekanisme *Corporate Governance* adalah sebagai suatu prosedur yang digunakan untuk mengawasi jalannya sistem *governance* dalam sebuah perusahaan. Penelitian ini menggunakan tiga pengukuran yaitu:

   2.1. Komite Audit

   Komite audit adalah bagian dalam struktur organisasi yang bertugas untuk membuat laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Komite Audit diukur dari jumlah total komite audit yang terdapat dalam Bank Umum Syariah (Khalid, Haron dan Masron 2017).

2.2.Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah puncak pimpinan dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam sistem pengendalian internal dan berperan sebagai *executive board*. Dewan Direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi dalam struktur *board of director* (BOD) di Bank Umum Syariah (Aktan, et al. 2018).

2.3.Komisaris Independen

Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang berperan sebagai *supervisory board*. Komisaris Independen diukur dengan membandingkan proporsi jumlah anggota dewan komisaris independen dengan total jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam struktur Bank Umum Syariah (Aktan, et al. 2018).

3.3.3. Variabel Intervening: Kualitas Penerapan *Corporate Governance*

Kualitas penerapan *Corporate Governance* merupakan suatu prosedur yang menunjukkan tingkat pelaksanaan *Corporate Governance* di suatu perusahaan, diukur dengan menggunakan prosentase nilai komposit sesuai aturan BI No.12/13/DPbs tanggal 30 April 2010. Nilai komposit dilihat dari laporan pelaksanaan *corporate governance* berupa hasil *self assessment* 11 item yang terdiri dari (1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris; (2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi; (3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite; (4) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS; (5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa; (6) Penanganan Benturan Kepentingan; (7) Penerapan Fungsi Audit Intern; (8) Penerapan Fungsi Kepatuhan; (9) Penerapan Fungsi Audit Eksternal; (10) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan; dan (11) Batas Maksimum Penyaluran Dana. Hasil laporan *self assesment* ini akan keluar peringkat pelaksanaan *corporate governance*. Terdapat lima kategori peringkat Nilai komposit dari Laporan Pelaksanaan Corporate Governance dengan

kategori: Sangat baik NK < 1,5; Baik 1,5 ≤ NK< 2,5; Cukup Baik 2,5 ≤ NK< 3,5; Kurang Baik 3,5 ≤ NK <4,5; dan Tidak Baik NK ≤ 5,0

3.3.4. Variabel Kontrol

Variabel Kontrol adalah variabel yang berfungsi untuk mengendalikan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol yang digunakan adalah pertama, ukuran perusahaan (*size*). Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran atau skala yang dapat menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berdasarkan kriteria misalnya dilihat dari jumlah total *asset*. Ukuran perusahaan (*size*) diukur dengan logaritma natural total *asset* yang terdapat dalam laporan keuangan perbankan (Alali, Anandarajan dan Jiang 2012; Khatab et al 2011; Aktan et al 2018)**.** Variabel kedua struktur kepemilikan dan komposisi pengendalian saham. Struktur kepemilikan adalah komposisi atau persentase kepemilikan dan komposisi pengendalian saham dalam Bank Syariah. Struktur kepemilikan diukur dengan 1) persentase untuk kepemilikan institusi; 2) kepemilikan publik; 3) kepemilikan pemerintah; 4) kepemilikan manajemen; dan 5) kepemilikan individu diukur dengan variabel dummy untuk nilai 0 (tidak ada) dan nilai 1 (ada). Pengukuran komposisi pengendalian saham diukur dengan variabel dummy untuk nilai 0 (tidak ada) dan nilai 1 (ada) menggunakan pengukuran Berle & Means (1934) yaitu:

Tabel 3.3.

Jenis Pengendalian Saham

1	*Private Ownership Control*	*80 percent or more of the stocks held by an individual or a grup of business associates*
2	*Majority Control*	*50-80 percent held by such persons*
3	*Minority Control*	*20-50 percent stock ownership*
4	*Management Control*	*Less then 20 percent stock ownership*

Sumber : Berle dan Means (1934)

Ringkasan nama variabel, definisi, pengukuran serta sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4

Definisi Operasional

NO	NAMA VARIABEL	DEFINISI	PENGUKURAN	SUMBER
1	Kinerja Bank Syariah diproksikan oleh *Return on Asset* (ROA)	ROA adalah rasio keuangan yang menunjukkan Kemampuan perusahaan dalam menggunakan *asset* yang dimiliki untuk menghasilkan laba	ROA = Laba bersih dibagi dengan total *asset*	Naceur (2003), Cheung dan Weiqiang (2010), Khatab et al (2011), Chugh et al (2011), Alali et al (2011), Bednar (2012), Manaseer et al (2012), Amba (2013), Bhagat dan Bolton (2013), Grassa dan Mataousi (2014), Mollah dan Zaman (2015), Pratiwi (2016), Musibah dan Affatani (2017), Aktan (2018)
NO	NAMA VARIABEL	DEFINISI	PENGUKURAN	SUMBER
2	Kinerja Bank Syariah diproksikan oleh *Return on Equity* (ROE)	ROE adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham	ROE = Laba bersih dibagi total ekuitas	Naceur (2003), Samontaray (2011), Khatab et al (2011), Chugh et al (2011), Manaseer et al (2012), Amba (2013), Grassa dan Mataousi (2014), Mollah dan Zaman (2015), Pratiwi (2016), Musibah dan Affatani (2017), Aktan (2018)
3	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	DPS adalah bagian dari struktur organisasi yang bertugas mengawasi, membuat laporan dan rekomendasi mengenai pemenuhan prinsip Syariah dalam proses transaksi di Bank Syariah	18 butir pertanyaan dengan variabel dummy jika nilai 1 untuk jawaba "Ya" dan nilai 0 (nol) untuk jawaban "tidak"	Nomran dan Hasan (2018) dan Islamic Financial Services Board (IFSB)

No	NAMA VARIABEL	DEFINISI	PENGUKURAN	SUMBER
4	Mekanisme *Corporate Governance* diproksikan oleh *Board of Director* (Dewan Direksi)	Dewan Direksi adalah puncak pimpinan dalam struktur oragnisasi yang bertanggung jawab dalam sistem pengendalian internal dan berperan sebagai *executive board*	Jumlah dewan direksi dalam struktur *Board of Director* di Bank Syariah	Hegazy dan Karim (2010), Chugh et al (2011), Cassel et al (2012), Manaseer et al (2012), Amba (2013), Sammy Rebiere (2013)
5	Mekanisme *Corporate Governance* diproksikan oleh Komposisi komisaris Independen	Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang berperan sebagai *supervisory board*	Perbandingan jumlah komisaris independen dengan total jumlah dewan komisaris	Jensen dan Meckling (1976), Yermack (2000), Cheung dan Weiqiang (2010), Bednar (2012), Hamza (2013), Bhagat dan Bolton (2013), Mollah dan Zaman (2015)
6	Mekanisme *Corporate Governance* di proksikan oleh Komite Audit	Komite audit adalah bagian dalam struktur organisasi yang bertugas untuk membuat laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah	Jumlah komite total audit yang terdiri dari pihak internal (perwakilan dari komisaris) dan dari pihak eksternal (independen/diluar komisaris)	Islam et al (2009), Nguyen dan Nielsen (2010), Hegazy dan Karim (2010), Owolabi dan Dada (2011), Cassell et al (2012), Amba (2013)
7	Kualitas Penerapan *Corporate Governance*	Kualitas penerapan *Corporate Governance* merupakan suatu prosedur yang menunjukkan tingkat pelaksanaan *Corporate Governance* di suatu perusahaan.	Diukur dengan 11 komponen penilaian *self assessment* dari komponen mekanisme *Corporate Governance* . Nilai komposit dari Laporan Pelaksanaan *Corporate Governance* dengan kategori Sangat baik NK < 1,5 Baik 1,5 ≤ NK< 2,5 Cukup Baik 2,5 ≤ NK< 3,5 Kurang Baik 3,5 ≤ NK <4,5 Tidak Baik NK ≤ 5,0	Syam dan Taufik (2012), Laela (2012) dan Pratiwi (2016)

NO	NAMA VARIABEL	DEFINISI	PENGUKURAN	SUMBER
8	Ukuran Perusahaan (*Size*)	merupakan jumlah total *asset* Bank Syariah (BUS)	Diukur dengan Ln Total *Asset*	Samontaray (2010), Zerni et al (2010), Cheung dan Weiqiang (2010), Khatab et al (2011), Alali et al (2011), Bednar (2012), Manaseer et al (2012), Bhagat dab Bolton (2013)
6	Struktur Kepemilikan	Prosentase kepemilikan dan komposisi pengendalian saham dalam Bank Syariah	Diukur dengan dummy variabel skor 0 (tidak ada) dan 1 (ada) yaitu (1) kepemilikan institusi (2) kepemilikan publik (3) kepemilikan pemerintah (4) kepemilikan manajerial (5) kepemilikan individu. Komposisi pengendalian kepemilikan saham yaitu (1) *Private Ownership* > 80% (2) *Majority Control* 50-80% (3) *Minority Control* 20-50% dan (4) *Management Control* < 20%.	Berle dan Means (1932), Jensen dan Meckling, (1993), Eng (2003),Yermack, (2000),Clarke (2007), Hussain (2006) Jaffar dan Abdul Shukor (2016)

Sumber : disarikan dari jurnal (2018)

3.4. Metode Analisis

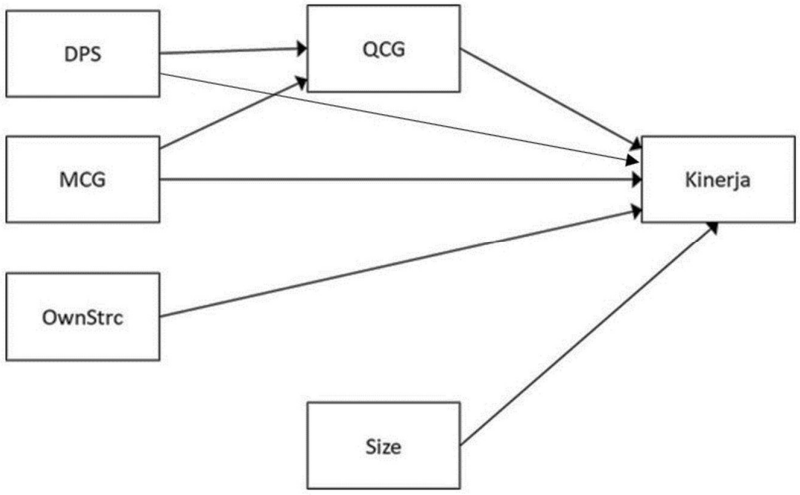
Penelitian ini menggunakan analisis statistik *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* atau sering disebut juga *Partial Least Squares Path Modeling (PLS-PM)* merupakan metode alternatif untuk model persamaan struktural *(structural*

equation modeling), yaitu menguji secara simultan hubungan antar konstruk laten dalam hubungan linear ataupun non-linear dengan banyak indikator baik berbentuk model A (reflektif) dan model B (formatif). Alasan peneliti menggunakan PLS-SEM adalah (1) peneliti di bidang ilmu sosial maupun eksakta seringkali membangun model penelitian dengan variabel laten (*unobserved variable*) dan dengan kompleksitas yang tinggi. PLS dapat menguji hubungan yang kompleks dengan banyak konstruk dan banyak indikator; (2) Pendekatan PLS-SEM tidak mensyaratkan data harus berdistribusi normal, dapat mengatur semua jenis skala pengukuran dan dapat digunakan pada sampel yang kecil sehingga sering disebut sebagai *soft modeling*; (3) PLS-SEM sudah teruji dengan desain dasar dan konsep yang jelas. Hingga saat ini, teknik PLS telah dikembangkan untuk mengatasi berbagai macam masalah riset yang bersifat substantif seperti analisis interaksi model, analisis *hierarchical model*, analisis *heterogeneity*, analisis multigrup model dan sebagainya; (4) PLS-SEM mampu mengestimasi model secara simultan sehingga lebih tepat dalam pengujian teori; dan (5) PLS-SEM memperhitungkan kesalahan pengukuran dapat meningkatkan estimasi statistik (Ghozali 2015). Menurut Hair et al (2019) PLS-SEM juga dapat digunakan untuk penelitian dengan data sekunder pada saat menganalisa data yang berupa rasio-rasio keuangan atau yang sejenisnya.

Penelitian ini menggunakan tiga model persamaan struktural yang di analisa dengan menggunakan indikator variabel DPS dalam tiga jenis pengukuran yaitu (1) masing-masing indikator variabel DPS dimasukkan dalam analisa data; (2) indikator variabel DPS dijumlahkan dalam bentuk total DPS; dan (3) indikator variabel DPS dihitung dalam bentuk persentase. Tujuannya adalah untuk menguji tingkat *robust* suatu model penelitian dengan mencari model penelitian yang mempunyai tingkat koefisien determinasi yang paling tinggi (Ghozali 2015). Metode analisa PLS-SEM dilakukan dalam tiga tahapan pengolahan data dengan menggunakan tiga persamaan regresi:

Persamaan 1 : a. $QCG = \alpha + \beta_1 DPS + \varepsilon$

b. $Kinerja = \alpha + \beta_1 MCG + \beta_2 QCG + \beta_3 OWN + \beta_4 SIZE + \varepsilon$

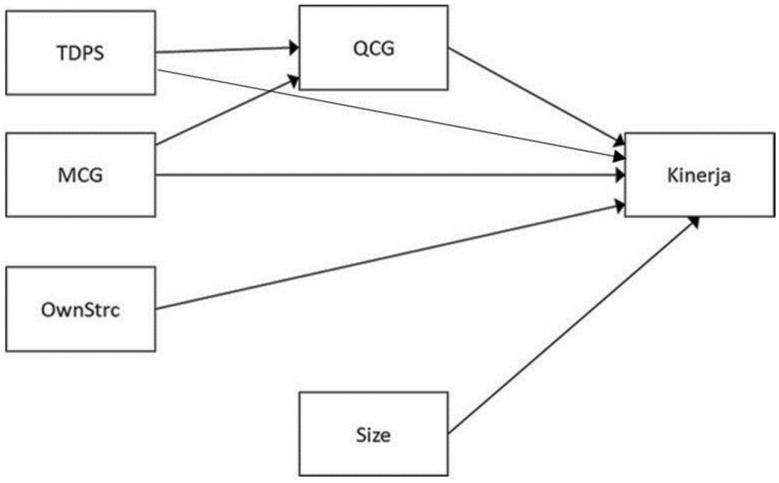


Gambar 3.1

Model Penelitian Persamaan 1

Persamaan 2 : a. $QCG = \alpha + \beta_1 TDPS + \varepsilon$

b. $Kinerja = \alpha + \beta_1 MCG + \beta_2 QCG + \beta 3 OWN + \beta 4 SIZE + \varepsilon$

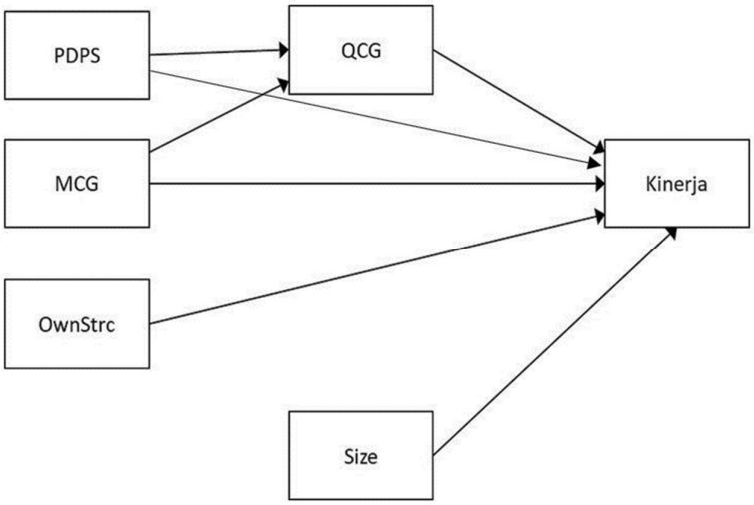


Gambar 3.2.

Model Penelitian Persamaan 2

Persamaan 3 : a. $QCG = \alpha + \beta_1 PDPS + \varepsilon$

b. $Kinerja = \alpha + \beta_1 MCG + \beta_2 QCG + \beta_3 OWN + \beta_4 SIZE + \varepsilon$



Gambar 3.3.

Model Penelitian Persamaan 3

Keterangan Persamaan Regresi:

Variabel dependen (Y):

Kinerja = diproksikan dengan ROA dan ROE

Variabel intervening (Z):

QCG = Kualitas Corporate Governance

Variabel independen (X):

DPS =Dewan Pengawas Syariah

TDPS = Total Dewan Pengawas Syariah

PDPS = Persentase Dewan Pengawas Syariah

MCG = Mekanisme *Corporate Governance*

Variabel kontrol:

OWN = struktur kepemilikan dan pengendalian saham

SIZE = ukuran perusahaan (*size*)

3.4.1. Evaluasi Model PLS-SEM

Evaluasi model dalam PLS-SEM melalui dua tahapan yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model struktural. Evaluasi model pengukuran atau *outer model*

dilakukan untuk menilai reliabilitas dan validitas dari indikator pembentuk konstruk laten. Hal ini digunakan apabila data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan evaluasi model struktural atau *inner model* bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten dengan melihat seberapa besar perbedaan yang dapat dijelaskan dan untuk mengetahui signifikansi dari P-value. Evaluasi model struktural biasanya digunakan untuk data sekunder. Dalam melakukan evaluasi model structural *Rule of Thumb* adalah sebagai berikut (Ghozali 2015):

Tabel 3.5

Kriteria Pengukuran

Kriteria	***Rule of Thumb***
R-Square atau Adjusted R-Square	≤ 0.70, ≤ 0.45 dan ≤ 0.25 menunjukkan model kuat, moderate dan lemah
Effect Size (f2)	≥ 0.02, ≥ 0.15 dan ≥ 0.35 (kecil, menengah dan besar)
Q2 predictive relevance	Q2 > 0 menunjukkan model mempunyai *predictive relevance* dan jika Q2 < 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predivtive relevance*
q2 predictive relevance	≥ 0.02, ≥ 0.15 dan ≥ 0.35 (lemah, moderate dan kuat)
APC,ARS dan AARS	P-value ≤ 0.05
AVIF dan AFVIF	≤ 3.3, namun nilai ≤ 5 masih dapat diterima
Goodness Tenenhaus	≤ 0.10, ≥ 0.25 dan ≥ 0.36 (kecil, menengah dan besar)
SPR	Idealnya = 1, namun nilai ≥ 0.7 masih dapat diterima
RSCR	Idealnya = 1, namun nilai ≥ 0.7 masih dapat diterima
SSR	Harusnya ≥ 0.7
NLBCDR	Harusnya ≥ 0.7
Signifikansi (two-tailed)	P-value 0.10 (level signifikansi=10%), P-value 0.05 (level signifikansi=5%) dan P-value 0.01 (level signifikansi=1%)

Sumber : Sholihin & Ratmono (2013)

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Statistik Deskirptif

Berikut ini akan disajikan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai mean (rerata), median, mode, dan standar deviasi.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Mode	Standar Deviasi
TDPS	11,03	11,00	10	1,547
PDPS	0,612	0,611	5,555	0,085
Komite Audit	3,64	3,00	3	1,117
Dewan Direksi	4,32	4,00	4	1,231
DPS 2	0,38	0,00	0	0,488
DPS 3	0,57	1,00	1	0,499
DPS 4	0,43	0,00	0	0,499
DPS 5	0,04	0,00	0	0,201
DPS 11	0,11	0,00	0	0,316
DPS 13	0,94	1,00	1	0,231
DPS 15	0,97	1,00	1	0,165
DPS 16	0,39	0,00	0	0,491
DPS 18	0,97	1,00	1	0,165
Kepemilikan Publik	0,39	0,00	0	0,491
Kepemilikan Individu	0,38	0,00	0	0,488
Privat Ownership > 90%	0,67	1,00	1	0,475
Minority Control 20-50%	0,28	0,00	0	0,451
Kepemilikan Institusi	91,918	98,00	100,00	14,686
QCG	1,7313	1,6675	2,00	0,4714
ROA	0,760	0,820	0,200	1,897
ROE	6,411	5,535	2,800	16,5688
Ln Total Asset	29,7308	29,5896	29,841	1,4262

Sumber : Hasil Olah Data SPSS (2019)

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah data (N) yang diolah ada 72. Berdasarkan tabel 4.2 nilai variabel persentase DPS (PDPS) mempunyai nilai rata-rata (mean) 0,6126, median 0,611, dan standar deviasi 0,0859 dengan nilai PDPS terkecil

(minimum) adalah 0,388 dan nilai PDPS terbesar (maximum) adalah 0,7222. Hal itu menunjukkan nilai mean dan median relatif sama artinya data PDPS sangat mendekati normal dengan sebaran data yang tidak terlalu jauh. Besarnya nilai variabel total DPS (TDPS) mempunyai nilai rata-rata (mean) 11,03 dengan standar deviasi sebesar 1.547. Sedangkan nilai variabel DPS dari 18 indikator hanya 9 indikator saja yang bisa diolah datanya yaitu proksi DPS 2, DPS 3, DPS 4, DPS 5, DPS 11, DPS 13, DPS 15, DPS 16, dan DPS 18. Nilai proksi DPS 2, DPS 4, DPS 5, DPS 11, dan DPS 16 kebanyakan skornya nol (0) artinya banyak yang menjawab "Tidak" dengan nilai standar deviasi 0,488; 0,499; 0,201; 0,316; dan 0,491. Sedangkan nilai proksi DPS 3, DPS 13, DPS 15, dan DPS 18 kebanyakan skornya satu (1) artinya banyak yang menjawab "Ya" dengan nilai standar deviasi 0,499; 0,231; 0,165; dan 0,165.

Variabel Mekanisme *Corporate Governance* (MCG) diproksikan dengan Komite Audit dan Dewan Direksi. Jumlah anggota Komite Audit di Bank Syariah kebanyakan 3 orang dan Dewan Direksi kebanyakan 4 orang. Variabel MCG mempunyai nilai mean, median, dan mode yang sama hal ini menunjukkan bahwa data Komite Audit dan Dewan Direksi sangat mendekati normal. Nilai mean dan median variabel Komite Audit adalah 3,64 dan 3,00, sedangkan nilai mean dan median variabel Dewan Direksi adalah 4,32 dan 4,00. Hal ini juga berlaku untuk variabel kepemilikan publik, kepemilikan individu, *private ownership*, dan *minority control* yang mempunyai nilai mean, median, dan mode relatif sama sehingga data mendekati normal. Sedangkan variabel kepemilikan institusi mempunyai nilai standar deviasi sebesar 14,686 lebih kecil dari nilai mean yaitu 91,918 dengan nilai minimum 48,32 dan nilai maximum 98,00. Hal itu menunjukkan prosentase kepemilikan institusi di Bank Syariah kebanyakan 100%. Variabel QCG yang diukur dengan nilai komposit dari laporan pelaksanaan *corporate governance* kebanyakan skornya 2 dan memiliki nilai mean dan median yang relatif sama, sehingga bentuknya cenderung mendekati normal. Hal ini juga

didukung dengan nilai standar deviasi yaitu 0,471 yang nilainya jauh lebih kecil daripada nilai mean. Kemudian variabel kinerja yang diproksikan dengan ROA dan ROE memiliki nilai mean dan median dan mode yang jaraknya tidak terlalu besar sehingga data cenderung mendekati normal. Variabel ROA mempunyai nilai mean 0,7608, median 0,8200 dan mode 0,200 sedangkan variabel ROE nilai mean 6,4111, median 5,5350 dan mode 2,800. Nilai standar deviasi ROA dan ROE yaitu 1,877 dan 16,5688.

4.2.Hasil Analisa Data PLS-SEM

Metode analisa data menggunakan analisa statistik dengan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* atau sering disebut juga *Partial Least Squares Path Modeling (*PLS-PM). Menurut Wold (1985) dalam Ghozali (2015), *Partial Least Squares* (PLS) merupakan metode analisa yang "kuat" oleh karena tidak didasarkan banyak asumsi atau *(non parametric)*. Data tidak harus terdistribusi secara *normal multivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama) dan sampel tidak harus besar. PLS lebih menitikberatkan pada data dan dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka mispesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi parameter. Kelebihan menggunakan analisa PLS-SEM adalah 1) Dapat diigunakan untuk mengolah data dengan jumlah data sampel (N) jumlahnya sedikit yaitu kurang dari 100 data sehingga metode analisa ini dianggap yang paling sesuai dalam penelitian ini, 2) Dapat digunakan untuk menganalisa data yang tidak memenuhi asumsi normalitas dan dalam penelitian ini asumsi normalitas data tidak terpenuhi, dan 3) Dapat digunakan untuk menganalisa model penelitian dengan menggunakan variabel intervening atau variabel mediasi dalam satu kali proses analisa data sehingga lebih mudah dan cepat.

Penggunaan PLS-SEM untuk menganalisis efek variabel intervening atau mediasi mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan teknik analisis *multivariate* biasa (Iaobucci et al 2007) dalam (Ghozali, 2014) yaitu:

1. Dapat menganalisis variabel laten dengan banyak indikator.
2. Dapat menganalisis model dengan *multiple* mediator variable.
3. Dapat mengontrol kesalahan pengukuran.

Penggunaan PLS-SEM diasumsikan bisa mengurangi kelemahan dari pengujian dengan analisa regresi sehingga hasil pengujian hipotesis sesuai yang diharapkan. Metode PLS-SEM ini dipandang lebih sesuai karena tidak memerlukan asumsi apapun tentang distribusi variabel sehingga dapat diaplikasikan pada ukuran sampel kecil (Hair, et al. 2019). Pada saat melakukan analisa data penelitian ini dengan mengggunakan analisa regresi terdapat data yang tidak normal dan berbagai upaya sudah dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode *oulier* (yaitu menghilangkan data yang tidak memenuhi asumsi normalitas) dan metode *bootstrapping*. Metode *bootstrapping* adalah metode berbasis *resampling* dengan mengambil ukuran sampel lebih besar agar dapat mewakili data populasinya, biasanya ukuran sampling diambil dalam puluhan, ratusan bahkan ribuan kali dari jumlah sampel sesungguhnya. Data yang tidak normal menunjukkan adanya kesalahan pengukuran yang dapat disebabkan ketidaksempurnaan data atau variabel penelitian yang akan mengganggu hasil pengujian hipotesis.

Evaluasi model dengan PLS-SEM dilakukan dalam dua tahapan yaitu evaluasi model pengukuran dan evaluasi model strukural. Evaluasi model pengukuran atau *outer* model dilakukan untuk menilai reliablitas dan validitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk laten. Sedangkan evaluasi model struktural atau *inner* model bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten dengan melihat seberapa besar *variance* yang dapat dijelaskan dan untuk mengetahui signifikansi dari *p*-value. Namun dalam penelitian ini evaluasi model

pengukuran dengan uji reliabilitas dan validitas tidak dilakukan karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Evaluasi model pengukuran dengan uji reliabilitas dan validitas digunakan untuk penelitian yang menggunakan data primer, sehingga penelitian ini hanya menggunakan evaluasi model struktural atau *inner* model (Ghozali, 2014).

Variabel DPS dalam tiga jenis pengukuran yaitu (1) Dewan Pengawas Syariah (DPS); (2) Total Dewan Pengawas Syariah (TDPS); dan (3) Persentase Dewan Pengawas Syariah (PDPS). Pengujian variabel DPS persamaan pertama dilakukan dengan cara masing-masing item indikator variabel Dewan Pengawas Syariah dimasukkan satu persatu saat analisa data. Pengujian variabel DPS persamaan kedua dilakukan dengan cara masing-masing item indikator variabel Dewan Pengawas Syariah dijumlahkan sehingga membentuk total DPS (TDPS). Pengujian variabel DPS persamaan ketiga dilakukan dengan cara masing-masing item indikator variabel Dewan Pengawas Syariah dijumlahkan lalu dibagi dengan total item dikalikan 100% sehingga membentuk persentase DPS (PDPS). Tujuannya adalah untuk menguji tingkat *robust* suatu model penelitian dengan mencari model penelitian yang mempunyai tingkat koefisien determinasi yang paling tinggi (Ghozali 2015).

Variabel Mekanisme *Corporate Governance* (MCG) di proksikan dengan Komite Audit, Dewan Direksi dan Komisaris Independen. Pengujian variabel Mekanisme *Corporate Governance* (MCG) yang mempunyai tiga indikator yaitu Komite Audit, Dewan Direksi, dan Komisaris Independen dilakukan dengan cara semua indikator tersebut dimasukkan dalam analisa data sehingga membentuk satu kesatuan konstruk yang menjadi satu variabel. Hal tersebut diasumsikan bahwa Komite Audit, Dewan Direksi, dan Komisaris Independen sebagai komponen yang membentuk variabel Mekanisme *Corporate Governance* (MCG).

Variabel intervening yaitu Kualitas Penerapan *Corporate Governance* (selanjutnya di sebut QCG). Variabel dependen yaitu Kinerja Bank Syariah yang diukur dengan dua indikator rasio keuangan yaitu *Return On Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE).

Terdapat dua variabel kontrol yaitu Ukuran perusahaan (*Size)* dan struktur kepemilikan dan pengendalian saham. Model persamaan struktural ini digunakan untuk menguji H1, H2, H3, H4, dan H5.

Berikut ini disampaikan proses analisis data dan statistik inferensial dengan menggunakan Warp PLS 5.0 untuk dapat menarik kesimpulan bagi pengujian berbagai hipotesis yang diajukan dalam penelitian disertasi ini.

4.2.1. Analisis Pengukuran Fit Model & Faktor Konfirmatori

Sebelum dilakukan analisis model struktural, peneliti harus melakukan pengukuran model (*model measurement*) untuk menguji validitas dan reliabilitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk laten dengan melakukan analisis faktor konfirmatori. Dari hasil uji analisis faktor konfirmatori, diperoleh hasil sebagai berikut. Dari keseluruhan indikator variabel yang digunakan, terdapat satu indikator yang tidak digunakan dalam pengujian model persamaan struktural utama karena nilai *loading factor*nya di bawah 0,40 (Sholihin dan Ratmono 2013). Indikator yang tidak digunakan adalah proporsi/persentase Komisaris Independen. Menurut Chin (1988) dalam Sholihin dan Ratmono (2013) menunjukkan salah satu indikator untuk evaluasi model pengukuran refleksif adalah dengan melihat *loading* faktor lebih besar dari 0.7.

Pengujian data diawali dengan melihat *nilai fit* model penelitian. Proses analisa data awal yang dilakukan menunjukkan ada data yaitu dari indikator pengukuran DPS tidak bisa di olah karena mempunyai nilai yang sama yaitu untuk DPS 1, DPS 6, DPS 7, DPS 8, DPS 9, DPS 10, DPS 12, DPS 14, dan DPS 17. Sedangkan indikator variabel struktur kepemilikan yaitu kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, dan komposisi pengendalian kepemilikan manajemen kontrol < 20% tidak bisa diolah datanya karena tidak ada nilainya.

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan hasil pengukuran terhadap model menunjukkan hasil bahwa secara keseluruhan, baik model utama maupun model pendukung menunjukkan

kelayakan sebagai sebuah model. Nilai *Average Path Coefficient (APC)*, *Average R-squared (ARS)* dan *Average adjusted R-squared (AARS)* menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa model penelitian ini adalah layak. Berikutnya, *Average block VIF (AVIF)* dan *Average full collinearity VIF (AFVIF)* menunjukkan skor kurang dari 3,3 yang berarti bahwa model penelitian ini juga layak. Selanjutnya skor *Tenenhaus GoF (GoF)* menunjukkan skor lebih besar dari 0,36 yang berarti bahwa model penelitian ini masih tetap layak. Hasil *Symson's paradox ratio (SPR)*, *R-squared contribution ratio (RSCR)* dan *Statistical suppression ratio (SSR)* juga mengindikasikan bahwa model penelitian ini layak. Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa semua model tergolong fit.

Tabel 4.2

Pengukuran Fit Model

NO	INDIKATOR PENGUKURAN	NILAI	P-VALUE	KRITERIA	KESIMPULAN
PERSAMAAN I					
1	Average Path Coefficient (APC)	0,235	0,009	P < 0.05	MODEL FIT
2	Average R-Squared (ARS)	0,224	0,011	P < 0.05	MODEL FIT
3	Average Block VIF (AVIF)	0,244	-	IDEAL<3.3	MODEL FIT
4	Average Full Collinearity VIF (AFVIF)	1,810	-	IDEAL<3.3	MODEL FIT
5	Tenenhaus GoF (GoF)	0,421	-	LARGE>0.36	MODEL FIT
6	Symson`s Paradox Ratio (SPR)	1,000	-	DITERIMA JIKA > 0.7	MODEL FIT
7	R-Squared Contribution Ratio (RSCR)	1,000	-	DITERIMA JIKA >0.9	MODEL FIT
8	Statistical Suppression Ratio (SSR)	0,833	-	DITERIMA JIKA > 0.7	MODEL FIT
PERSAMAAN II					
1	Average Path Coefficient (APC)	0,238	0,008	P < 0.05	MODEL FIT
2	Average R-Squared (ARS)	0,238	0,008	P < 0.05	MODEL FIT
3	Average Block VIF (AVIF)	1,239	-	IDEAL<3.3	MODEL FIT
4	Average Full Collinearity VIF (AFVIF)	1,737	-	IDEAL<3.3	MODEL FIT
5	Tenenhaus GoF (GoF)	0,461	-	LARGE>0.36	MODEL FIT
6	Symson`s Paradox Ratio (SPR)	1,000	-	DITERIMA JIKA > 0.7	MODEL FIT
7	R-Squared Contribution Ratio (RSCR)	1,000	-	DITERIMA JIKA > 0.9	MODEL FIT
8	Statistical Suppression Ratio (SSR)	1,000	-	DITERIMA JIKA > 0.7	MODEL FIT

PERSAMAAN III					
1	Average Path Coefficient (APC)	0,238	0,008	P < 0.05	MODEL FIT
2	Average R-Squared (ARS)	0,238	0,008	P < 0.05	MODEL FIT
3	Average Block VIF (AVIF)	1,239	-	IDEAL<3.3	MODEL FIT
4	Average Full Collinearity VIF (AFVIF)	1,737	-	IDEAL<3.3	MODEL FIT
5	Tenenhaus GoF (GoF)	0,461	-	LARGE>0.36	MODEL FIT
6	Symson`s Paradox Ratio (SPR)	1,000	-	DITERIMA JIKA > 0.7	MODEL FIT
7	R-Squared Contribution Ratio (RSCR)	1,000	-	DITERIMA JIKA > 0.9	MODEL FIT
8	Statistical Suppression Ratio (SSR)	1,000	-	DITERIMA JIKA > 0.7	MODEL FIT

Sumber : Hasil olah data (2019)

Berdasarkan hasil analisa data tabel 4.4 persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

Persamaan 1 adalah:

a. $QCG = \alpha - 0{,}236DPS + \varepsilon$

b. $Kinerja = \alpha + 0{,}237MCG - 0{,}492QCG - 0{,}234OWN + 0{,}075SIZE + \varepsilon$

Persamaan 2 adalah:

a. $QCG = \alpha - 0{,}295TDPS + \varepsilon$

b. $Kinerja = \alpha + 0{,}237MCG - 0{,}492QCG - 0{,}234OWN + 0{,}075SIZE + \varepsilon$

Persamaan 3 adalah:

a. $QCG = \alpha - 0{,}295PDPS + \varepsilon$

b. $Kinerja = \alpha + 0{,}237MCG - 0{,}492\ QCG - 0{,}234OWN + 0{,}075SIZE + \varepsilon$

Model penelitian persamaan 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap kinerja adalah MCG, QCG, dan juga variabel kontrol struktur kepemilikan dengan nilai koefisien masing-masing, persamaan 1, 2, dan 3 0,237; -0,492; dan -0,234. Sedangkan variabel yang berpengaruh terhadap QCG adalah DPS dengan nilai koefisien untuk persamaan 1 -0,246; persamaan 2 dan 3 -0,295.

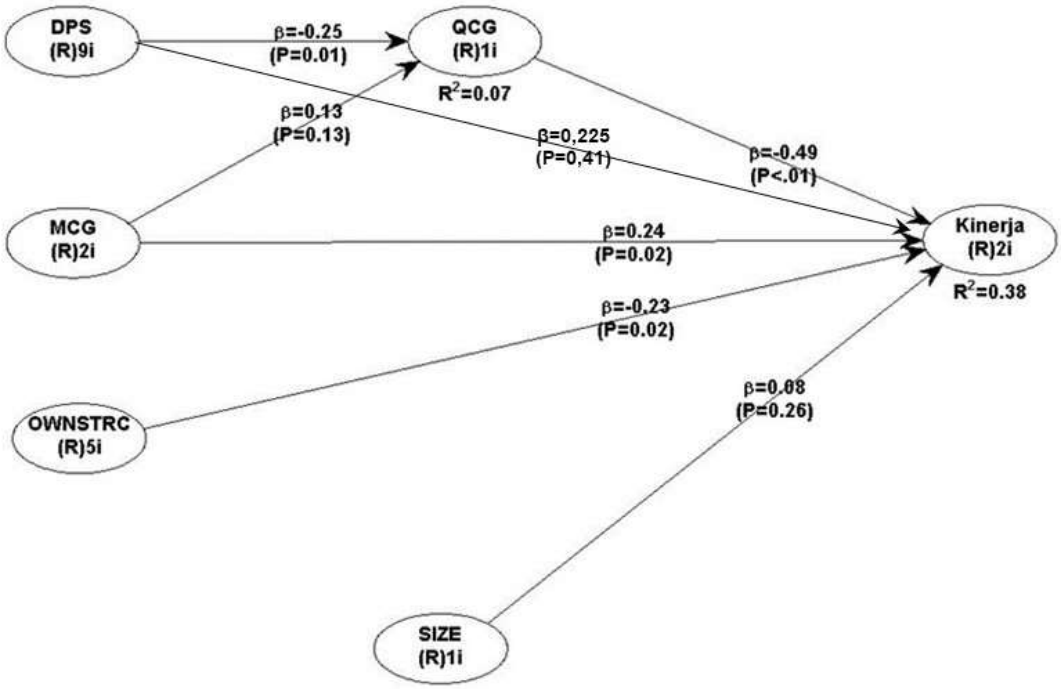
Tabel 4.3
Estimasi Koefisien Persamaan

PENGARUH	KOEFISIEN	P-VALUE
PERSAMAAN I		
DPS → QCG	-0.246	0.013*
QCG → Kinerja	-0.492	< 0.001*
MCG → Kinerja	0.237	0.017*
Size → Kinerja	0.075	0.257
OWN → Kinerja	-0,234	0.018*
PERSAMAAN II		
DPS → QCG	-0.295	0.004*
QCG → Kinerja	-0.492	< 0.001*
MCG → Kinerja	0.237	0.017*
Size → Kinerja	0.075	0.257
OWN → Kinerja	-0,234	0.018*
PERSAMAAN III		
DPS → QCG	-0.295	0.004*
QCG → Kinerja	-0.492	< 0.001*
MCG → Kinerja	0.237	0.017*
Size → Kinerja	0.075	0.257
OWN → Kinerja	-0,234	0.018*

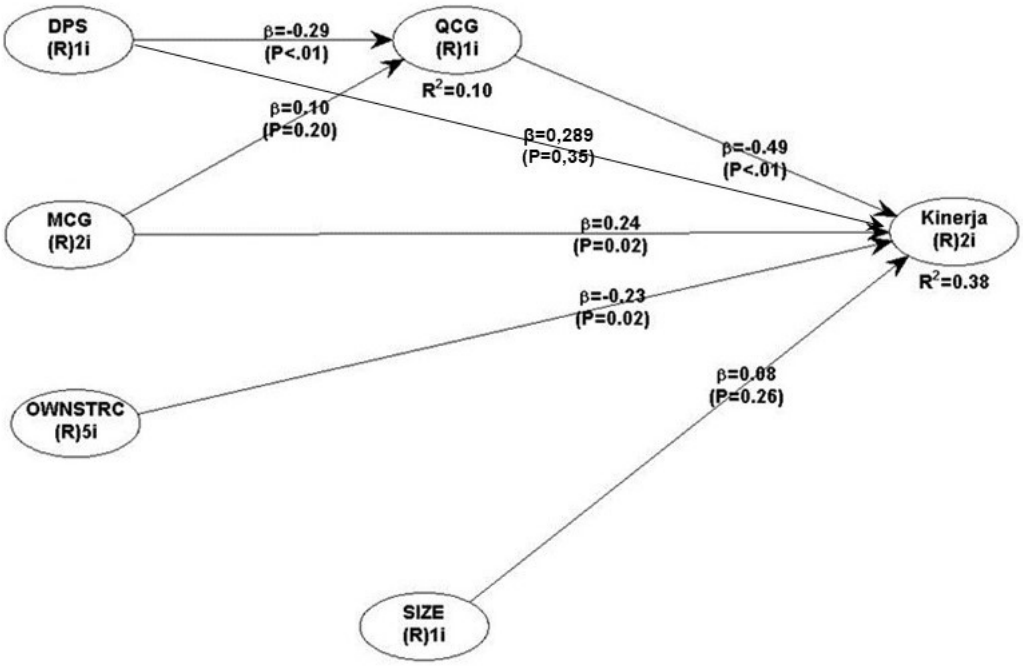
Ket : tanda * signifikan 5%
Sumber : Hasil olah data (2019)

Adapun ilustrasi Model Penelitian persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 adalah sebagai berikut:

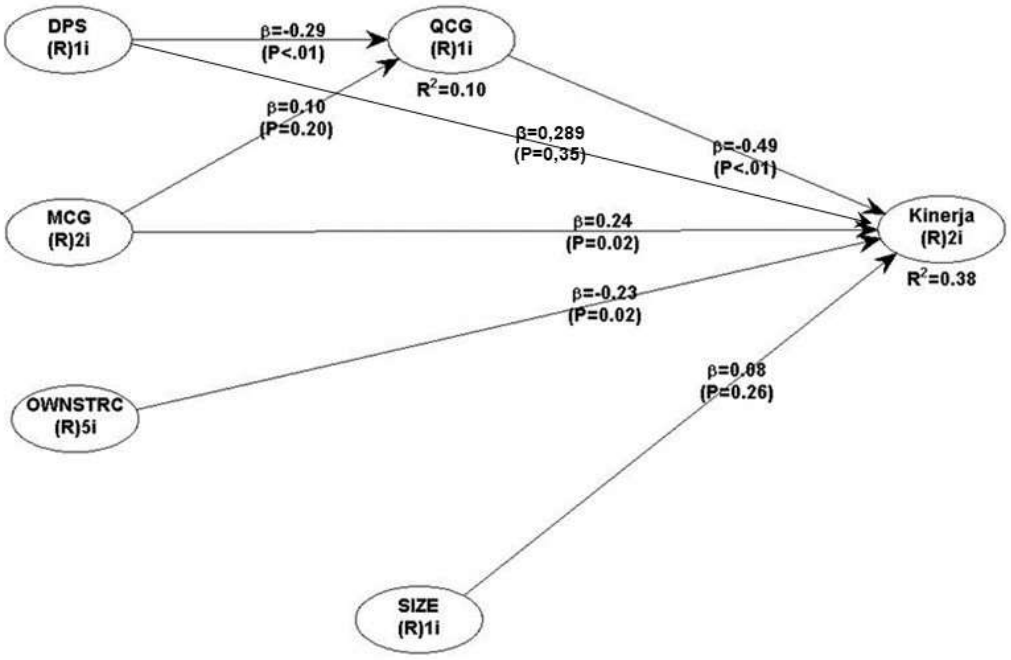
Gambar 4.1.
Ilustrasi Model Penelitian
Persamaan 1



Gambar 4.2.
Ilustrasi Model Penelitian
Persamaan 2



Gambar 4.3.
Ilustrasi Model Penelitian
Persamaan 3



Beberapa kesimpulan dari pengujian tiga persamaan seperti dalam ilustrasi tersebut di atas bisa diringkas sebagai berikut:

1. Hasil pengujian Model Penelitian persamaan 1 di atas menunjukkan hasil bahwa pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kualitas penerapan *corporate governance* (QCG) memiliki estimasi koefisien negatif 0,246 dan nilai probabilitas sebesar 0.013 (p-value < 0,05), artinya variabel DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap QCG. Hasil pengujian Model Penelitian persamaan 2 dan 3 di atas menunjukkan hasil bahwa pengaruh DPS terhadap kualitas penerapan QCG memiliki estimasi koefisien negatif 0,295 dan nilai probabilitas sebesar 0.004 (p-value < 0,01) artinya variabel DPS berpengaruh negatif sangat signifikan terhadap QCG. Arah koefisien menunjukkan pengaruh negatif disebabkan variabel Kualitas Penerapan *Corporate Governance* (QCG) yang diukur dengan nilai komposit menunjukkan skala yang berlawanan yaitu skala 1

sampai 5, dimana skala 1 menunjukkan peringkat "sangat baik" dan skala 5 menunjukkan peringkat yang "tidak baik".

2. Hasil pengujian Model Penelitian di atas menunjukkan hasil bahwa pengaruh Kualitas penerapan *Corporate Governance* (QCG) terhadap kinerja Bank Syariah masing-masing memiliki estimasi koefisien negatif 0,492 dan nilai probabilitas sebesar 0,001(p-value < 0,01) baik persamaan 1, 2, dan 3 artinya adalah variabel QCG berpengaruh negatif sangat signifikan terhadap kinerja. Arah koefisien menunjukkan pengaruh negatif disebabkan variabel Kualitas Penerapan *Corporate Governance* (QCG) yang diukur dengan nilai komposit menunjukkan skala yang berlawanan yaitu skala 1 sampai 5, dimana skala 1 menunjukkan peringkat "sangat baik" dan skala 5 menunjukkan peringkat yang "tidak baik".
3. Hasil pengujian Model Penelitian di atas menunjukkan hasil bahwa pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* (MCG) terhadap kinerja Bank Syariah masing-masing memiliki estimasi koefisien positif 0,237 dan nilai probabilitas sebesar 0,017(p-value < 0,05) baik persamaan 1, 2, dan 3 artinya variabel MCG berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja.
4. Hasil pengujian vaiabel kontrol menunjukkan bahwa variabel *size* memiliki estimasi koefisien positif 0,075 dan nilai probabilitas sebesar 0,257 (p-value > 0,05) baik persamaan 1, 2, dan 3 artinya adalah variabel *size* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja.
5. Hasil pengujian variabel kontrol menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan memiliki estimasi koefisien negatif 0,234 dan nilai probabilitas sebesar 0,018 (p-value < 0,05) baik persamaan 1, 2, dan 3 artinya adalah variabel struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

6. Koefisien determinasi pengaruh terhadap QCG dari ketiga persamaan yang paling besar nilainya adalah persamaan 2 dan 3 sebesar 7,0 persen. Artinya bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam model penelitian untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap QCG nilainya cukup tinggi sebesar 7,0 persen.
7. Koefisien determinasi pengaruh terhadap kinerja persamaan 1, 2, dan 3 nilainya sama yaitu sebesar 34,2 persen. Kesimpulan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam model penelitian persamaan 1, 2, dan 3 sama-sama mampu menjelaskan kinerja bank syariah dengan cukup tinggi.

4.2.2. Penghitungan nilai VAF untuk pengujian variabel intervening

Pengujian variabel kualitas *corporate governance* sebagai variabel intervening dengan metode VAF lebih sesuai karena tidak memerlukan asumsi apapun tentang distribusi variabel sehingga dapat diaplikasikan pada ukuran sampel kecil Hair, et al (2010) dalam (Sholihin dan Ratmono 2013).

1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah melalui Peningkatan Kualitas Penerapan *Corporate Governance*.

   Pengujian pengaruh tidak langsung variabel Kualitas Penerapan *Corporate Governance* yang memediasi pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah dengan menggunakan metode *Variance Accounted For* (VAF) seperti yang disarankan Hair et al (2010) dalam Sholihin dan Ratmono (2013) bisa dilihat dalam tabel 4.5.

Tabel 4.4

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah melalui Peningkatan Kualitas Penerapan *Corporate Governance*

KETERANGAN	PERSAMAAN 1	KETERANGAN	PERSAMAAN 2	KETERANGAN	PERSAMAAN 3
Pengaruh tidak langsung (-0,246x -0,492) DPS→QCG=-0,246, QCG→Kinerja=-0,492	0,121	Pengaruh tidak langsung (-0,295x -0,492) DPS→QCG=-0,295, QCG→Kinerja=-0,492	0,145	Pengaruh tidak langsung (-0,295 x -0,492) DPS→QCG=-0,295, QCG→Kinerja=-0,492	0,145
Pengaruh Langsung DPS→ Kinerja = 0,225	0,225	Pengaruh Langsung DPS→ Kinerja = 0,289	0,289	Pengaruh Langsung DPS→ Kinerja = 0,289	0,289
Pengaruh total = 0,121+0,225	0,346	Pengaruh total = 0,145+0,289	0,434	Pengaruh total = 0,145+0,289	0,434
VAF= Pengaruh tidak langsung/ pengaruh total	0,349	VAF= Pengaruh tidak langsung/ pengaruh total	0,334	VAF= Pengaruh tidak langsung/ pengaruh total	0,334

Sumber : data sekunder yang diolah (2019)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai VAF dalam pengujian variabel intervening persamaan 1 sebesar 0,349 (34,9%), persamaan 2 sebesar 0,334 (33,4%), dan persamaan 3 sebesar 0,334 (33,4%). Jika nilai VAF mempunyai interval 20% ≤ VAF≤ 80% artinya bahwa variabel Kualitas penerapan *Corporate Governance* (QCG) memediasi sebagian *(partial mediation)*. Kesimpulan adalah bahwa QCG mampu memediasi sebagian *(partial mediation)* hubungan anatara DPS dan kinerja bank syariah.

2. Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* (MCG) terhadap kinerja Bank Syariah melalui peningkatan Kualitas penerapan *Corporate Governance* (QCG).

   Pengujian pengaruh tidak langsung variabel Kualitas Penerapan *Corporate Governance* yang memediasi pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah dengan menggunakan metode *Variance Accounted For* (VAF) seperti yang

disarankan Hair et al (2010) dalam Sholihin dan Ratmono (2013) bisa dilihat dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5
Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* (MCG) terhadap kinerja Bank Syariah melalui Peningkatan Kualitas Penerapan *Corporate Governance* (QCG).

KETERANGAN	PERSAMAAN 1	KETERANGAN	PERSAMAAN 2	KETERANGAN	PERSAMAAN 3
Pengaruh tidak langsung (0,127 x-0,492) MCG→QCG = 0,127, QCG→ Kinerja = -0,492	0,062	Pengaruh tidak langsung (0,097 x-0,492) MCG→QCG = 0,097, QCG→ Kinerja = -0,492	0,048	Pengaruh tidak langsung (0,097 x-0,492) MCG→QCG = 0,097, QCG→ Kinerja = -0,492	0,048
Pengaruh Langsung MCG→ Kinerja = 0,237	0,237	Pengaruh Langsung MCG→ Kinerja = 0,237	0,237	Pengaruh Langsung MCG→ Kinerja = 0,237	0,237
Pengaruh Total = 0.062 + 0,237	0,299	Pengaruh Total = 0.048 + 0,237	0,285	Pengaruh Total = 0.048 + 0,237	0,285
VAF = Pengaruh tidak langsung/ pengaruh total	0,207	VAF = Pengaruh tidak langsung/ pengaruh total	0,205	VAF = Pengaruh tidak langsung/ pengaruh total	0,205

Sumber : data sekunder yang diolah (2019)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai VAF dalam pengujian variabel intervening persamaan 1 sebesar 0,207 (20,7%), persamaan 2 sebesar 0,205 (20,5%), dan persamaan 3 sebesar 0,205 (20,5%). Jika nilai VAF mempunyai interval 20% ≤ VAF≤ 80% artinya bahwa variabel QCG memediasi sebagian *(partial mediation)*. Kesimpulan adalah bahwa QCG mampu memediasi sebagian *(partial mediation)* hubungan antara MCG dan kinerja bank syariah.

4.2.3. Uji Koefisien Determinasi

Peneliti melakukan pengujian koefisien determinasi setiap persamaan struktural Tujuannya untuk mencari model penelitian empiris yang robust dan mengetahui pengaruh dari perbedaan cara perhitungan variabel DPS. Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan koefisien determinasi Model penelitian pengujian pengaruh terhadap kualitas *corporate governance* (QCG) persamaan 1 sebesar 4,2 persen, persamaan 2 sebesar 7,0 persen, dan persamaan 3 sebesar 7,0 persen. Hal itu mengindikasikan bahwa dari ketiga persamaan pengujian koefisien determinasi yang tinggi adalah persamaan kedua dan ketiga dengan menggunakan perhitungan total DPS dan persentase DPS. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel DPS dan MCG dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap QCG sebesar 4,2 persen dan 7,0 persen. Model penelitian pengujian pengaruh terhadap kinerja baik persamaan 1, 2, dan 3 sebesar 34,2 persen. Hal itu menunjukkan bahwa koefisien determinasi dari ketiga persamaan hasilnya adalah sama atau konsisten. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel DPS, MCG, *Size*, dan struktur Kepemilikan dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja sebesar 34,2 persen. Penelitian ini tidak menguji pengaruh masing-masing indikator pembentuk variabel, karena komponen mekanisme *corporate governance* merupakan satu kesatuan dalam membentuk satu konstruk.

Tabel 4.6

Ringkasan Koefisien Determinasi

KETERANGAN	NILAI R^2
PERSAMAAN I	
Pengaruh terhadap QCG	0.042
Pengaruh terhadap Kinerja	0.342
PERSAMAAN II	
Pengaruh terhadap QCG	0.070
Pengaruh terhadap Kinerja	0.342
PERSAMAAN III	
Pengaruh terhadap QCG	0.070
Pengaruh terhadap Kinerja	0.342

Sumber : Hasil Olah Data (2019)

4.3. Pengujian Hipotesis Penelitian

Atas dasar analisa data statistik inferensial yang dilakukan dengan menggunakan Warp PLS, hipotesis dapat diuji dan hasil pengujian statistikanya disajikan sebagai berikut. Ringkasan estimasi koefisien dari luaran Warp PLS adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

NO	HIPOTESIS	SIMPULAN
1	H1 : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kualitas Penerapan *Corporate Governance*	H1 TERBUKTI DIDUKUNG DATA
2	H2 : Kualitas Penerapan *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah	H2 TERBUKTI DIDUKUNG DATA
3	H3 : Mekanisme *Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah	H3 TERBUKTI DIDUKUNG DATA
4	H4 : Kualitas Penerapan *Corporate Governance* memediasi hubungan Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Bank Syariah	H4 TERBUKTI DIDUKUNG DATA
5	H5 : Kualitas Penerapan *Corporate Governance* memediasi hubungan Mekanisme *Corporate Governance* dan Kinerja Bank Syariah	H5 TERBUKTI DIDUKUNG DATA

Sumber: data sekunder yang diolah (2019)

4.3.1. Hasil Analisa Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian regresi (tabel 4.5) menemukan pengaruh signifikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kualitas Penerapan *Corporate Governance* (QCG). Hal itu ditunjukkan dengan tingkat signifikansi persamaan 1 sebesar 0,013; persamaan 2 dan 3 sebesar 0,004 dan nilai estimasi koefisien regresi antara DPS dengan QCG -0,297 untuk persamaan 1 dan -0,295 untuk persamaan 2 dan 3. Karena tingkat signifikansinya 0,013 dan 0.004 lebih kecil dari 0,05 (α = 5 persen), maka hipotesis satu (H1) terbukti didukung data secara empiris. Arah koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini menggunakan nilai komposit yang menunjukkan skor nilai bahwa semakin kecil kriteria pengukuran nilai komposit maka akan semakin baik. Asumsinya bahwa semakin meningkat

peran DPS maka akan semakin meningkatkan nilai komposit peringkat laporan pelaksanaan *corporate governance.*

4.3.2. Hasil Analisa Pengujian Hipotesis 2

Kualitas Penerapan *Corporate Governance* (QCG) berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai estimasi koefisien regresi antara QCG dengan kinerja bank syariah 0,492 (bertanda negatif) dan tingkat signifikansi <0.001. Arah koefisien menunjukkan pengaruh negatif disebabkan satuan pengukuran QCG menunjukkan skala yang berlawanan dari skala 1-5, dimana nilai komposit < 1,5 kriteria "sangat baik" dan nilai komposit 4,5 ≤NK<5 kriteria "tidak baik". Tingkat signifikansinya menunjukkan nilai <0.001 lebih kecil daripada 0,05 (α = 5 persen), maka hipotesis dua (H2) terbukti didukung data secara empiris. Semakin rendah nilai peringkat laporan pelaksanaan *corporate governance* maka justru menunjukkan hasil peringkat yang "sangat baik" sehingga kinerja bank syariah semakin meningkat.

4.3.3. Hasil Analisa Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian regresi pada tabel 4.5 menemukan pengaruh signifikan positif Mekanisme *Corporate Governance* (MCG) terhadap kinerja Bank Syariah. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,017 untuk persamaan 1, 2, dan 3. Nilai estimasi koefisien regresi antara Mekanisme *Corporate Governance* (MCG) dengan kinerja bank syariah 0,237 (bertanda positif). Karena tingkat signifikansinya 0,017 lebih kecil daripada 0,05 (α = 5 persen), maka hipotesis tiga (H3) terbukti didukung data secara empiris. Arah koefisien regresi menunjukkan nilai positif artinya bahwa semakin baik Mekanisme *Corporate Governance* di bank syariah maka akan meningkatkan kinerja bank syariah.

4.3.4. Hasil Analisa Pengujian Hipotesis 4

Berdasarkan pengujian efek mediasi dengan nilai VAF pada tabel 4.6 menyatakan bahwa variabel Kualitas Penerapan *Corporate Governance* (QCG) mampu memediasi secara parsial hubungan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kinerja Bank Syariah. Hasil pengujian menunjukkan nilai VAF sebesar 34,9% untuk persamaan 1 dan persamaan 2 dan 3 sebesar 33,4% artinya nilai tersebut dalam interval 20%-80% sehingga masuk dalam kategori mediasi sebagian *(partial mediation)*. Variabel DPS berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah dengan adanya peningkatan Kualitas Penerapan *Corporate Governance* (QCG), maka hipotesis empat (H4) terbukti didukung data secara empiris.

4.3.5. Hasil Analisa Pengujian Hipotesis 5

Berdasarkan pengujian efek mediasi dengan nilai VAF pada tabel 4.7 menyatakan bahwa variabel Kualitas Penerapan *Corporate Governance* (QCG) mampu memediasi secara partial hubungan Mekanisme *Corporate Governance* (MCG) dan kinerja bank syariah. Hasil pengujian menunjukkan nilai VAF sebesar 20,7% untuk persamaan 1 dan persamaan 2 dan 3 sebesar 20,5% artinya nilai tersebut dalam interval 20%-80% sehingga masuk dalam kategori mediasi sebagian *(partial mediation)*. Variabel Mekanisme *Corporate Governance* (MCG) berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah melalui peningkatan QCG, maka hipotesis lima (H5) terbukti didukung data secara empiris.

4.4. Hasil Pengujian Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu variabel ukuran perusahaan (*size*) dan struktur kepemilikan dan komposisi pengendalian. Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang dapat menentukan tingkat kepercayaan investor. Semakin besar perusahaan maka akan semakin dikenal oleh masyarakat sehingga akan semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang dapat meningkatkan kinerja keuangan Bank Syariah. Perusahaan besar yang memiliki total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar dapat

menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Dalam hal ini ukuran perusahaan dilihat dari total *asset* yang dimiliki oleh perusahaan. Struktur kepemilikan dan komposisi pengendalian digunakan karena merupakan bagian dari mekanisme *Corporate Governance* yang termasuk dalam mekanisme pengawasan atau *monitoring*. Mekanisme *monitoring* dilakukan untuk mengurangi masalah keagenan.

4.4.1. Ukuran Perusahaan

Berdasarkan hasil analisa data menunjukkan bahwa variabel *size* sebagai variabel kontrol dalam persamaan 1, 2, dan 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,257 (p-value) dengan nilai koefisien 0.075 (bertanda positif), artinya variabel *size* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bank Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah di Indonesia sebagian besar assetnya merupakan bagian *asset* dari Bank Konvensional sehingga ukuran perusahaan atau *size* tidak mempengaruhi kinerja Bank Syariah. Fenomena di Indonesia bahwa Bank Syariah belum sanggup untuk berdiri sendiri tanpa bantuan dari Bank Konvensional yang menaunginya. Bank Syariah di Indonesia banyak yang belum *go public* sehingga memperkuat hasil temuan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan sampel perusahaan sektor perbankan atau sektor keuangan dimana semuanya sudah *go public* atau *listing* di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian tersebut adalah berpengaruh signifikan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian di perusahaan perbankan di Indonesia menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar memiliki akses pasar yang lebih baik daripada perusahaan kecil dan memiliki kegiatan operasional yang lebih besar, sehingga kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Purnomosidi, et al. 2014). Perusahaan besar memiliki pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, sehingga tingkat pengembalian saham perusahaan besar lebih besar dari *return* saham

perusahaan skala kecil. Persistensi profitabilitas lebih besar di perusahaan besar, karena dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, yang lebih besar memiliki lebih banyak akses ke sumber daya dan akibatnya mereka memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk perubahan pasar yang dinamis (Salman dan Yasdanfar 2012). Dengan kondisi itu, ada hubungan positif antara ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomosidi, et al (2014), ukuran perusahaan yang mempunyai dampak positif pada nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Amameh (2014); El Chaarani (2014) juga menunjukkan hasil yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan kinerja perusahaam. Penelitian lain yang dilakukan oleh Gill dan Marthur (2011) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Nur'ainy et al (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian Tertius dan Chirstiawan (2015) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA untuk perusahaan sektor keuangan.

4.4.2.Struktur Kepemilikan

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yaitu struktur kepemilikan dan komposisi pengendalian saham. Struktur kepemilikan diukur dengan 5 (lima) struktur kepemilikan yaitu (1) persentase kepemilikan institusi; (2) persentase kepemilikan publik; (3) persentase kepemilikan pemerintah; (4) persentase kepemilikan manajerial; dan (5) persentase kepemilikan individu. Pengukuran komposisi pengendalian saham menggunakan pengukuran Berle & Means (1934) yaitu: (1) *Private Ownership* > 80%; (2) *Majority Control* 50-80%; (3) *Minority Control* 20-50%; dan (4) *Management Control* < 20%. Pada saat proses analisa data dengan metode SEM-PLS indikator variabel struktur kepemilikan dan komposisi pengendalian yaitu kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajemen, *majority control* 50-80%, dan *management control* 20% di keluarkan oleh sistem saat proses analisa data.

Sehingga indikator pengukuran variabel struktur kepemilikan dan komposisi pengendalian yang digunakan adalah kepemilikan publik, kepemilikan individu, *privat ownership* > 80%, dan *Minority Control* 20-50% .

Hasil analisa data menunjukkan bahwa variabel kontrol struktur kepemilikan dan komposisi pengendalian untuk persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 nilai signifikansinya 0,018 (p-value) dan nilai keofisien positif 0,234, artinya bahwa variabel struktur kepemilikan dan komposisi pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Bank Syariah. Berdasarkan data distribusi frekuensi struktur kepemilikan Bank Syariah di Indonesia kebanyakan adalah kepemilikan institusi sebesar 91,9%, kepemilikan publik sebesar 38,9%, dan kepemilikan individu sebesar 37,5%, sedangkan komposisi pengendalian kebanyakan adalah *privat ownership* > 80% sebesar 66,7% dan *Minority Control* 20-50% sebesar 27,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan Bank Syariah di Indonesia paling tinggi adalah kepemilikan institusi kemudian diikuti kepemilikan individu. Sebagian besar Bank Syariah masih menggunakan modal dari Bank Konvensional yang menaungi Bank syariah tersebut dan juga investor yang berasal dari Bank Konvensional. Hal itu disebabkan sebagian Bank Syariah di Indonesia masih belum cukup kuat dari segi permodalan untuk berdiri sendiri dan juga sebagian besar belum *go public* atau *listing* di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan komposisi pengendalian yang paling tinggi adalah *privat ownership* dan diikuti oleh *Minority Control*, hal itu mengindikasikan pengendalian kepemilikan dalam Bank Syariah dilihat dari prosentasenya masih di dominasi oleh kepemilikan *private* yaitu diatas 80% lalu diikuti dengan *Minority Control* sekitar 20-50%. Dalam hal pengendalian saham *private ownership* sangatlah dominan di Bank Syariah di Indonesia.

4.5.Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kualitas Penerapan *Corporate Governance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Penerapan *Corporate Governance* (QCG). Hasil ini didukung dengan data bahwa total skor Dewan Pengawas Syariah (TDPS) menunjukkan nilai rata-rata 11,03 dan prosentase Dewan Pengawas Syariah (PDPS) sebesar 61,26% artinya bahwa secara keseluruhan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diukur oleh 18 item pernyataan menunjukkan nilai yang cukup tinggi sehingga akan menaikkan kualitas penerapan *Corporate Governance*. Pengukuran variabel Dewan Pengawas Syariah menggunakan 18 item dengan skor 0 (nol) dan 1 (satu), sehingga apabila nilai skor total Dewan Pengawas Syariah (TDPS) 10 maka bisa dikatakan cukup tinggi seusai dengan prosentase frekuensi total DPS yang mempunyai nilai tertinggi yaitu sebesar 30,6%. Hasil penelitian ini berpengaruh signifikan disebabkan antara lain: (1) DPS sudah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga kualitas dari pelaksanaan tugas tersebut sudah maksimal; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi jabatan sebagai DPS. Kebanyakan yang menjadi DPS meruapakan tokoh agama atau tokoh masyarakat sehingga diharapkan mempunyai standar kompetensi yang memadai dengan melalui pengujian *"fit proper test"*. Tugas dan kewajiban yang besar dengan menjalankan pengawasan aspek syariah di bank beserta cabang-cabangnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia; dan (3) Dalam hal regulasi, peraturan di Indonesia khususnya SK DSN-MUI memiliki pengukuran yang jelas untuk menilai dan memastikan apakah peran DPS telah sesuai aturan atau belum dengan ketentuan yang dimaksud. Pemerintah berusaha meningkatkan regulasi untuk mendorong kualitas implementasi dari peran DPS di Bank Syariah sehingga semakin meningkat. Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah

(BUS) dan unit usaha syariah diterbitkan dengan mengacu kepada SK DSN yang diterbitkan oleh DSN MUI. Untuk itu, PBI No. 11/33/PBI/2009 dan SK DSN-MUI memiliki sasaran dan tujuan yang sama yakni menjadi pedoman bagi perbankan syariah di Indonesia untuk menjalankan operasi bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah dan membantu perbankan syariah untuk mampu bersaing dengan perbaikan secara keseluruhan. PBI ini mengatur hal-hal yang lebih detail dibandingkan SK DSN-MUI, namun masih tetap sulit untuk ditentukan tolok ukurnya. Untuk itu, dibutuhkan regulasi di Indonesia yang memiliki pengukuran yang jelas dan terarah. Regulasi ini kemudian dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya. Isu terkini yang muncul mengenai DPS adalah terkait kualifikasi DPS. Saat ini beberapa DPS sudah mempunyai sertifikasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas anggota DPS sebagai penasehat syariah yang mumpuni.

Di Indonesia terdapat tiga level sertifikasi Karim (2000) yaitu : (1) *Level Basic* (Pengenalan industri sesuai jenis industrinya), (2) *Level Intermediate* (pengawas syariah), dan (3) *Level Advance* (metode penyusunan opini syariah DPS). Kebanyakan DPS di Indonesia hanya berada pada sertifikasi di *level basic*. Untuk memiliki kualifikasi sebagai DPS yang handal dibidangnya maka sebaiknya jika DPS memenuhi ketiga level sertifikasi. Diharapkan dengan mengikuti ketiga level sertifikasi, DPS dapat menerapkan pengawasan yang lebih baik. Temuan ini sesuai dengan *Resource Dependence Theory*. Teori ini berasumsi bahwa peran sumber daya manusia sangat menentukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dengan sumber daya yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi tertentu sesuai bidang keilmuan dan kepakarannya dalam suatu organisasi atau perusahaan maka dapat meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam bank syariah kewenangan masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) direpresentasikan melalui DPS yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan

unit usaha syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah harus diwujudkan dalam seluruh transaksi yang dilakukan oleh bank syariah dalam pengawasan DPS. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPKLS) diantara prinsip yang harus dilaksanakan oleh bank syariah adalah Keadilan, Kemaslahatan, dan Keseimbangan. Anggota DPS selain memahami *fiqh muamalah* juga memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter. Selain itu tingkat kehadiran DPS merupakan penagawasan dalam penerapan kualitas *corporate governance*, DPS walaupun hanya datang secara berkala misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali namun tetap memberikan kontribusi masukan dan saran. Bank Syariah wajib memiliki DPS minimal 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Menurut Suprayogi, N (2007) terdapat 3 (tiga) model DPS di perbankan Syariah yaitu (1) *Advisor model*, dimana DPS bertindak sebagai *advisor* dan bekerja secara *part time* dan datang ke bank jika dibutuhkan; (2) *Supervisor Model*, DPS berfungsi sebagai pengawas yang melakukan diskusi rutin dengan manajemen terkait pemenuhan prinsip dalam produk, jasa dan operasional; dan (3) *Sharia Department Model*, organisasi DPS yang berbentuk *departemen* khusus yang bekerja secara *full time* dan dibantu oleh staf dalam melakukan pengawasan di bawah pengawasan seorang ahli.

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa terdapat empat Bank Syariah yang mempunyai skor 10 dengan kata lain terdapat sekitar 30,6% atau 22 sampel Bank Syariah dari 72 keseluruhan sampel selama periode penelitian 2010-2017. Adapun Bank Syariah yang mempunyai skor 10 adalah Bank BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BCA Syariah dan Bank Panin Syariah. Sedangkan Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah mempunyai diatas 10. Skor 10 artinya bahwa dari 18 item pernyataan yang menyebutkan kriteria pengukuran yang menunjukkan peran dan tugas Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi adalah 10 item atau lebih dari 50% item terpenuhi. Kriteria

pengukuran menggunakan pedoman dari *Operating Procedures of the Shariah Board yang terdapat dalam Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang merupakan *Guiding Principles On Shariah Governance System for Institutions Offering Islamic Financial Service* dengan lima indikator yaitu independensi, kompetensi, komunikasi, komposisi dan performa. Berdasarkan data menunjukkan dari sembilan (9) Bank Syariah yang memenuhi kriteria sampel yang mempunyai skor ≥ 10 terdapat tujuh (7) Bank Syariah. Hal itu menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah sebagian besar di Bank Syariah di Indonesia sudah memenuhi kriteria dari lima indikator pengukuran yaitu: independensi, kompetensi, komunikasi, komposisi, dan performa.

Peran Dewan Pengawas Syariah dihubungkan dengan kualitas penerapan *corporate governance* yang diukur dengan nilai komposit menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan tugasnya sudah memenuhi dari lima indikator yaitu independensi, kompetensi, komunikasi, komposisi, dan performa sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan *corporate governance* dan ditunjukkan dengan nilai komposit memenuhi kriteria baik dan sangat baik. Independensi dapat dilihat dari rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah. Peraturan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa jumlah anggota DPS sedikitnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya setengah dari jumlah direksi dan harus mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Namun berkaitan dengan rangkap jabatan DPS di berbagai Bank Syariah, mengingat banyaknya DPS yang mengawasi 4 atau 3 Bank Syariah, selain mengawasi lembaga keuangan syariah non perbankan lainnya. Kriteria DPS berikutnya adalah kompetensi dilihat dari tingkat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman bidang ilmu keuangan dan atau bidang ilmu Syariah Muamalah. Berdasarkan data menunjukkan bahwa Bank Syariah di Indonesia mempunyai DPS yang rata-rata memiliki kompetensi di bidang keuangan dan atau perbankan, sedangkan DPS yang memiliki

bidang ilmu Syariah Muamalah saja dan gabungan antara keduanya hanya dua Bank Syariah saja yaitu Bank BCA Syariah dan Bank Bukopin Syariah. Hal itu mengindikasikan bahwa tingkat kompetensi DPS di Bank Syariah di Indonesia sebagian besar memiliki bidang ilmu keuangan dan atau perbankan sehingga lebih memahami transaksi di sektor perbankan. DPS yang memiliki bidang ilmu keuangan dan atau perbankan rata-rata mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Syariah dan Fiqh Al-Muamalat sehingga bisa lebih memahami transaksi perbankan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Kriteria DPS dilihat dari tingkat komunikasi di Bank Syariah di ukur dengan tingkat frekuensi rapat. DPS di Bank Syariah di Indonesia mengadakan rapat minimal dua kali dalam setahun dan semuanya memenuhi *quorum for meeting*. Komposisi DPS di Bank Syariah di Indonesia sebagian besar terdiri dari dua orang yaitu satu orang ketua dan satu orang anggota hal itu sesuai dengan ketentuan PBI No.11/33/PBI/2009. Kriteria DPS terakhir yaitu terkait performa diukur dari pelaporan yang dilakukan DPS terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dan juga sanksi yang diberikan apabila ada penyimpangan yang dilakukan oleh DPS. Sebagian besar Bank Syariah di Indonesia memberikan sanksi kepada DPS apabila ada penyimpangan dari pemenuhan prinsip syariah namun sejauh ini tidak banyak pelaporan yang menunjukkan ada DPS yang melakukan penyimpangan tersebut. Terkait pelaporan untuk pengembangan desain produk dan pelaporan adanya pengajuan produk baru yang memenuhi prinsip syariah sebagian besar sudah dilaporkan oleh Bank Syariah di Indonesia.

Berdasarkan pengumpulan data DPS yang memenuhi kriteria dapat meningkatkan nilai komposit yang digunakan sebagai indikator pengukuran Kualitas Penerapan *Corporate Governance* yang diukur dengan nilai komposit dari Laporan Pelaksanaan *Corporate Governance*. Skor nilai komposit lima Bank Syariah di Indonesia menunjukkan kategori "baik" (1,5≤ nilai komposit< 2,5) dan "sangat baik" (nilai komposit<1,5) artinya bahwa sebagian besar Bank Syariah di Indonesia yang memenuhi kriteria pengukuran DPS dapat

meningkatkan Kualitas Penerapan *Corporate Governance* dari laporan *self assesment* Laporan Pelaksanaan *Corporate Governance*.

Tabel 4.8.

Nilai Total DPS, Nilai Komposit, ROA dan ROE

TAHUN	NAMA BANK	SKOR TOTAL DPS	NILAI KOMPOSIT	ROA	ROE
2010	Bank Bukopin Syariah	10	1,60	0,74	9,65
2010	Bank BNI Syariah	10	1,63	0,61	3,65
2011	Bank Bukopin Syariah	10	1,60	0,52	6,19
2012	Bank Bukopin Syariah	10	1,50	0,55	7,32
2013	Bank BCA Syariah	10	1,55	1,01	2,90
2013	Bank Panin Syariah	10	1,35	1,03	4,44
2014	Bank BCA Syariah	10	1,00	0,80	4,30
2014	Bank Bukopin Syariah	10	1,50	0,27	2,44
2015	Bank Bukopin Syariah	10	1,50	0,79	5,35
2015	Bank Panin Syariah	10	2,00	1,14	4,94
2016	Bank Panin Syariah	10	2,00	0,37	1,76
2016	Bank Bukopin Syariah	10	1,50	1,12	13,74
2017	Bank Bukopin Syariah	10	1,50	0,02	0,20
2017	Bank Panin Syariah	10	2,00	0,77	9,01

Sumber : data sekunder yang diolah (2019)

4.5.2.Pengaruh Kualitas Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Bank Syariah

Berdasarkan analisa data menunjukkan bahwa kualitas penerapan *corporate governance* berpangaruh signifikan negatif terhadap kinerja. Penelitian ini sesuai dengan *agency theory* yang menyatakan bahwa untuk mengurangi masalah keagenan maka dilakukan *monitoring* dengan menerapkan laporan pelaksanaan *corporate governance* bagi bank Syariah. Hasil penelitian ini membuktikan adanya pendekatan institusional yang disebut *New Institusional Economics* (NIE) *Analysis* (Lukviarman dan Johan 2018). Pendekatan NIE menggunakan organisasi sebagai dasar unit analisis di dalam meneliti bagaimana berbagai institusi dibentuk, berinteraksi dan berjalan dan didasarkan pada keberadaan institusi secara formal maupun informal. Dengan demikian keberadaan hukum dianggap sebagai suatu institusi ketika hukum akan beriteraksi dengan institusi lain yang kurang formal seperti

mekanisme pasar, *code of best practices*, norma sosial, dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat.

Fokus pembahasan *governance* menggunakan pendekatan institusional tentunya menjadi terfokus kepada aturan formal serta aturan informal. Interaksi antara kedua aturan tersebut akan menentukan dan memberi warna dari praktik *corporate governance*, regulasi keuangan serta mekanisme pasar. Menurut Aktan et al (2018), aturan formal mengalami perubahan secara cepat dan tidak terduga yang akan diwujudkan dalam bentuk aturan hukum yang baru, struktur regulasi baru. Sementara aturan yang bersifat informal juga mengalami perubahan, namun bersifat lebih lambat dan cenderung bersifat *incremental* bila dibandingkan dengan aturan formal.

Dalam penelitian ini kualitas *corporate governance* diukur dengan laporan pelaksanaan GCG dari hasil evaluasi *self assessment* terdapat 11 item berdasarkan dari Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dan kinerja diukur dengan profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan arah koefisien yang negatif hal itu disebabkan penilaian laporan *self assessment* tersebut akan muncul perhitungan nilai komposit yang menunjukkan peringkat "sangat baik" (nilai =1) dan "tidak baik" (nilai=5) sehingga menunjukkan hasil yang berlawanan arah koefisiennya. Semakin baik kriteria suatu bank maka nilai yang dihasilkan akan semakin kecil dan rata-rata nilai komposit GCG berkisar 1-2,5 sehingga dalam peringkat sangat baik sampai dengan baik.

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa rata-rata bank Syariah memiliki kualitas *corporate governance* yang sangat baik hal ini disebabkan tuntutan regulasi dari pemerintah yang mewajibkan setiap bank baik bank syariah maupun bank konvensional untuk membuat laporan pelaksanaan *corporate governance*. Kualitas *corporate governance* yang semakin baik akan meningkatkan kinerja keuangan bank syariah dan akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu kualitas *coporate governance* yang baik

akan mendorong bank Syariah untuk menjunjung nilai-nilai syariah yang dimasukkan ke dalam prinsip syariah agar dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara professional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial agar berjalan sesuai dengan aturan main dan *best practice* yang berlaku.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian *corporate governance* bank syariah di Indonesia yaitu (Daniri 2005; Ur Rehman dan Mangala 2013; Aktan et al 2018) yang menyatakan bahwa esensi *corporate governance* akan menjaga kelangsungan usaha, baik profitabilitasnya maupun pertumbuhannya. Rasio ROA menunjukkan seberapa besar laba bersih yang bisa diperoleh dari kekayaan yang dimiliki perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Pelaksanan *corporate governance* yang baik yang tercermin dalam laporan *self assessment* mampu meningkatkan *asset* yang dimiliki. Pengelolaan yang baik mampu mendorong efektivitas penggunaan *asset* dan meningkatkan kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih, sehingga mampu menaikkan rasio profitabilitas. Rasio ROE sangat erat berkaitan dengan pemegang saham. Prinsip dasar pemegang saham saat menanamkan modalnya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal. Pemegang saham tentunya memiliki keterbatasan dalam mengelola perusahaan sehingga pihak pengelola (*agent*) harus menerapkan prinsip transparansi dalam melaporkan semua kegiatan perusahaan. Hal ini akan menguruangi konflik keagenan antara pemegang saham dan pengelola perusahaan karena adanya *monitoring* yang mengawasi pihak pengelola perusahaan untuk membatasi kepentingan pribadi. Jadi kualitas penerapan *corporate governance* berpengaruh pada peningkatan deviden perusahaan sehingga deviden yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham lebih tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan *agency theory*.

Kualitas penerapan *corporate governance* akan membuat investor memberikan respon yang positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Sejalan dengan

landasan filosofi bahwa *corporate governance* didasarkan pada perlunya "regulasi" yang akan mengatur *stakeholder* di dalam melaksanakan aktivitasnya, maka seperangkat aturan (*law and regulation*) dan penegakkannya (*enforcement*) menjadi sangat penting dan krusial. Secara umum semua aturan disusun dengan mengacu kepada kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penerapan *corporate governance* pada dasarnya tidak akan menimbulkan konflik kepentingan, karena didasarkan nilai-nilai moral yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Lukviarman 2016).

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai komposit laporan *self assessment* mengalami peningkatan yang akan meningkatkan kinerja Bank Syariah yang di ukur dengan tingkat profitabilitas. Bank BNI Syariah pada tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan nilai komposit yaitu sebesar 1,30 (kategori "sangat baik") menjadi 1.20 (kategori "sangat baik"). Asumsinya nilai komposit laporan *self assessment* semakin kecil maka akan semakin baik. Nilai komposit yang meningkat akan meningkatkan kinerja Bank Syariah dilihat dari tingkat profitabililtasnya yaitu sebesar ROA sebesar 1,17% (kategori "cukup baik") menjadi 1,37% (kategori "baik") dan nilai ROE sebesar 11,73 (kategori "cukup baik") menjadi 12,83 (kategori "baik"). Bank BNI Syariah tahun 2016 dan 2017 juga mengalami peningkatan nilai komposit laporan *self assessment* yaitu sebesar 1,80 (kategori "baik") menjadi 1,20 (karegori "sangat baik"). Peningkatan nilai komposit juga diikuti dengan kenaikan kinerja Bank Syariah dilihat dari tingkat profitabilitasnya yaitu nilai ROA sebesar 1,44% (kategori "baik") menjadi 1,61% (kategori "sangat baik") dan nilai ROE sebesar 11,94% (kategori "cukup baik") menjadi 12,42% (kategori "baik").

Tahun 2011 dan 2012 Bank BRI Syariah mengalami peningkatan nilai komposit laporan *self assessment* yaitu sebesar 1,55 menjadi 1,38. Peningkatan nilai komposit juga diikuti kenaikan kinerja Bank BRI Syariah yang diukur dengan tingkat profitabilitas. Nilai ROA tahun 2011 sebesar 1,30% (kategori "baik") menjadi 1,65% (kategori "sangat baik")

dan nilai ROE sebesar 11,29% (kategori "cukup baik") menjadi 12,41% (kategori "baik"). Bank BRI tahun 2015 dan 2016 juga mengalami peningkatan nilai komposit laporan *self assessmen* yaitu sebesar 1,61 (kategori "baik") menjadi 1,40 (kategori "sangat baik"). Kinerja Bank BRI Syariah juga meningkat diukur dari tingkat profitabilitas yaitu nilai ROA tahun 2015 sebesar 1,76% (kategori "baik") menjadi 1,95% (kategori "baik") dan nilai ROE sebesar 11,20% (kategori "cukup baik") menjadi 12,55% (kategori "baik").

Beberapa penelitian sebelumnya yang menguji kualitas penerapan *corporate governance* dengan beberapa macam pengukuran antara lain Jiang, Lee dan Anandarajan (2008) menggunakan *Gov-score* yang terdiri dari 51 konstruk, Larcker, Richardson dan Tuna (2007) dengan 14 pengukuran *corporate governance*, Jiang dan Peng (2011) dengan indeks Gompers yang terdiri dari 24 item CG, Syam dan Nadja (2012) meneliti *Corporate Governance Index* (CGPI) di Indonesia, Cheung, Strouraitis dan Tan (2010) meneliti *Corporate Governance Index* (CGI) di Hongkong, dan Hegazy dan Hegazy (2010) meneliti *United Kingdom Corporate Governance* (UK CG) di Inggris.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu Klapper dan Love (2004); Black, Jang dan Kim (2006); Brown dan Caylor (2006); Chen dan Thomas (2000); Chen, Chen dan He (2008); Chalhoub (2009); Khatab et al (2011). Sedangkan beberapa penelitian di Indonesia antara lain Syam dan Nadja (2012); Triyono (2012); Bukair dan Rahman (2015); Siagian, Siregar dan Rahadian (2013); Husnin, Pratiwi (2016).

4.5.3.Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Bank Syariah

Berdasarkan hasil analisa data menunjukkan Mekanisme *Corporate Governance* (MCG) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja bank syariah. Temuan penelitian sejalan dengan *agency theory* yang menggunakan asumsi bahwa kedua pihak tersebut yaitu *agent* dan *principal* memiliki kepentingan masing-masing dan kepentingan tersebut lebih banyak mengalami perbedaan dari sudut pandang keduanya. Keinginan yang berbeda tersebut

membutuhkan adanya mekanisme yang dapat digunakan *principal* untuk senantiasa memonitor *agent*. *Agency Theory* menyatakan adanya struktur organisasi mampu menciptakan sistem yang efisien di dalam mengatur kerjasama antara kedua pihak yang berhubungan. Di samping itu *agency theory* meyakini bahwa struktur organisasi maupun mekanisme pengendalian berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya hal tersebut ditentukan oleh *information asymmetry* antara *principal* dan *agent*.

Efektivitas *corporate governance* ditentukan oleh bagaimana mekanisme *corporate governance* tersebut bekerja dalam perusahaan. Sebaik apapun struktur *corporate governance* tetapi jika mekanismenya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka peningkatan kinerja tidak akan tercapai. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa mekanisme *governance* dibutuhkan sebagai bagian penting dalam kerangka *corporate governance* karena dapat memberikan jaminan bahwa setiap investor dapat memperoleh pengembalian dari setiap investasi yang dilakukannya. Sehingga kebutuhan akan mekanisme *governance* merupakan hal yang krusial untuk dapat diterapkannya konsepsi *governance* secara lebih baik (Z. Hasan 2012). Mekanisme *governance* dapat dikategorikan secara umum berdasarkan karakteristiknya yaitu mekanisme internal dan eksternal. Tujuan utama mekanisme internal adalah sebagai perangkat *early warning system* di dalam memposisikan organisasi sebelum berbagai kesulitan yang dihadapinya mencapai tahapan yang mengkhawatirkan (Johnes, Izzedin dan Pappas 2013). Fungsi mekanisme *corporate governance* adalah *monitoring* / pengawasan yang dilakukan oleh struktur organisasi dalam perusahaan diantaranya adalah dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan (Denis dan Mc Connel 2003). Dalam penelitian ini pengujian yang dilakukan terhadap mekanisme internal yang terdiri dari Dewan Direksi dan Komite Audit.

GCG pada dasarnya berkaitan dengan cara semua *stakeholder* berusaha untuk memastikan bahwa para manajer dan karyawan internal lainnya selalu mengambil langkah-

langkah yang tepat atau mengadopsi mekanisme yang melindungi kepentingan *stakeholder* (Hamza 2016). Selain itu, GCG juga menetapkan bagaimana berbagai pemegang saham dan pemangku kepentingan, manajemen, dan dewan direksi berinteraksi dalam menentukan arah dan kinerja (Al-Hawary 2011). Penelitian *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dalam Jaffar dan Abdul Shukor (2016) menemukan bahwa "alasan utama perusahaan menerapkan GCG adalah kepatuhan terhadap peraturan". Perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi GCG berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan.

Hasil pengujian hipotesis ini didukung dengan pengujian masing-masing indikator yang membentuk mekanisme *corporate governance* menunjukkan bahwa dewan direksi dan komite audit berpengaruh signifikan positif. Hal itu menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi maka semakin meningkatkan kinerja keuangan. Hal tersebut konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya antara lain Chiang (2005); Alonso dan Gonzales (2006); Spong dan Sullivan (2007); Kim, Rasiah dan Tasnim (2013)**.** Menurut (Nicholson dan Kiel 2007; Van den Berghe dan Levrau 2004; Mahmood dan Abbas 2013) bahwa ukuran dewan direksi yang besar dapat meningkatkan kinerja melalui kemampuan perusahaan dalam mengelola perusahaan. Banerji dan Sambharya (1996) meneliti mengenai pengaruh dewan direksi terhadap kinerja dapat meningkatkan akses dengan supplier, Korac-Kakabadse, Kakabadse dan Kouzmin (2001) meningkatkan aliansi dengan *stakeholder* lainnya. Ukuran dewan direksi yang besar diasumsikan akan meningkatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki perusahaan walaupun ada beberapa masalah (Dalton, Daily dan A 1999).

Fungsi komite audit yang mempunyai kompetensi profesional sebagai auditor penting bagi peningkatan kinerja. Komite audit harus mempunyai staf yang memiliki keahlian yang sesuai dan kompetensi teknis yang bebas dari tanggung jawab operasional. Komite audit

harus secara rutin melaporkan ke Dewan Direksi dan manajemen mengenai kinerjanya. Dan diharapkan laporan dan rekomendasi dari komite audit diimplementasikan dan memastikan bahwa fungsi komite audit tidak dibawah tekanan dari manajemen untuk menghasilkan laporan yang menguntungkan (Chapra dan Ahmed 2002). Fungsi komite audit mendukung dewan direksi dalam memberikan saran yang objektif dalam tingkat resiko, kontrol dan *corporate governance* (Owolabi dan Dada 2011). Peran komite audit sangat dibutuhkan agar investor lebih mempercayai tidak ada kecurangan dalam praktik bisnis Aurthur Devitt (1998) dalam (Owolabi dan Dada 2011).

Perusahaan yang mempraktikan GCG, akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan nilai perusahaan. Keberadaan *governance system* diharapkan berfungsi sebagai pengendali untuk menjamin bahwa praktik bisnis yang dilakukan tidak merugikan masing-masing pihak. Dalam kaitan ini *governance outcomes* yang diharapkan adalah berupa berkurangnya konflik kepentingan antara pihak yang terlibat dalam perusahaan. Hal ini terutama dibutuhkan pada berbagai negara dengan tingkat proteksi kepentingan investor minoritas relatif rendah seperti terdapat di Indonesia serta negara berkembang lainnya (La Porta, et al. 2002). Hasil akhir dari berbagai *governance outcomes* tersebut akan direalisasikan melalui peningkatan kinerja perusahaan (Borsch-Supan dan Koke 2002). Sejalan dengan penelitian sebelumnya Black, Jang dan Kim (2006); Gompers, Ishii dan Metrick (2003); Drobetz, Schillhofer dan H (2004) bahwa praktik *corporate governance* meningkatkan kinerja. Kalpper dan Love (2004) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan *Tobin's Q*. Dengan kata lain diterapkan mekanisme *corporate governance* dalam suatu perusahaan akan meningkatkan kinerja. Hasil-hasil penelitian tersebut secara empiris dapat menjelaskan bahwa *corporate governance* yang diukur secara berbeda-beda berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya pada perusahaan di AS Fama dan Jensen

(1983); Sheilfer dan Vishny (1997); Hilamn dan Dalziel (2003); Nicholson dan Kiel (2007); Chugh, Meador dan Kumar (2011) meneliti perusahaan di India.

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa terdapat dua Bank Syariah yaitu Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah dari tahun 2010-2017 mempunyai peningkatan kinerja keuangan dilihat dari tingkat profitabilitas. Mekanisne *Corporate Governance* yang diukur dengan Dewan Direksi dan Komite Audit berpengaruh posistif signifikan terhadap kinerja Syariah. Data menunjukkan bahwa Bank BNI Syariah tahun 2013 mengalami peningkatan di tahun 2014 dimana jumlah Dewan Direksi meningkat secara kuantitas yaitu dari 3 menjadi 4 orang dan Komite Audit juga mengalami peningkatan dari 5 menjadi 6 orang. Peningkatan jumlah Dewan Direksi dan Komite Audit diikuti dengan peningkatan tingkat profitabilitas yaitu nilai ROA sebesar 1,17% (kategori "cukup baik") menjadi 1,37% (kategori "baik") dan nilai ROE sebesar 11,73 (kategori "cukup baik") menjadi 12,83 (kategori "baik"). Bank BNI Syariah juga mengalami peningkatan tahun 2016 dan tahun 2017, Dewan Direksi sebanyak 4 orang meningkat menjadi 5 orang dan Komite Audit sebanyak 5 orang meningkat menjadi 6 orang. Hal tersebut diikuti dengan meningkatnya nilai ROA sebesar 1,44% (kategori "baik") menjadi 1,61% (kategori "sangat baik") dan nilai ROE sebesar 11,94% (kategori "cukup baik") menjadi 12,42% (kategori "baik").

Bank BRI Syariah pada tahun 2011 juga mengalami peningkatan di tahun 2012. Jumlah Dewan Direksi dan Komite Audit tahun 2011 sebanyak 4 orang menjadi 5 orang pada tahun 2012. Peningkatan jumlah Dewan Direksi dan Komite Audit juga diikuti dengan peningkatan kinerja Bank Syariah yang diukur dengan tingkat profitabilitas. Nilai ROA tahun 2011 sebesar 1,30% (kategori "baik") menjadi 1,65% (kategori "sangat baik") dan nilai ROE sebesar 11,29% (kategori "cukup baik") menjadi 12,41% (kategori "baik").

Pada tahun 2015 Bank BRI Syariah juga mengalami peningkatan, jumlah Dewan Direksi sebanyak 4 orang menjadi 5 orang dan Komite Audit sebanyak 5 orang menjadi 6 orang.

Nilai ROA tahun 2015 sebesar 1,76% (kategori "baik") menjadi 1,95% (kategori "baik") dan nilai ROE sebesar 11,20% (kategori "cukup baik") menjadi 12,55% (kategori "baik").

Tabel 4.9.

Jumlah Komite Audit, Jumlah Dewan Direksi, Nilai Komposit, ROA dan ROE

TAHUN	NAMA BANK	JUMLAH KOMITE AUDIT	JUMLAH DEWAN DIREKSI	NILAI KOMPOSIT	ROA	ROE
2012	Bank BNI Syariah	4	3	1,25	1,48	10,18
2013	Bank BNI Syariah	5	3	1,30	1,17	11,73
2014	Bank BNI Syariah	6	4	1,20	1,27	12,83
2015	Bank BNI Syariah	5	4	2,00	1,43	11,39
2016	Bank BNI Syariah	5	4	1,80	1,44	11,94
2017	Bank BNI Syariah	6	5	1,20	1,61	12,42
2010	Bank BRI Syariah	4	4	1,61	1,20	11,28
2011	Bank BRI Syariah	4	4	1,55	1,30	11,29
2012	Bank BRI Syariah	5	5	1,38	1,65	12,41
2013	Bank BRI Syariah	4	5	1,35	1,20	10,20
2014	Bank BRI Syariah	4	4	1,86	1,08	10,44
2015	Bank BRI Syariah	5	4	1,61	1,76	11,20
2016	Bank BRI Syariah	6	5	1,40	1,95	12,55
2017	Bank BRI Syariah	6	5	1,57	1,51	12,10

Sumber : data sekunder yang diolah (2019)

4.5.4. Pengaruh Kualitas Penerapan *Corporate Governance* dalam memediasi Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Bank Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas *Penerapan Corporate Governance* mampu memediasi hubungan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Kinerja Bank Syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kualitas Penerapan *Corporate Governance* yang diukur dengan nilai komposit *self assessment* laporan pelaksanaan *corporate governance* menjadi mediasi atau perantara peran DPS dalam meningkatkan kinerja Bank Syariah. Peran DPS dalam Bank Syariah sangatlah penting dilihat dari kriteria pengukuran DPS, dan apabila DPS memenuhi kriteria tersebut maka akan meningkatkan nilai komposit *self assessment* laporan pelaksanaan *Corporate Governance* dan tentunya akan meningkatkan kinerja Bank Syariah yang diukur dengan tingkat profitabilitas.

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa kriteria DPS yang rata-rata mempunyai skor total 10 yaitu pada Bank BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BCA Syariah dan

Bank Panin Syariah mempunyai nilai komposit *self assessment* laporan pelaksanaan *Corporate Governance* yang rata-rata kriteria "baik" dan "sangat baik" dan dapat meningkatkan tingkat profitabilitas yang diukur dengan rasio ROA dan ROE. Kinerja Bank Syariah dilihat dari tingkat profitabilitasnya yaitu rasio ROA dan ROE di Bank BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BCA Syariah dan Bank Panin Syariah mempunyai nilai ROA dan ROE dengan kategori "cukup baik" (0,5%<ROA≤1,25%) dan kategori "baik" (1,25%<ROA≤1,5%).

Hasil penelitian ini sesuai dengan *Resource Dependence Theory* dimana peran sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi aspek kebijakan syariah, menilai kesesuaian produk dengan syariah, dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dengan tugas dan tanggung jawab tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Pelaksanaan *Corporate Governance* dengan penilaian *assessment* dari DPS. Kualitas Laporan Pelaksanaan *Corporate Governance* yang menggunakan indikator nilai komposit apabila kriterianya mengalami peningkatan maka akan meningkatkan kinerja Bank Syariah. Sesuai dengan *Agency Theory* dimana terdapat hubungan keagenan antara peningkatan nilai komposit dari laporan *self assessment* dalam Laporan Pelaksanaan *Corporate Governance* dengan peningkatan kinerja Bank Syariah. Komponen dari *self assessment* dalam Laporan Pelaksanaan *Corporate Governance* salah satunya adalah menilai kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS), dimana DPS termasuk salah satu bagian dari mekanisme *Corporate Governance* di Bank Syariah. Sehingga posisi DPS sama dengan Dewan Direksi dan Komisaris Independen dalam mekanisme *Corporate Governance*. Mekanisme *Corporate Governance* merupakan bagian dari struktur organisasi yang menjalankan operasional perusahaan atau dengan kata lain sebagai pihak *agent* yang mempunyai peran dalam meningkatkan kinerja Bank Syariah dilihat dari tingkat profitabilitas. Mekanisme *Corporate*

Governance ini bertanggung jawab kepada *principal* (pemilik) dengan menjalankan kegiatan operasional Bank Syariah sehingga akan berdampak pada peningkatan profitabilitas.

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa Bank BCA Syariah dan Bank BNI Syariah mempunyai peningkatan dalam kriteria peran DPS yang ditunjukkan dengan nilai TDPS yang meningkat, demikian juga dengan nilai komposit self assessment dari Laporan Pelaksanaan *Corporate Governance* dalam kategori baik yang berdampak akan meningkatkan tingkat profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE. Data menunjukkan bahwa nilai rasio ROA mengalami peningkatan dari kategori "cukup baik" (0,5%<ROA≤1,25%) menjadi kategori "baik" (1,25%<ROA≤1,5%), demikian juga rasio ROA mengalami peningkatan dari kategori "kurang baik" (0<ROE≤5%) menjadi kategori "cukup baik" (5%<ROE≤12,5%).

Tabel 4.10.

Nilai Total DPS, Nilai Komposit, ROA dan ROE

TAHUN	NAMA BANK	TDPS	NILAI KOMPOSIT	ROA	ROE
2010	Bank BCA Syariah	8	2,10	0,78	1,70
2011	Bank BCA Syariah	8	1,90	0,90	2,30
2012	Bank BCA Syariah	10	1,80	0,84	2,80
2013	Bank BCA Syariah	10	1,55	1,01	2,90
2014	Bank BCA Syariah	10	1,00	0,80	4,30
2015	Bank BCA Syariah	10	1,00	1,30	5,20
2016	Bank BCA Syariah	12	1,00	1,30	5,30
2017	Bank BCA Syariah	12	1,00	1,30	5,55
2010	Bank BNI Syariah	10	1,63	0,61	3,65
2011	Bank BNI Syariah	10	1,68	1,29	6,63
2012	Bank BNI Syariah	10	1,25	1,48	10,18
2013	Bank BNI Syariah	10	1,30	1,37	11,73
2014	Bank BNI Syariah	11	2,00	1,27	10,83
2015	Bank BNI Syariah	11	2,00	1,43	11,39
2016	Bank BNI Syariah	11	2,00	1,44	11,94
2017	Bank BNI Syariah	11	2,00	1,31	11,42

Sumber : data sekunder yang diolah (2019)

4.5.5. Kualitas Penerapan *Corporate Governance* dalam memediasi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Penerapan *Corporate Governance* mampu memediasi hubungan Mekanisme *Corporate Governance* dan Kinerja Bank Syariah. Hasil penelitian ini seusai dengan *Stakeholder Theory* yang menyatakan bahwa perusaahan dengan mekanisme *Corporate Governance* yang terdiri dari baik *shareholders*, kreditur, karyawan, pelanggan, pemerintah, pemasok, dan berbagai pihak yang berkepentingan mampu menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan kinerja. Demikian juga di Bank Syariah dengan mekanisme *Corporate Governance* yang baik maka kinerja Bank Syariah juga akan meningkat. Teori *Stakeholder* menyatakan bahwa mekanisme *Corporate Governance* akan menciptakan nilai ekonomis yang akan meningkatkan kinerja. Pengukuran kinerja di Bank Syariah menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROA dan ROE. Rasio ROA menunjukkan seberapa besar laba bersih yang bisa diperoleh dari kekayaan yang dimiliki perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Pelaksanan *corporate governance* yang baik yang tercermin dalam laporan *self assessment* mampu meningkatkan *asset* yang dimiliki. Pengelolaan yang baik mampu mendorong efektivitas penggunaan *asset* dan meningkatkan kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih, sehingga mampu menaikkan rasio profitabilitas. Rasio ROE sangat erat berkaitan dengan pemegang saham. Prinsip dasar pemegang saham saat menanamkan modalnya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal. Maka keberadaan *governance system* diharapkan berfungsi sebagai pengendali untuk menjamin bahwa praktik bisnis yang dilakukan tidak merugikan pihak lain. Hal yang paling mendasar dalam konteks ini adalah sebelum memutuskan atau melakukan sesuatu perlu dipertimbangkan apakah hal tersebut benar atau salah. Oleh sebab itu diperlukan adanya regulasi yang akan mengatur *stakeholders* di dalam melaksanakan aktivitasnya maka seperangkat aturan (*law and regulation*) dan

penegakannya (*enforcement)* menjadi sangat penting dan krusial. Secara umum semua aturan disusun dengan berpedoman yang mengacu kepada kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil akhir dari *governance outcomes* tersebut akan direalisasikan melalui peningkatan kinerja perusahaan (Borsch-Supan dan Koke 2002). Dari sudut pandang organisasi sebagai suatu sistem maka optimalisasi proses *governance* tersebut akan tercapai hanya jika didukung oleh *regulatory environment* dan didukung mekanisme pengendalian dalam suatu sistem *governance*. *Regulatory environment* terutama *law enforcement* secara konsisten dibutuhkan untuk menetapkan hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan sebagai insentif di dalam mengimplementasikan *corporate governance* (Lukviarman dan Johan 2018)

Kualitas Penerapan *Corporate Governance* yang diukur dengan nilai komposit *self assessment* laporan pelaksanaan *Corporate Governance* menjadi mediasi atau perantara Mekanisme *Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja Bank Syariah. Mekanisme *Corporate Governance* yang diukur dengan Komite Audit dan Dewan Direksi akan meningkatkan Kualitas Penerapan *Corporate Governance* yang di tunjukkan dengan nilai komposit dari skor laporan *self assessment* yang cenderung akan mengalami peningkatan kategori. Kualitas Penerapan *Corporate Governance* yang baik apabila Bank Syariah memenuhi kriteria: 1) Entitas terbuka dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dan terbuka dalam proses pengambilan keputusan; 2) Fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban jelas; 3) Pengelolaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat dengan penerapan fungsi audit intern, pelaksanaan audit ekstern dan pelaksanaan audit dari Bank Indonesia; 5) Bank memenuhi hak pemegang kepentingan dengan baik termasuk dalam hal penanganan benturan kepantingan; 6) Komisaris, direksi, DPS dan komisi memiliki kompetensi, mampu bertindak

objektif, dan bebas dari tekanan pihak manapun; dan 7) Terdapat proses *check and balance* dalam pelaksanaan tugas Komisaris, direksi, DPS dan komisi-komisi. Ketujuh aspek tersebut dicerminkan dalam pelaksanaan seluruh faktor-faktor *Good Corporate Governance (*GCG). Secara umum seluruh Bank Syariah telah menerapkan kesebelas faktor *Good Corporate Governance (*GCG) sesuai aturan BI No.12/13/DPbs tanggal 30 April 2010. Nilai komposit dilihat dari laporan pelaksanaan *corporate governance* berupa hasil *self assessment* 11 item yang terdiri dari (1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris; (2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi; (3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite; (4) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS; (5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa; (6) Penanganan Benturan Kepentingan; (7) Penerapan Fungsi Audit Intern; (8) Penerapan Fungsi Kepatuhan; (9) Penerapan Fungsi Audit Eksternal; (10) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan; dan (11) Batas Maksimum Penyaluran Dana.

Berdasarkan tabel 4.9 bank BNI Syariah pada tahun 2013 dan 2014 terjadi peningkatan jumlah Dewan Direksi dan Komite Audit. Jumlah Dewan Direksi meningkat yaitu dari 3 menjadi 4 orang dan Komite Audit juga mengalami peningkatan dari 5 menjadi 6 orang. Peningkatan tersebut diikuti dengan kenaikan nilai komposit yaitu sebesar 1,30 (kategori "sangat baik") menjadi 1.20 (kategori "sangat baik"). Asumsinya nilai komposit laporan *self assessment* semakin kecil maka akan semakin baik. Nilai komposit yang meningkat akan meninkatkan kinerja Bank Syariah dilihat dari tingkat profitabililtasnya yaitu sebesar ROA sebesar 1,17% (kategori "cukup baik") menjadi 1,37% (kategori "baik") dan nilai ROE sebesar 11,73 (kategori "cukup baik") menjadi 12,83 (kategori "baik").

Pada tahun 2016 dan 2017 bank BNI Syariah juga mengalami peningkatan Dewan Direksi sebanyak 4 orang meningkat menjadi 5 orang dan Komite Audit sebanyak 5 orang meningkat menjadi 6 orang. Hal tersebut diikuti dengan meningkatnya nilai komposit laporan

self assessment yaitu sebesar 1,80 (kategori "baik") menjadi 1,20 (karegori "sangat baik"). Peningkatan nilai komposit juga diikuti dengan kenaikan kinerja Bank Syariah dilihat dari tingkat profitabilitasnya yaitu nilai ROA sebesar 1,44% (kategori "baik") menjadi 1,61% (kategori "sangat baik") dan nilai ROE sebesar 11,94% (kategori "cukup baik") menjadi 12,42% (kategori "baik").

Tahun 2011 Bank BRI Syariah mengalami peningkatan di tahun 2012. Jumlah Dewan Direksi dan Komite Audit tahun 2011 sebanyak 4 orang menjadi 5 orang pada tahun 2012. Jumlah Dewan Direksi dan Komite Audit yang meningkat juga diikuti dengan peningkatan nilai komposit laporan *self assessment* yaitu sebesar 1,65 menjadi 1,30. Peningkatan nilai komposit juga diikuti kenaikan kinerja Bank BRI Syariah yang diukur dengan tingkat profitabilitas. Nilai ROA tahun 2011 sebesar 1,30% (kategori "baik") menjadi 1,65% (kategori "sangat baik") dan nilai ROE sebesar 11,29% (kategori "cukup baik") menjadi 12,41% (kategori "baik"). Bank BRI tahun 2015 juga mengalami peningkatan, jumlah Dewan Direksi sebanyak 4 orang menjadi 5 orang dan Komite Audit sebanyak 5 orang menjadi 6 orang. Peningkatan Dewan Direksi dan Komite Audit diikuti dengan peningkatan nilai komposit laporan *self assessment* yaitu sebesar 1,61 (kategori "baik") menjadi 1,40 (kategori "sangat baik"). Kinerja Bank BRI Syariah juga meningkat diukur dari tingkat profitabilitas yaitu nilai ROA tahun 2015 sebesar 1,76% (kategori "baik") menjadi 1,95% (kategori "baik") dan nilai ROE sebesar 11,20% (kategori "cukup baik") menjadi 12,55% (kategori "baik"). Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa terdapat dua Bank Syariah yaitu Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah yang dari tahun 2010-2017 secara konsisten terjadi peningkatan mekanisme *Corporate Governance* yang diukur dengan Dewan Direksi dan Komite Audit, nilai komposit dan kinerja Bank Syariah yang diukur dengan tingkat profitabilitas.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menguji Dewan Pengawas Syariah, Mekanisme *Corporate Governance*, dan Kualitas Penerapan *Corporate Governance* terhadap kinerja. Variabel Kualitas Penerapan *Corporate Governance* sebagai variabel intervening atau mediasi yang mempunyai efek mediasi pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Bank Syariah dan juga mempunyai efek mediasi pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah. Hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap Kualitas Penerapan *Corporate Governance* terbukti. Temuan ini menunjukkan bahwa: (1) Dewan Pengawas Syariah sudah menjalankan tugasnya, namun kualitas dari pelaksanaan tugas tersebut sudah maksimal; (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah. Kebanyakan yang menjadi DPS merupakan tokoh agama atau tokoh masyarakat sehingga diharapkan mempunyai standar kompetensi yang memadai dengan melalui pengujian *fit proper test*. Tugas dan kewajiban yang besar dengan menjalankan pengawasan aspek syariah di bank beserta cabang-cabangnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesai; dan (3) Dalam hal regulasi, peraturan di Indonesia khususnya SK DSN-MUI memiliki pengukuran yang jelas untuk menilai dan memastikan apakah peran DPS telah sesuai aturan atau belum dengan ketentuan yang dimaksud. Pemerintah berusaha meningkatkan regulasi untuk mendorong kualitas implementasi dari peran DPS di Bank Syariah sehingga semakin meningkat. Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diterbitkan dengan mengacu kepada SK DSN yang diterbitkan oleh DSN MUI. Untuk itu, PBI No.

11/33/PBI/2009 dan SK DSN-MUI memiliki sasaran dan tujuan yang sama yakni menjadi pedoman bagi perbankan syariah di Indonesia untuk menjalankan operasi bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah dan membantu perbankan syariah untuk mampu bersaing dengan perbaikan secara keseluruhan. PBI ini mengatur hal-hal yang lebih detail dibandingkan SK DSN-MUI, namun masih tetap sulit untuk ditentukan tolok ukurnya. Untuk itu, dibutuhkan regulasi di Indonesia yang memiliki pengukuran yang jelas dan terarah. Semakin besar peran DPS maka nilai komposit dari Kualitas Penerapan *Corporate Govenance* akan meningkat.

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Kualitas Penerapan *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Bank Syariah terbukti. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas *corporate governance* diukur dengan laporan pelaksanaan GCG dari hasil evaluasi *self assessment* terdapat 11 item berdasarkan dari Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 dan kinerja diukur dengan profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan arah koefisien yang negatif hal itu disebabkan penilaian laporan *self assessment* tersebut akan muncul perhitungan nilai komposit yang menunjukkan peringkat "sangat baik" (nilai =1) dan "tidak baik" (nilai=5) sehingga menunjukkan hasil yang berlawanan arah koefisiennya. Semakin baik kriteria suatu bank maka nilai yang dihasilkan akan semakin kecil dan rata-rata nilai komposit GCG berkisar 1-2,5 sehingga dalam peringkat sangat baik sampai dengan baik.

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Mekanisme *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Bank Syariah terbukti. Efektivitas *Corporate Governance* ditentukan oleh bagaimana mekanisme *Corporate Governance* tersebut bekerja dalam perusahaan. Sebaik apapun struktur *Corporate Governance* tetapi jika mekanismenya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka peningkatan kinerja tidak akan tercapai. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa mekanisme *governance* dibutuhkan sebagai bagian penting dalam kerangka CG karena dapat memberikan jaminan bahwa setiap investor

dapat memperoleh pengembalian dari setiap investasi yang dilakukannya. Sehingga kebutuhan akan mekanisme *governance* merupakan hal yang krusial untuk dapat diterapkannya konsepsi *governance* secara lebih baik.

Hipotesis 4 Kualitas Penerapan *Corporate Governance* (QCG) mampu memediasi secara parsial hubungan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kinerja Bank Syariah. Hasil ini menunjukkan bahwa Kualitas Penerapan *Corporate Governance* yang diukur dengan nilai komposit *self assessment* laporan pelaksanaan *corporate governance* menjadi mediasi atau perantara peran DPS dalam meningkatkan kinerja Bank Syariah. Peran DPS dalam Bank Syariah sangatlah penting dilihat dari kriteria pengukuran DPS, dan apabila DPS memenuhi kriteria tersebut maka akan meningkatkan nilai komposit *self assessment* laporan pelaksanaan *Corporate Governance* dan tentunya akan meningkatkan kinerja Bank Syariah yang diukur dengan tingkat profitabilitas. Adanya pengawasan yang baik diharapkan menurunkan masalah agensi (*agency problem*) yang dilakukan oleh manajemen bank Syariah, sehingga akan meningkatkan kinerja Bank Syariah. Eksistensi DPS sebagai lembaga yang wajib dibentuk oleh Bank Syariah yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip Syariah dan akan meningkatkan nilai skor laporan *self assessment* dalam menilai kualitas penerapan *Corporate Governance* sehingga tujuan ekonomi maupun kesejahteraan sosial bank syariah dapat tercapai secara optimal dengan demikian akan dapat meningkatkan kinerja keuangan bank Syariah.

Hipotesis 5 Kualitas Penerapan *Corporate Governance* mampu memediasi hubungan Mekanisme *Corporate Governanc* dan Kinerja Bank Syariah. Mekanisme *Corporate Governance* yang diukur dengan Komite Audit dan Dewan Direksi akan meningkatkan Kualitas Penerapan *Corporate Governance* yang di tunjukkan dengan nilai komposit dari skor laporan *self assessment* yang cenderung akan mengalami peningkatan kategori. Kualitas Penerapan *Corporate Governance* yang baik apabila Bank Syariah memenuhi kriteria: 1)

Entitas terbuka dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dan terbuka dalam proses pengambilan keputusan; 2) Fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban jelas; 3) Pengelolaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Bank Syariah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat dengan penerapan fungsi audit intern, pelaksanaan audit ekstern dan pelaksanaan audit dari Bank Indonesia; 5) Bank memenuhi hak pemegang kepentingan dengan baik termasuk dalam hal penanganan benturan kepentingan; 6) Komisaris, direksi, DPS dan komisi memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari tekanan pihak manapun; dan 7) Terdapat proses *check and balance* dalam pelaksanaan tugas Komisaris, direksi, DPS, dan komisi-komisi. Ketujuh aspek tersebut dicerminkan dalam pelaksanaan seluruh faktor-faktor *Good Corporate Governance* (GCG).

5.2. Implikasi Teoritis

1. Dewan Pengawas Syariah terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Penerapan *Corporate Governance*. Temuan ini sejalan dengan *Resource Dependence Theory.* Teori ini menyatakan bahwa peran sumber daya manusia (SDM) sangat diperlukan dalam organisasi atau perusahaan. Fenomena di Indonesia masih ada beberapa bank syariah yang mengangkat DPS karena figur orang tersebut yang disegani, namun perlu diuji kompetensinya melalui *fit an proper test*. Selain itu tingkat kehadiran DPS juga perlu ditingkatkan dengan lebih intensif. Selain itu tingkat kehadiran DPS merupakan pengawasan dalam penerapan kualitas *corporate governance*, DPS walaupun hanya datang secara berkala misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali namun tetap memberikan kontribusi masukan dan saran. Bank Syariah wajib memiliki DPS minimal 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Menurut Suprayogi (2007) terdapat 3 (tiga) model DPS di perbankan Syariah yaitu (1) *Advisor*

model, dimana DPS bertindak sebagai *advisor* dan bekerja secara *part time* dan datang ke bank jika dibutuhkan; (2) Supervisor Model, DPS berfungsi sebagai pengawas yang melakukan diskusi rutin dengan manajemen terkait pemenuhan prinsip dalam produk, jasa dan operasional; dan (3) *Sharia Department* Model, organisasi DPS yang berbentuk departemen khusus yang bekerja secara *full time* dan dibantu oleh staf dalam melakukan pengawasan di bawah pengawasan seorang ahli.

2. Temuan penelitian bahwa kualitas penerapan *corporate governance* terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu Klapper dan Love (2004); Black, Jang dan Kim (2006); Brown dan Caylor (2006); Chen dan Thomas (2000); Chen, Chen dan He (2008); Clarke (2007); Chalhoub (2009); Khatab et al (2011). Sedangkan beberapa penelitian di Indonesia antara lain Syam dan Nadja (2012); Triyono (2012); Bukair dan Rahman (2015), Siagian, Siregar dan Rahadian (2013); Husnin, Nawawi dan Salin (2016). *Agency Theory* mengidentifikasi terdapatnya potensi konflik kepentingan antara berbagai pihak yang berhubungan dengan perusahaan sehingga akan mempengaruhi perilaku mereka secara berbeda (Jensen dan Meckling 1993)**.** Konflik kepentingan tersebut dapat terjadi karena perbedaan tujuan masing-masing sesuai dengan posisi dan kepentingannya terhadap perusahaan. Maka keberadaan *governance system* diharapkan berfungsi sebagai pengendali untuk menjamin bahwa praktik bisnis yang dilakukan tidak merugikan pihak lain. Esensi *corporate governance* memberikan penekanan pada *the right things* sebelum dikerjakan secara benar. Hal yang paling mendasar dalam konteks ini adalah sebelum memutuskan atau melakukan sesuatu perlu dipertimbangkan apakah hal tersebut benar atau salah. Oleh sebab itu diperlukan adanya regulasi yang akan mengatur *stakeholders* di dalam melaksanakan aktivitasnya maka seperangkat aturan (*law and regulation*) dan penegakannya (*enforcement*)

menjadi sangat penting dan krusial. Secara umum semua aturan disusun dengan berpedoman pada *virtue* yang mengacu kepada kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penerapan kualitas *corporate governance* pada dasarnya tidak akan menimbulkan konflik kepentingan, karena didasarkan pada nilai-nilai moral yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kaitan ini, *governance outcomes* yang diharapkan adalah berupa berkurangnya konflik kepentingan antar pihak yang terlibat dalam perusahaan. Hal ini terutama dibutuhkan pada berbagai Negara dengan kepentingan investor minoritas relatif rendah seperti terdapat di Indonesia serta Negara berkembang lainnya (La Porta, et al. 2002)**.** Hasil akhir dari *governance outcomes* tersebut akan direalisasikan melalui peningkatan kinerja perusahaan (Borsch-Supan dan Koke 2002). Hasil tersebut dapat dicapai jika semua elemen yang terdapat dalam suatu *governance system* dapat bekerja secara optimal. Dari sudut pandang organisasi sebagai suatu sistem maka optimalisasi proses *governance* tersebut akan tercapai hanya jika didukung oleh *regulatory environment* dan didukung mekanisme pengendalian dalam suatu sistem *governance*. *Regulatory environment* terutama *law enforcement* secara konsisten dibutuhkan untuk menetapkan hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan sebagai insentif di dalam mengimplementasikan *corporate governance* (Lukviarman dan Johan 2018)**.**

3. Temuan penelitian bahwa Mekanisme *Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah merupakan implikasi dari *agency theory*. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan (Denis dan Mc Connel 2003). GCG pada dasarnya berkaitan dengan cara semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) berusaha untuk memastikan bahwa para manajer dan karyawan internal lainnya selalu mengambil langkah-langkah yang tepat

atau mengadopsi mekanisme yang melindungi kepentingan *stakeholder* (Hamza 2016). Beberapa penelitian sebelumnya pada perusahaan di AS Fama dan Jensen (1983); Shleifer dan Vishny (1997); Hilman dan Dalziel (2003); Nicholson dan Kiel (2007); Chugh, Meador dan Kumar (2011) meneliti perusahaan di India. Beberapa penelitian antara lain Chiang (2005); Alonso dan Gonzales (2006); Spong dan Sullivan (2007); Kim, Rasiah dan Tasnim (2013). Menurut Nicholson dan Kiel (2007); Van de Berghe dan Levrau (2004); Mahmood dan Abbas (2013); Banerji dan Sambharya (1996). Komite Audit bertugas melaporkan hasil laporan keuangan yang dibuat kepada dewan direksi untuk ditindak lanjuti. Apabila fungsi dewan direksi berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya maka hasil laporan auditor akan mendapatkan umpan balik yang dapat meningkatkan kinerja bank syariah.

4. Pengaruh tidak langsung atau efek mediasi dari variabel Kualitas Penerapan *Corporate Governance* menunjukkan ada efek mediasi antara Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan *Resource Dependence Theory* dimana peran sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi aspek kebijakan syariah, menilai kesesuaian produk dengan syariah, dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dengan tugas dan tanggung jawab tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas Laporan Pelaksanaan *Corporate Governance* dengan penilaian *assessment* dari DPS. Kualitas Laporan Pelaksanaan *Corporate Governance* yang menggunakan indikator nilai komposit apabila kriterianya mengalami peningkatan maka akan meningkatkan kinerja Bank Syariah. Sesuai dengan *Agency Theory* dimana terdapat hubungan keagenan antara peningkatan nilai komposit dari laporan *self assessment* dalam Laporan Pelaksanaan *Corporate Governance* degan peningkatan kinerja Bank Syariah.

5. Pengaruh tidak langsung atau efek mediasi dari variabel Kualitas Penerapan *Corporate Governance* menunjukkan ada efek mediasi antara Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Bank Syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan *Stakeholder Theory* yang menyatakan bahwa perusaahan dengan mekanisme *Corporate Governance* yang terdiri dari baik *shareholders*, kreditur, karyawan, pelanggan, pemerintah, pemasok, dan berbagai pihak yang berkepentingan mampu menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu meningkatkan kinerja. Demikikan juga di Bank Syariah dengan mekanisme *Corporate Governance* yang baik maka kinerja Bank Syariah juga akan meningkat. Teori *Stakeholder* menyatakan bahwa mekanisme *Corporate Governance* akan menciptakan nilai ekonomis yang akan meningkatkan kinerja. Pengukuran kinerja di Bank Syariah menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROA dan ROE. Rasio ROA menunjukkan seberapa besar laba bersih yang bisa diperoleh dari kekayaan yang dimiliki perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Pelaksanan *corporate governance* yang baik yang tercermin dalam laporan *self assessment* mampu meningkatkan *asset* yang dimiliki. Pengelolaan yang baik mampu mendorong efektivitas penggunaan *asset* dan meningkatkan kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih, sehingga mampu menaikkan rasio profitabilitas. Rasio ROE sangat erat berkaitan dengan pemegang saham. Prinsip dasar pemegang saham saat menanamkan modalnya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal. Maka keberadaan *governance system* diharapkan berfungsi sebagai pengendali untuk menjamin bahwa praktik bisnis yang dilakukan tidak merugikan pihak lain. Hal yang paling mendasar dalam konteks ini adalah sebelum memutuskan atau melakukan sesuatu perlu dipertimbangkan apakah hal tersebut benar atau salah. Oleh sebab itu diperlukan adanya regulasi yang akan mengatur *stakeholders* di dalam melaksanakan aktivitasnya maka seperangkat

aturan (*law and regulation*) dan penegakannya (*enforcement)* menjadi sangat penting dan krusial. Secara umum semua aturan disusun dengan berpedoman yang mengacu kepada kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil akhir dari *governance outcomes* tersebut akan direalisasikan melalui peningkatan kinerja perusahaan (Borsch-Supan dan Koke 2002). Dari sudut pandang organisasi sebagai suatu sistem maka optimalisasi proses *governance* tersebut akan tercapai hanya jika didukung oleh *regulatory environment* dan didukung mekanisme pengendalian dalam suatu sistem *governance*. *Regulatory environment* terutama *law enforcement* secara konsisten dibutuhkan untuk menetapkan hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan sebagai insentif di dalam mengimplementasikan *corporate governance* (Lukviarman dan Johan 2018).

5.3. Implikasi Empiris

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS), Mekanisme *Corporate Governance* (MCG) yang diproksikan dengan Komite Audit dan Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja Bank Syariah yang diukur dengan profitabilitas dengan tingkat signifikansi pada level 5 persen. Demikian juga untuk variabel intervening atau variabel mediasi yaitu Kualitas Penerapan *Corporate Governance* yang mampu memediasi pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* (MCG) terhadap Kinerja Bank Syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa peran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) mampu meningkatkan kualitas *corporate governance* dan kinerja bank syariah. Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral yaitu ilmu figh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Di Indonesia pengangkatan DPS dilihat dari karisma dan kepopuleran di tengah masyarakat dan dari segi keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah.

Anggota DPS diharuskan memahami tentang teknis perbankan dan lembaga keuangan syariah apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam seperti akuntansi sehingga pengawasan dan peran-peran strategis lainnya lebih optimal.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu 1) Pengukuran variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) menggunakan indikator item berdasarkan *Operating Procedures of the Shariah Board* yang terdapat dalam *Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang merupakan *Guiding Principles On Shariah Governance System for Institutions Offering Islamic Financial Service* dimana pengukuran tersebut belum pernah diteliti sebelumnya. Peran DPS dalam penelitian ini menggunakan pengukuran berdasarkan pengukuran tersebut dibagi menjadi lima indikator yaitu: (1) Independensi, (2) Kompetensi, (3) Komunikasi, (4) Komposisi, dan (5) Performa, dengan keseluruhan terdapat 18 item. Pengukuran yang dipakai ini diasumsikan bisa mewakili dalam menilai peran DPS dengan model pengorganisasian yang berbeda-beda tersebut, namun tetap memenuhi kriteria sesuai *Islamic Financial Services Board* (IFSB) sebagai pedoman DPS dalam melakukan tugas dan kewajibannya di Bank Syariah; 2) model penelitian yang berbeda yaitu dengan menambahkan variabel mediasi yaitu Kualitas Penerapan *Corporate Governance*. Variabel kualitas penerapan *Corporate Governance* diukur dengan pengukuran *self assessment* yang wajib dilakukan oleh perbankan sesuai Peraturan OJK (POJK) No.55/POJK.03/2016, salah satu aturan tersebut adalah melakukan *self assessment* secara mandiri yang diperkuat dengan peraturan BI dan OJK yang tecantum dalam SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata kelola bagi Perbankan meliputi 11 faktor GCG perbankan dengan menggunakan ketentuan formula dan pembobotan seperti yang pernah diteliti oleh Syam dan Nadja (2012); Laela (2012).

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian yaitu *size* dan struktur kepemilikan. *Size* menunjukkan hasil yang tidak siginfikan. Hal tersebut sesuai dengan kondisi Bank

Syariah di Indonesia bahwa Bank Syariah di Indonesia kebanyakan *asset* yang dimiliki masih merupakan bagian dari *asset* dari Bank Konvensional karena sebagian besar Bank Syariah di Indonesia belum *go public*. Sedangkan variabel struktur kepemilikan menunjukkan hasil yang signifikan. Struktur Kepemilikan di Bank Syariah di Indonesia kebanyakan adalah kepemilikan institusional, kepemilikan individu dan kepemilikan publik, sedangkan pengendalian saham kebanyakan adalah *privat ownership* yaitu diatas 80% dan minority ownership antara 20-50%. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian saham di Bank Syariah di Indonesia kepemilikan diatas 80% sebagian besar dimiliki oleh institusi sedangkan sisanya kurang kebih 20% dimiliki oleh kepemilikan individu/perorangan dan kepemilikan publik.

5.4. Implikasi Praktis

1. Peran Dewan Pengawas Syariah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan lima indikator yaitu (1) Independensi, (2) Kompetensi, (3) Komunikasi, (4) Komposisi, dan (5) Perform, dalam penerapannya indikator ini bisa digunakan untuk mengevaluasi peran Dewan Pengawas Syariah dan melengkapi penilaian *self assessment* dalam laporan pelaksanan *Corporate Governance*.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* dapat meningkatkan kinerja Bank Syariah maka diharapkan pemerintah dapat mendukung terciptanya budaya *Good Governance* sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan yang sampai saat ini masih banyak terjadi di Bank Syariah.
3. Perbankan Syariah dalam meningkatkan pelaksanaaan *Good Governance* diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan, kredibilitas, dan integritas semua pihak yang terlibat dalam operasional perbankan terutama yang berkaitan dengan peran Dewan Pengawas Syariah dan komponen mekanisme *Corporate Governance* yaitu Komite Audit, Dewan Direksi, dan Komisaris Independen.

4. Dukungan penegakkan hukum oleh pemerintah sehingga aturan dan kebijakan mengenai pelaksanaan *good governance* tidak hanya sekedar regulasi namun juga ada sistem hukum yang mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif, termasuk melakukan edukasi ke masyarakat mengenai produk perbankan Syariah hal itu disebabkan tingkat pemahaman masyarakat masih rendah terhadap Bank Syariah.

5.5. Keterbatasan Penelitian

1. Masih ada beberapa bank syariah yang mempunyai tingkat profitabilitas negatif . Hal itu menunjukkan peningkatan kinerja bank syariah masih kurang dibawah standar ROA yang ditentukan pemerintah yaitu diatas 5 persen. Bank Syariah yang sudah menerapkan syariah *compliance* dalam penelitian ini diproksikan dengan peran DPS tidak berarti secara otomatis meningkatkan tingkat profitabilitas bank syariah. Perlu ada analisa yang lengkap yaitu pembahasan tentang seberapa erat korelasi nilai-nilai syariah yang dijalankan tersebut dengan tujuan perusahaan meningkatkan keuntungan dan kinerja bank syariah. Bank Syariah perlu meningkatkan tingkat kompetensi keilmuan DPS dan model pengawasan yang tepat untuk menjaga kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip syariah. Semuanya itu dilakukan secara komprehensif untuk meningkatkan tingkat profitabilitas.
2. Penelitian ini hanya meneliti peran Dewan Pengawas Syariah dan Mekanisme *Corporate Governance* dengan menggunakan data sekunder yang tersedia dari Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan *Corporate Governance*, hal itu disebabkan karena terdapat kendala untuk melakukan suvey secara langsung terhadap responden yang berkaitan dengan mekanisme *Corporate Governance* yaitu Komite Audit, Dewan Direksi dan Komisaris Independen dan juga Dewan Pengawas Syariah.

5.6. Agenda Penelitian Mendatang

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi terhadap beberapa bank syariah sebagai pembanding dan menggunakan metode wawancara dengan kuesioner dalam penilaian *self assessment* sehingga bisa memperoleh informasi mengenai kinerja *board governance* sesuai dengan kondisi riilnya.
2. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat berpotensi untuk dimodifikasi atau dikembangkan lebih baik lagi. Baik dikembangkan dengan menambah variabel misalnya penegakkan hukum (*law enforcement*), budaya perusahaan, dan mengubah model penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI. (1999, 2008). Governance Standard for Islamic Financial Institution.

Abbasi, M., Kalantari, E., & Abbasi, H. (2012). The Impact of Corporate Governance on Chief Executive Officer (CEO) Duality in Iranian Banking Sector. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, **2**(1) : 1-9.

Abdullah, D. V., & Keon, C. (2010). Islamic Chance: Why it Makes Sense. Terjemahan oleh Satrio Wahono. 2012. *Jakarta:Zaman*.

Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic Perspective: A comparative analysis with OECD principles. Critical Perspectives on Accounting 20. 556-567.

Adams, R.B dan Mehran, H. (2012). Bank Board Structure and Performance Evidence for Large Bank Holding Companies. *Journal of Financial Intermediation*, **21** : 243-267

Ahmad, K. (2000). Islamic Finance and Banking : The Challenge and Prospect. *Journal Review of Islamic Economics,* **8** (1).

Ahmed, H. (2014). Islamic Banking and Shari`ah Compliance : A Product Development Perspective. *Journal of Islamic Finance,* **3** (2) : 15-29.

Akerlof, G. (1970). The Market for "lemons" : quality uncertainty and the market mechanism. *Quartely Journal of Economics*, pp. 488-500.

Aktan, B., Turen, S., Tvaronaviciene, M., Celik, S., & Alsadeh, H. A. (2018). Corporate Governance and Performance of The Financial Firms in Bahrain. *Polish Journal of Management Studies,* **17** (1) : 39-57.

Alali, F., Anandarajan, A., & Jiang, W. (2011). The Effect of Corporate Governance on Firms Credit Ratings : Further Eviendence Using Governance Score in The United States. *Journal Accontinng & Finance*, Pp. 291-312.

Alali, F., Anandarajan, A., & Jiang, W. (2012). The effect of corporate governance on firm's credit ratings: further evidence using governance score in the United States. *Accounting & Finance,* **52** (2) : 291-312.

Al-Amameh, A. (2014). Corporate Governance Owenership Structure and Bank Performance in Jordan. *International Journal of Economics and Finance,* **6** (6) : 69-81.

Al-Hawary, S. I. (2011). The Effect of Banking Governance on Banking Performance of the Jordanian Commercial Bank : Tobins Q Model "An Applied Study". *International Research Journal of Finance and Economics Issue,* **71** : 34-47.

Al-Hussain, A. H. (2009). Corporate Governance Structure Efficiency and Bank Performance in Saudi Arabia. Phoenix. *Arizona: University of Phoenix*.

Al-Hussain, A. H. (2013). Corporate Governance Structure Efficiency and Bank Performance in Saudi Arabia. *UMI Dissertations Publishing. Journal Proquest*.

Aljifri, K., & Khandelwal, S. K. (2013). Financial Contracts in Conventional and Islamic Financial Institutions: An Agency Theory Perspective. *Review Business & Finance Studies*, Pp.79-88.

Alkhamees, A. (2013). The Impact of Shariah Governance Practices on Shariah Compliance in Contemporary Islamic Finance. *Journal of Banking Regulation*, Vol.**14**. No.2 : 134-163

Alman, M. (2012). Shariah Supervisory Board Composition Effect on Islamic Banks Risk-taking Behavior. *Journal of Banking Regulation*, Vo.**14**.No.1 : 134-163

Alonso, P. d., & Gonzales, E. V. (2006). Corporate Governance in Banking : The Role of Board Directors. *Department of Financial Economics and Accounting, University of Valladolid*.

Amba, Sekar Muni. (2013). Corporate Governance and Firm. *Journal of Academic Business Ethics*, 1-11

Anderson, R. C., Mansi, S. A., & Reeb, D. M. (2002). Founding Family Ownership and The Agency Cost of Debt. *www.srsn.com*.

Anderson, R. C., Mansi, S. A., & Reeb, D. M. (2002). Founding Family Ownership, Corporate Diversification, and Firm Leverage. *www.srsn.com*.

Anderson, R. C., Mansi, S. A., & Reeb, D. M. (2003). Founding family ownership and the agency cost of debt. *Journal of Financial economics,* **68** (2) : 263-285.

Andres, Pablo de- dan Vallelado, E. (2008). Corporate Governance in Banking : The Role of the Board of Directors. *Journal of Banking and Finance,* **32** : 2570-2580

Annual Report. (2010-2017). *Bank BCA Syariah*.

Annual Report. (2010-2017). *Bank BNI Syariah*.

Annual Report. (2010-2017). *Bank BRI Syariah*.

Annual Report. (2010-2017). *Bank Bukopin Syariah*.

Annual Report. (2010-2017). *Bank Mega Syariah*.

Annual Report. (2010-2017). *Bank Muamalat Indonesia*.

Annual Report. (2010-2017). *Bank Panin Syariah*.

Annual Report. (2010-2017). *Bank Syariah Mandiri*.

Annual Report. (2010-2017). *Bank Victoria Syariah*.

Ariss, R.T. (2010). Competitive Conditions in Islamic and Conventional Banking : A Global Perspektif, Review of Financial Economics vol. **19** : 101-108

Banerji, K., & Sambharya, R. D. (1996). Vertical Kerietsu : An International Market Entry : The Case of The Japanesse Automobile Ancillary Industry. *Journal of International Business Studies,* **27** : 89-114.

Basel. (1999) Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations. *Basel Committee on Banking Supervision* : 1-14.

Beasley, M. (2000). An Empirical Analysis of The Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review,* **71** : 443-465.

Bebchuk, L. A., & Roe, M. J. (1998). A Theory of Path Dependence in Corporate Governance and Ownership. *Center for Law and Economic Studies.*

Bebchuk, L. A., & Roe, M. J. (1999). A Theory of Path Dependence in Corporate Governance and Ownership. *Working Paper No.131 Colombia Law School*, .

Bednar, M.K. (2012). Watchdog or Lapdog? A Behavioral View of The Media AS A Corporate Governance Mechanism. *Academy of Management Journal*, Vol. **55** No.1 : 131-150

Beik, I. S. (2018, April 25). *Mengakselerasi Pertumbuhan Bank Syariah*. Diambil kembali dari https://www.republika.co.id/berita/kolom/wacana/18/04/24/p7p56p396-mengakselerasi-pertumbuhan-bank-syariah

Berle, A. A., & Coit, G. G. (1991). *The Modern Corporation and Private Property*. *Transaction publishers*.

Berle, A. A., & Means, G. C. (1934). *The Modern Corporation and Private Property.* New York: Mac Millan.

Berle, A., & Gardiner, M. (1934). *The Modern Corporation and Private Property*. New York. Mac Millan.

Bhagat, S dan Bolton,B. (2013). Director Ownership, Governance and Performance. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. **48**. No.1 : 105-135

Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate Governance and Firm Performance. *Journal of Corparate Finance,* **14**, 257-273.

Black, B. S., Jang, H., & Kim, W. (2006). Does Corporate Governance Predict Firms Market Value? Evidence from Korean Market. *Journal of Law, Economics and Organization,* Vol **22** (No 2) : 366-413.

Borsch-Supan, A., & Koke, J. (2002). An Applied Econometricians : View of Empirical Corporate Governance Studies. *German Economic Review,* **3** (3) : 295-326.

Brickley, J. A., Lease, R. C., & Jr, C. W. (1988). Ownership Structure and Voting on Anti takeover Amendments. *Journal of Financial Economics,* Vol **20**, pp. 267-291.

Brown, L. D., & Caylor, M. L. (2006). Corporate Governance and Firm Valuation. *Journal of Accounting and Public Policy,* Vol **25**, Issue 4 : 409-434.

Bukair, A. A., & Rahman, A. A. (2015). Bank Performance and Board of Directors Attributes by Islamic Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* **8** (3) : pp. 291-309.

Burlaka, M. (2006). Bank Corporate Governance : The Emerging Ukrainan Market Compared to International Best Practice. *Forham Journal of Corporate & Financial Law,* **2** (4) : 851-891.

Cadbury, A. (1992). Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (London: GEC).

Caprio, G., Laeven, L., & Levine, R. (2007). Governance and Bank Evaluation. *Journal of Financial Intermediation. Forthcoming*.

Cassell, C. A., Giroux, G. A., Myers, L. A., & Omer, T. C. (2012). The Effect of Corporate Governance on Auditor-Client Realignments. *Auditing: A Journal of Practice & Theory,* Vol. **31**, No. 2 : pp.167-188.

Chahine, S., & Safieddine, A. (2013). Corporate Governance and the External Monitoring of Banks in Lebanon. *Journal Corporate Governance Proquest*, pp. 258-270.

Chalhoub, M. S. (2009). Relation Between Dimensions of Corporate Governance and Corporate Perfromance : An Empirical Study among Banks in the Lebanon. *International Journal of Management,* **26** (3) : 476-480.

Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Persepective. *Islamic Foundation*.

Chapra, M. U., & Ahmad, H. (2003). Corporate Governance for Islamic Institution. *IRTI-IDB*.

Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). Corporate governance in Islamic financial institutions. *Occasional paper,* 6.

Chen, C. R., & Thomas, L. S. (2000). Tobins Q, Managerial Ownership and Analysis Coverage : A Non Linear Simultaneous Aquations Model. *Journal of Economic and Business.* **52**.

Chen, J., Chen, D., & He, P. (2008). Corporate Governance, Control Type and Performance : The New Zealand Story. *Corporate Ownership & Control*, **5** (2) : 24-35.

Cheung, Y. L., Strouraitis, A., & Tan, W. (2010). Does the Quality of Corporate Governance Affect Firm Valuation and Risk? Evidence From a Corporate Governance Scorecard in Hongkong. *International Review of Finance.* **10** (4) : 403-432.

Chiang, H.-T. (2005). An Empirical Study of Corporate Governance and Corporate Performance. *Journal of American Academy of Business.* March : 95-101.

Choudhury, M. A., & Alam, M. N. (2013). Corporate Governance in Islamic Perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, **6** (3) : 180-199.

Choudhury, M. A., & Hoque, M. Z. (2006). Corporate Governance in Islamic Perspective. *Journal of Corporate Governance*, pp.116-128.

Choudhury, M. A., & Hoque, M. Z. (2013). Corporate Governance in Islamic Perspective. *Corporate Governance.* **6** (2) Proquest document ID : 205238479 : 116-128.

Choudhury, M. A., Hoque, M. Z., & Nayarana, N. (2006). Money and Real Economy Linkages in the Anchor of the Gold Standard: an Epistemological Approach. *Globalization and World Economic Reform*.

Chugh, L. C., Meador, J. W., & Kumar, A. S. (2011). Corporate Governance and Firm Performance: Evidence From India. *Journal of Finance and Accountancy*, pp. 1-10.

Cihak, M. dan Hesse, H. (2010). Islamic Bank and Financial Stability : An Empirical Analysis. *Journal of Financial Services Research*.Vol.**38** : 95-113

Claessen, S., & Joseph, R. H. (2003). Corporate Governance in Asia : A Survey. *Working Paper World Bank. Washington D.C*.

Clarke, T. (2007). *Theories of Corporate Governance : The Philosophical Foundations of Corporate Governance.* Oxon: Routledge.

Colley, J. L., Doyle, J. L., Logan, G., & Stettinius, W. (2003). Corporate Governance: The McGraw-Hill Executive MBA Series. *London: McGraw-Hill*.

Dalton, D. C., Daily, J. J., & A, E. (1999). Number of Director and Financial Performance : A Meta-analysis. *Academy of Management Journal,* **42** (6) : 674-686.

Daniri, M. A. (2005). *Good Corporate Governance : Konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia.* Jakarta: Gloria Printing.

Daniri, M. A. (2014). *Lead By GCG.* Jakarta: Gagas Bisnis Indonesia.

Dasuki, A. W. (2008). Understanding the Objective of Islamic Banking : A Survey of Stakeholder Perspective. *Departement of Economics International Islamic University Malaysia*.

De Jong, A. (2001). The Disciplining role of leverage in Dutch Firms. *Center Discussion Paper,* Vol **2001**-48.

De-Andres, P., & Vallelado, E. (2008). Corporate governance in Banking: The role of board of directors. *Journal of Banking and Finance,* **32** : 2570-2580.

Demsetz, H., & Lehn, K. (1985). The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences. *The Journal of Political Economy*, 1155-1177.

Denis, D. J., & Sarin, A. (1999). Agency Theory and the Influence of Equity Ownership Structure on Corporate Diversification Strategies. *Strategic Management Journal,* Vol. **20** : 1071-1076.

Denis, D. J., & Sarin, A. (1999). Ownership and Board Structures in Publicly Traded Corporations. *Journal of Financial Economics* **52**, 187-223.

Denis, D. K., & Mc Connel, J. J. (2003). International Corporate Governance. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, **38** (1) : 1-36.

Detik, (2013). "Ini Modus Developer dan 3 Bos BSM Bogor di Kasus Kredit Fiktif". https://news.detik.com/berita/d-2393824/ini-modus-developer-dan-3-bos-bsm-bogor-di-kasus-kredit-fiktif (diakses pada 16 November 2020).

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management,* **16** (1) : 19-64.

Drobetz, W. A., Schillhofer, & H, Z. (2004). Corporate Governance and Expected Stock Returns : Evidence from Germany. *European Financial Management,* **10** : 267-293.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : An Assesment and Review. *Academy of Management Review,* Vol **14** : 57-74.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : An Assesment and Review. *Academy of Management Review,* Vol **14** : 57-74.

Ekayani, F., & Rahmadi, A. (2012). Rangkuman Prinsip Syariah dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik. *Artikel Ilmiah. Universitas Mulawarman Samarinda*.

El-Chaarani, H. (2014). The Impact of Corporate Governance on the Performanceof Lebanesse Banks. *The International Journal of Business and Finance Research*, **8** (5) : 22-34.

El-Gamal, M. A. (2006). Finance, Law, Economics and Practice. Islamic Cambridge.

El-Hawary, D., Grais, W., & Iqbal, Z. (2004). Regulating Islamic Financial Institutions: The nature of the regulated. *World Bank Policy Research Working Paper 3227*.

Emerson, Richard M. (1962). Power-Dependence Relations. *American Sociological Review Vol. **27** (1)*, pp. 31-41.

Eng, L. M. (2003). Corporate Governance and Volunting Disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy,* **22 :** 325-345.

Fama, E. (1980). Agency Problems and the Theory of the Firm. *Journal of Political Economy,* Vol.**88** : 288-307.

Fama, E., & Jensen, M. (1983). Agency Problems and Residual Claims. *Journal of Law and Economics,* **26** : 327-350.

Farook, S; Hassan, K dan Lanis, R. (2011). Determinant of Corporate Social Responsibility Disclosure. Advances in Islamic Economics and Finance: *Proceedings of 6 th International Conference on Islamic Economics and Finance*, Jeddah. 217-247

FCGI, F. (2002). Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance). The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia. *Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy Communication, Jakarta*.

Finkelstein, S., Hambrick, D. C., & Cannella, A. A. (2009). *Strategic Leadership : Theori and Research on Executives, Top Manangement Teams and Boards.* Oxford-UK: Oxford University Press.

Francis, B; Hasan, I dan Wu,Q. (2012). Does Corporate Board Affect Firm Performance? New Evidence from the Financial Crisis. Bank of Finland Research. Discussion Papers No.11.

Freeman, R. (1984). The Association between Accounting Earnings and Security Returns for Large and Small Firms. *Journal of Business Finance and Accounting.* Vol. **29**.No.**7** & **8**. September/October : pp. 967-988.

Frooman, J. (1999). Stakeholder influence Strategies. *Academy of Management Review,* **24** : 191-205.

Ghayad, R. (2013). Corporate Governance and The Global Performance Islamic Banks. *Journal Humanomics,* **24**.3 : pp. 207-206.

Ghozali, I. (2015). *Srructural Equation Modeling : Metode Alternaif dengan Partial Least Squares (PLS). Edisi 4.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Ghozali, I. (2014). *Partial Least Square : Konsep, Metode, dan Aplikasi Menggunakan Warp PLS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gill, A., & Marthur, N. (2011). The Impact of Board Size, CEO Duality, and Corporate Liquidity on the Profitability of Canadian Service Firm. *Journal of Applied Finance & Banking*, **1** (3) : 83-95.

Global Association of Risk Profesionals. (2005). *"Indonesia Certificate in Banking Risk and Regulation : Workbook Level 1". GARP And BSMR*.

Global Corporate Governance Forum. (2004). *The Corporate Governance of Banks : Practical Measures to Strengthen Boards of Directors. The World Bank. The Guildhall, London*.

Gompers, P., Ishii, J., & Metrick, A. (2003). Corporate Governance dan Equity Prices. *Quarterly Journal of Economic,* **118** : 107-155.

Gordon Gemmill, D. C. T. (2004). *Does Governance Affect the Performance of Closed-End Funds?* EFMA 2004 Basel Meetings Paper, Cass Business School Research Paper.

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services. *World Bank Policy Research Working Paper 4054*.

Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). Corporate Governance in Institutions Offering Islamic Financial Services: Issues and Options. *World Bank Policy Research Working Paper 4052*.

Gujarati, D. N., & Porter, D. (2009). Basic Econometrics. Mc Graw-Hill International.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (2010). *Multivariate Data Analysis (7 th ed).* New Jersey: Prentice Hall.

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review Vol **31** (1)*, pp 2-24.

Haji, A. A., & Mubaraq, S. (2015). The Implication of The Revised Code of Corporate Governance on Firm Performance A Longitudinal Examination. *Journal of Accounting in Emerging Economics,* **5** (3) : 350-380.

Hamza, H. (2016). Sharia Governance in Islamic Banks : Effectiveness and Supervision Model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* **6** (3) : 226-237.

Harris, M., & Raviv, A. (1991). The Theory of Capital Structure. *Journal of Finance,* **46** (1) : 297-335.

Hasan, Z. (2012). *Shari`ah Governance in Islamic Banks.* Eidenburgh: Eidenburgh University Press.

Hasan, Z. B. (2011). A Survey on Shari`ah Governance Practices in Malaysia, GCC Countries and the UK. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management,* **4** (1) : 30-51.

Hassan, M.K. (2011). Corporate Governance Practices in Emerging Economics : Initial Findings from the UAE China-USA. *Business Review Journal*, Vol.**10** : 856-864.

Hausman, D. M., & Mc. Pherson, M. S. (2000). Economic Analysis and Moral Philosophy. *Cambridge University Press*.

Hegazy, M., & Hegazy, K. (2010). Corporate Governance in the U.K : Audit Committees and Disclosure Arrangements- A Web-Based Analysis. *Journal of Business Studies Quarterly,* Vol. **1** (2) : pp. 32-55.

Herwidayatmo. (2003). Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Pubik Indonesia. The Essence of Good Corporate Governance: Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia. *Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy Communication. Jakarta*.

Hilman, A., & Dalziel, T. (2003). Boards of Directors and Firm Perfromance : Integrating Agency and Resource Dependency Perspectives. *Academy of Management Review,* **28** : 383-396.

Husnin, A. I., Nawawi, A., & Salin, A. S. (2016). Corporate Governance and Auditor Quality-Malaysian Evidence. *Asian Review of Accounting,* **24** (2) : 202-230.

Hussain, M. M. (2006). Guiding Principles on Corporate Governance of Institutions Offering Islamic Financial Services (IIFS): An Insight of the Exposure Draft. *IDB Lecture Series 23 May 2006*.

Hussainey, K., & Aljifri, K. (2012). Corporate governance mechanisms and capital structure in UAE. *Journal of Applied Accounting Research,* **13** (2) : 145-160.

IAI, (2009). Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah

IFSB, I. (2009). Guiding Principles On Shariah Governance System for Institution Offering Islamic Financial Setvices. *Islamic Financial Services Board. Kuala Lumpur*.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2004). Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System. *Islamic Economic Studies,* **11** (2) : 43-63.

Islam, M.Z; Islam, M.N; Bhattacharjee, S dan Islam, A.Z. (2009). Agency Problem and The Role of Audit Committee : Implication for Corporate Sector in Bangladesh. *International Journal of Economics and Finance*, vol. **2** No. 3 : 177

Ismail. (2002). The Deferred Contracts of Exchange : Al-Quran in Contrast with the Islamic Economist`s Theory on Banking and Finance. Malaysia.

Jaffar, R., & Abdul Shukor, Z. (2016). The Role of Monitoring Mechanisms Towards Company`s Performance Evidence from Politically Connected. *Journal of Accounting in Emerging Economics*, **6** (4) : 408-428.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics,* V. **3**, No. 4 : 1-78.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit and Failure of Internal Control System. *The Journal of Finance,* **48** : 831-880.

Jensen, M. C., & Warner, J. B. (1998). The Distribution of Power Among Corporate Manager, Shareholders and Directors. *Journal of Financial Economics,* vol, **20** no 1 : 3-24.

Jiang, W., Lee, P., & Anandarajan, A. (2008). The Association Between Corporate Governance and Earnings Quality : Further Evidence Using GOV-Score. *Advances in Accounting, Incorporating Advancesin International Accounting,* **24** : 191-201.

Jiang, Y., & Peng, M. W. (2011). Are Family Ownership and Control in Large Firm Good, Bad or Irrelevant? *Asia Pasific Journal Management,* **28** : 15-39.

John Byrd, K. H. (1992). Do Outside Directors Monitor Managers? Evidence From Tender Offer Bids. *Journal of Financial Economics ,* 32(2), pp. 195-221.

John, K., & Senbet, L. W. (1998). Corporate governance and board effectiveness. *Journal of Banking and Finance,* **22** : 371-401.

Johnes, J., Izzedin, M., & Pappas, V. (2013). A Comparison of Performance of Islamic and Conventional Bank 2004-2009. *Journal of Economic Behaviour and Organozation,* **103** : 93-107.

Kakabadse, N. K., Yang, H., & Sanders, R. (2010). The Effectiveness of non-executive directors in Chinese State-owned Enterprises. *Management Decision*, **48** (7) : 1063-1079.

Karim, R. A. (2000). The Independence of Religius and External Auditors : The Case of Islamic Bank. *The Faculty of Commerce, Economics and Political Science. Kuwait*.

Karwowski, E. (2009). Financial Stability : The Significance and Distinctiveness of Islamic Banking in Malaysia. *Working Paper 555. University of London*.

Kasim, N., Htay, S. N., & Salman, S. A. (2013). Conceptual Framework for Shariah Corporate Governance with Special Focus on Islamic Capital Market in Malaysia. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol **4** No 5 : pp. 336-339.

Kasri, R. (2009). Corporate governance: conventional vs. Islamic perspective. *Islamic Perspective*.

Kasri, R. A. (2012). Corporate Governance: Conventional VS Islamic Perspective. *Departement of Economics / Islamic Economics & Business Center University of Indonesia*.

Keasey, & Wright. (1997). Corporate Governance : Responsibility, Risk dan Remuneration. John Wiley.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. Kep. 117/M-MBU/ 2002 tentang praktik GCG pada BUMN. (2002).

Khalid, A. A., Haron, H. H., & Masron, T. A. (2017). Relationship between Internal Shariah Audit Characteristics and its Effectiveness. *Journal Humanomics*, **33** (2) : 221-238.

Khatab, H., Masood, M., Zaman, K., Saleem, S., & Saeed, B. (2011). Corporate Governance and Firm Performance A Case Study of Karachi Stock Market. *Journal of Trade, Economics and Finance.* Vo.**2** (1).

Kim, J., & Yi, C. H. (2005). Ownership Stucture, Business Group Affiliation, Listing Status and Earnings Management: Evidence from Korea.

Kim, P. K., Rasiah, D., & Tasnim, R. B. (2013). A Review of Corporate Governance: Ownership Structure of Domestic-Owned Banks in Term of Government Connected Ownership, and Foreign Ownership of Commercial Banks in Malaysia. *Journal of Organizational Management Studies*, pp. 1-18.

Klapper, L. F., & Love, I. (2004). Corporate Governance, Investor Protection and Performance in Emerging Markets. *Journal of Corporate Finance*, Vol **10** (5) : 703-728.

KNKG. (2012). *Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance*.

Komite Nasional Governance Indonesia. (2011). *Konsep Pedoman Good Governance Bisnis Syariah*.

Kompas, (2011). "Lima Pegawai Bank Jateng Syariah Dipecat". https://regional.kompas.com/read/2011/10/29/0453347/lima.pegawai.bank.jateng.syariah.dipecat (diakses pada 27 November 2020).

Korac-Kakabadse, N., Kakabadse, A. K., & Kouzmin, A. (2001). Board Governance and Company Performance : Any Correlations? *Corporate Governance,* **1** : 24-30.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Schleifer, A., & Vishny, R. (1998). Law and Finance. *Journal of Political Economy,* No. 106 : 1113-1155.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Vishny, R., & Schleifer, A. (2002). Investor Protection and Corporate Valuation". *The Journal of Finance* **57** (3) : 1147-1170.

Laela, S. F. (2012). Kualitas Laba dan Corporate Governance : Benarkah Kualitas Laba Bank Syariah Lebih Rendah dari Bank Konvensional? *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, **9** (1) : 22-42.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance. (2010-2017). *Bank Muamalat Indonesia*.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance. (2010-2017). *Bank BCA Syariah*.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance. (2010-2017). *Bank BNI Syariah*.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance. (2010-2017). *Bank BRI Syariah*.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance. (2010-2017). *Bank Bukopin Syariah*.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance. (2010-2017). *Bank Syariah Mandiri*.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance. (2010-2017). *Bank Mega Syariah*.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance. (2010-2017). *Bank Panin Syariah*.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance. (2010-2017). *Bank Victoria Syariah*.

Larcker, D. F., Richardson, A. A., & Tuna, I. (2007). Corporate Governance, Accounting Outcomes and Organizational Performance. *The Accounting Review,* **82** : 963-1008.

Letza, Steve, Xiuping Sun, and James Kirkbride. (2004). Shareholding Versus Stakeholding: a critical review of corporate governance. *Blackwell Publishing Ltd Volume **12** (3)* : 242-262.

Lewis, M. K. (2001). Islam and Accounting. *Accounting Forum,* **25** (2) : 103-127.

Lewis, M.K.(2005). Islamic Corporate Governance. *Review of Islamic Economics*, Vol. **9** : 5-29

Lukviarman, N. (2004). Ownership Structure and Firm Performance: The Case of Indonesia. *Published Dissertation of Curtin University of Technology*.

Lukviarman, N. (2016). *Corporate Governance : Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia.* Solo: Era Adicitra Intermedia .

Lukviarman, N., & Johan, A. P. (2018). Meta-Analysis of Corporate Governance in Asia. *Journal Business Perspective Investment Management and Financial Innovations,* **15** (2).

Macey, J. R., & O'Hara, M. (2003). Solving the Corporate Governance Problems of Banks: A Proposal. *Banking L.J , 120*, 2006.

Mahmood, I., & Abbas, Z. (2013). Impact of Corporate Governance on Financial Performance of Banks in Pakistan. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business*, pp. 217-228.

Mahmoud, A. E. (2006). *Islamic Finance, Law, Economic and Practice.* New York: Cambridge University Press.

Manaseer, M. F., Al-Hindawi, R. M., Al-Dahiyat, M. A., & Sartawi, I. I. (2012). The Impact of Corporate Governance on the Performance of Jordanian Banks. *European Journal of Scientific Research. ISSN 1450-216X.* Vol.**67** (3) : pp. 349-359.

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana.

Matoussi, H. (2014). Is corporate governance different for Islamic banks? A comparative analysis between the Gulf Cooperation Council and Southeast Asian countries. *International Journal of Business Governance and Ethics,* 9(1), pp. 27-51.

Matthias, K. (2013). Ownership Structure, Regulation and The Market for Corporate Control in The EU Banking Sector. *European Journal of Law and Economics*, pp.173-196.

Mayer, R. C. (2003). Corporate Governance, Competition and Performance. *Journal of Law and Society,* **24** (3) : 11-12.

Mc Connell, J. J., & Servaes, H. (1990). Additional Evidence on Equity Ownership and Corporate Value. *Journal of Financial Economics,* Vol. **27** : pp. 595-612.

Metwally. (1995). *Teori dan Ekonomi Islam.* Jakarta: Bangkit Daya Insani.

Milhaupt, C. J., & West, M. D. (2004). *Economic Organizations and Corporate Governance in Japan : The Impact of Formal and Informal Rules.* New York: Oxford University Press Inc.

Mingkan, L. (2001). Reform the Bank of China by GCG. *Paper Asia Pasific Submit, Vancouver,* **11** : 1-6.

Mirakhor, A. (2000). General Characteristics of an Islamic Economic System : Anthologi of Islamic Banking. *Institute of Islamic Banking and Insurance.London,* **8** : 11-13.

Mishkin, F. S. (1999). Understanding Financial Crisis : A Developing Country Perspective. *NBER Working Paper,* **5** : 1-49.

Mitton, T. (2004). Corporate Governance and Dividend Policy in Emerging Market. *Emerging Market Review,* **5** : 409-426.

Moin, M. S. (2008). Performance of Islamic Banking and Conventional Banking in Pakistan: a Comparative Study.

Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari`ah Supervision, Corporate Governance and Performance : Conventional vs Islamic Banks. *Journal of Banking and Finance.* **58**.

Morck, R. A., Shleifer, & Vishny, R. (1988). Management Ownership and Market Valuation : An Empirical Analysis. *Journal of Financial Economics,* **20** : 293-315.

Mulyawan, D. (2006). Risk Management dan Penerapan Good Corporate Governance di Perbankan Syariah. *Makalah Seminar GCG in Islamic Banking. Jakarta*.

Muqorobin, M. (2011). Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar. *Disampaikan pada Seminar Nasional Tata Kelola dan Rapat Kerja tanggal 25-27 Maret 2011 Universitas Muhammadiyah Purwekerto*.

Musibah,, A. S., & Alfattani, W. S. (2017). he Mediating Effect of Financial Performance on The Relationship between Shariah Supervisory Board Effectiveness, Intellectual Capital and Corporate Social Responsibility of Islamic Banks in Gulf Cooperation Council Countries. *Asian Social Science,* **10** (17) : 139-164.

Naceur,S.B. (2003). The Determinants of the Tunisian Banking Industry Profitability : Panel Evidence. Working Paper. Universite Libre de Tunis. Marrakesh

Naqvi, S. N. (2003). Perspective and Morality and Human Well-Being : A Contribution to Islamic Economics. *The Islamic Foundation. Leicester*.

Nathan Garas, S., & Pierce, C. (2010). Shari`a Supervision of Islamic Financial Institutions. *Journal of Financial Regulation and Compliance.* **18** (4).

Nguyen, B.D. dan Nielsen, K.M. 2010/ The Value of Independent Directors : Evidence from Sudden Death. *Journal of Financial Economics,* Vol. **98** No.3 : 550-567

Nicholson, G. J., & Kiel, G. C. (2007). Can Directors Impact Performance : A Case Based Test of Three Theories of Corporate Governance. *Corporate Governance : An International Review,* **15** : 585-608.

Nisaputra, Rezkiana. (2018) LPPI: Praktik GCG di Perbankan Semakin Menurun. https://infobanknews.com/topnews/lppi-praktik-gcg-di-perbankan-semakin-menurun/ (diakses pada 27 November 2020).

Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari`ah Supervisory Board Characteristics Effects on Islamic Banks` Performance : Evidence from Malaysia. *International Journal of Bank Marketing (IJBM),* **36** (2) : 290-304.

Nur'ainy, R., Nurcahyo, B., Kurniasih, S. A., & Sugiharti, B. (2013). Implementation of Good Corporate Governance and Its impact on Corporate Performance : The Mediation Role of Firm Size (Empirical Study from Indonesia). *Global Business and Management Research : An International Journal,* **5** (2) : 91-104.

OECD. (2004). OECD Principles of Corporate Governance.

Olson, D., & Zoubi, T. A. (2008). Using Accounting Ratios to Distinguish Between Islamic and Conventional Banks in the GCC Region. *The International Journal of Accounting,* **43** (1) : 45-65.

Outlook Perbankan Syariah. (2014). *Bank Indonesia. 16 Desember 2013*.

Owolabi, S. A., & Dada, S. O. (2011). Audit Committee: An Instrument of Effective Corporate Governance. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. ISSN 1450-2275* Issue **35** : 173-183.

Patthan, S dan Faff, R. (2013). Does Board Structure in Banks Really Affect Their Performance? *Journal of Banking and Finance*, **37** : 1573-1589

Peni, E., Smith, S. D., & Vahamaa, S. (2013). Bank Corporate Governance and Real Estate Lending During the Financial Crisis. *JRER.* Vo. **3** (3).

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009. (2009). *tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 diubah Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2009. (2009). *Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum*.

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 "*Tentang Bank Umum yang Melaksananakn Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah*"

Pfeffer, J & Salancik, G. R. (1978). *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective.* New York: Harper & Row.

Pound, J. (1988). Proxy Contents and Efficiency of Shareholder Oversight. *Journal of Financial Economics,* Vol. **20** : pp. 237-265.

Prabowo, Dani. (2013) Beri Kredit Fiktif Rp 102 Miliar, Tiga Pegawai BSM Bogor Ditangkap 23 Oktober 2013. https://nasional.kompas.com/read/2013/10/23/1501396/Beri.Kredit. Fiktif.Rp.102.Miliar.Tiga.Pegawai.BSM.Bogor.Ditangkap (diakses November 2020).

Pratiwi, A.(2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015).Al-Tijary : *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,* Vol. **2**. no.1. 55-76 P-ISSN :2460-9404, E-ISSN : 2460-9412. DOI prefix : 10.21093

Prowsen, S. (1998). *Emerging Issues and Lessons from East Asia*. Diambil kembali dari Corporate Governance: http://www.worldbank.org

Purnomosidi, L., Suhadak, Siregar, H., & Dzulkirom, M. (2014). The Influences of Company Size, Capital Structure, Good Corporate Governance, Inflation, Interest Rate and Exchange Rate on Financial Performance and Value of the Company. *Interdiciplinary Journal of Contemporary Research in Business,* **5** (10), 24-42.

Rahman, A.A dan Bukair, A.A. (2013). The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Bank of Gulf co-operation council countries. *Asian Journal of Business and Acconting*, Vol. **6**. No.2 : 65-104

Rajan, R. G., & Zingales, L. (1998). Financial Dependence and Growth. *The American Economic Review,* **88** (3*)* : 559-586.

Ramli, J. A., & Ramli, M. I. (2016). Corporate Governance and Corporate Performance of Malaysian Companies : Examining Firm an Islamic Perspective. *Procedia Economics and Finance.* **35**, 146-155.

Safieddine, A. (2009). Islamic Financial Institutions and Corporate Governance : New Insight for Agency Theory. *Corporate Governance : An Internationa Review Journal,* **17** (2) : 142-158.

Safieddine, A.(2009). Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory. Corporate Governance : An International review. Vol **17**. No.2 : 142-158

Salman, A. K., & Yasdanfar, D. (2012). Profitability in Swiedish Micro Firms : a Quantile Regression Approach. *International Business Research*, **5** (8) : 94-106.

Sammy, N., & Vincent, R. (2013). From Knowledge to Wisdom: The Case of Corporate Governance in Islamic Banking. *Journal VINE,* **37**.(4) : 471-483.

Samontaray, D. P. (2010). Impaxt of Corporate Governance on The Stock Prices of The Nifty 50 Board Index Listed Companies. *International Research Journal of Finance and Economics*, ISSN 1450-2887. Issue 41

Scott, W. R. (2000). Financial Accounting Theory. *University of Waterloo. Prentice-Hall, Inc. New Jersey*.

Setiawan, Sakina Rakhma Diah. (2018) Riset: Perhatian Perbankan pada "Good Corporate Governance" Menurun.. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/31/150600426/riset--perhatian-perbankan-pada-good-corporate-governance-menurun (diakses pada 16 November 2020).

Shaker, A. Z., & John, A. P. (1989). Boards of Directors and Corporate Financial Performance : A Review and Integrative Model. *Journal of Management,* **15** : 291-334.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance,* Vol. **52** (2) : 737-783.

Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0.* CV Andi Offset: Yogyakarta.

Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis.* (Seno, Penyunt.) Yogyakarta, DIY, Indonesia: Penerbit ANDI Yogyakarta.

Siagian, F., Siregar, S. V., & Rahadian, Y. (2013). Corporate Governance, Reporting Quality, and Firm Value : Evidence from Indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economics*, **3** (1) : 4-20.

Siddiqi, M. N. (2000). Banking Without Interest the Islamic Foundation. *Leicester*.

Sierra, G.E; Talmor, E dan Wallace, J.S. (2006). An Examination of Multiple Governance Forces Within Bank Holding Companies. *Journal of Financial Services Research*, **29** : 105-123

Smith, C. W., & Watts, R. L. (1992). The Investment Opportunity Set and Corporate Financing, dividend and compensation policy. *Journal of Financial Economics,* Vol. **32** : pp. 185-190.

Spong, K., & Sullivan, R. J. (2007). Corporate Governance and Bank Performance. *Research Department : Federal Reserve Bank of Kansas City*, 1-31.

Statistik Perbankan Syariah. (2013). *Direktorat Bank Indonesia*.

Statistik Perbankan Syariah. (2017). *Direktorat Bank Indonesia*.

Stuart Rosenstein, J. G. W. (1990). Outside directors, board independence, and shareholder wealth. *Journal of Financial Economics,* 26(2), pp. 175-191.

Sulaiman, A. S., & Joriah, M. (2013). Introduction to Corporate Governance from Islamic Perspective. *Journal of Humanomics,* **28** (3) : pp. 220-231.

Suprayogi, N. (2007). The Internal Sharia Supervision Activities in Islamic Bank. *IICBiF, Kuala Lumpur Malaysia*, 1-11.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbs. tanggal 24 Agustus 2006" Tentang Semua Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06/2000. "Tentang penyelenggaraaan *good corporate governance* (GCG)".

Surat Keputusan DSN MUI No. 3/2000. "Tentang Petunjuk Pelaksanaan penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah".

Surat Keputusan DSN MUI No. 1/2000. "Tentang Petunjuk Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional (DSN)"

Sutedi, A. (2009). Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sweeney, A. P. (1994). Debt Covenant Violations and Managers Accounting Responses. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. **17** : pp. 281-308.

Sweeting, A. (2000). Disscuss the Reason Why Asymetric Information Can be a Source of Market Failure. *Economic Research and Analysis*, 1-7.

Syahkhroza, A. (2005). Corporate Governance : Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan System Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. *FE Universitas Indonesia*.

Syam, D., & Nadja, T. (2012). Analisis Kualitas Penerapan GCG dan Pengaruhnya terhadap ROA dan NPFS. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan,* **2** (1).

Tertius, M. A., & Christiawan, Y. Y. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan. *Business Accounting Review. 2 (1)*, 223-232.

Triyono. (2012). Corporate Governance Quality, Perfromance and Firm Value : Evidence from Selected Corporate Governance Perception Index. *Working Papes. Presented on Malaysia Indonesia International Conference in Economics, Accounting and Management (13 th MIICEMA), Universitas Sriwijaya*.

Turk Arris, R. (2010). On The Implications of Market Power in Banking: Evidence from Developing. *Journal of Banking & Finance,* **34** (4) : 765-775.

Turnbull. (1997). Corporate Governance: Its Scope, Concern and Theories. *Corporat Governance: Scholarly Research and Theory Papers,* Vol. **5** (4) : pp.180-205.

Ullah, S., & Lee, K. H. (2012). Do Customers Patronize Islamic Banks for Shari`a Compliance? *Journal of Finance Service Marketing,* **17** (3) : 206-214.

Umbu, Wilfidrus Setu. (2018). Penerapan Tata Kelola Baik Perusahaan Indonesia Tertinggal di ASEAN. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3804198/penerapan-tata-kelola-baik-perusahaan-indonesia-tertinggal-di-asean (diakses pada 16 November 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003. (2003). *Keuangan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003. (2003). *Tentang Badan Usaha Milik Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. (2008). *Tentang Perbankan Syariah*.

Ur Rehman, R., & Mangla, I. U. (2013). Does Corporate Governance Influence Banking Performance? *Journal of Leadership, Accountability and Ethics*, pp. 86-92.

Van den Berghe, L. A., & Levrau, A. (2004). Evaluating Boards of Directors : What Constitutes a good Corporate Board? *Corporate Governance : An International Review,* **12** : 461-478.

Walfajri, M. (2018, Agustus 21). *Profitabilitas bank syariah masih mini*. Diambil kembali dari https://keuangan.kontan.co.id/news/profitabilitas-bank-syariah-masih-mini

Wallace, W. A., & Cravans, K. S. (2006). Evaluating Control Risk From a Corporate Governance Perspective. *Managerial Finance*, pp. 22.

Weisbach, M. (2003). Outside Director and CEO Turnover. *Journal of Financial Economics,* **20** : 431-460.

Widiyanti, N. W. (2009). Corporate Governance dalam Pandangan Islam: Sebuah Konsep Altertantif dalam Penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, **7** (2) : 104-111.

Wintoki, M.B; Linck, J.S dan Netter, J.M. (2012). Endogenity and the Dynamics of Corporate Governance. *Journal of Financial Economics,* **105** : 581-606

Williamson, O. E., 1985. *The Economic Intstitutions of Capitalism.* New York: Simon & Schuster.

Yermack, D. (2000). Higher Market Valuation of Companies with a Small Board of Director. *Journal of Financial Economics,* **40** : 185-211.

Zerni, M; Kallunki,J.P dan Nilsson, H. (2010). The Entrenchment Problem, Corporate Governance Mechanism, and Firm Value. *Contemporary Accounting Research*, Vol. **27** No. 4 : 1169-1206

Zhuang, J., Edwards, D., Webb, D. C., & Capulong, M. V. (2000). *Corporate Governance and Finance in East Asia-a study of Indonesia. Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand.* Manila: Asia Development Bank.

LAMPIRAN 1

DATA DISERTASI

No	Nama Bank Syariah	Tahun	DPS 1	DPS 2	DPS 3	DPS 4	DPS 5	DPS 6	DPS 7	DPS 8	DPS 9	DPS 10	DPS 11	DPS 12	DPS 13	DPS 14	DPS 15	DPS 16
1	Bank MUAMALAT	2010	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
2	Bank MUAMALAT	2011	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
3	Bank MUAMALAT	2012	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
4	Bank MUAMALAT	2013	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
5	Bank MUAMALAT	2014	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
6	Bank MUAMALAT	2015	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
7	Bank MUAMALAT	2016	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
8	Bank MUAMALAT	2017	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
9	Bank BCA Syariah	2010	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
10	Bank BCA Syariah	2011	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
11	Bank BCA Syariah	2012	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0
12	Bank BCA Syariah	2013	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
13	Bank BCA Syariah	2014	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
14	Bank BCA Syariah	2015	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
15	Bank BCA Syariah	2016	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
16	Bank BCA Syariah	2017	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
17	Bank BNI Syariah	2010	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
18	Bank BNI Syariah	2011	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
19	Bank BNI Syariah	2012	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
20	Bank BNI Syariah	2013	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
21	Bank BNI Syariah	2014	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
22	Bank BNI Syariah	2015	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
23	Bank BNI Syariah	2016	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
24	Bank BNI Syariah	2017	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
25	Bank BRI Syariah	2010	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1
26	Bank BRI Syariah	2011	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
27	Bank BRI Syariah	2012	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
28	Bank BRI Syariah	2013	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
29	Bank BRI Syariah	2014	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
30	Bank BRI Syariah	2015	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
31	Bank BRI Syariah	2016	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
32	Bank BRI Syariah	2017	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
33	Bank Bukopin Syariah	2010	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
34	Bank Bukopin Syariah	2011	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
35	Bank Bukopin Syariah	2012	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
36	Bank Bukopin Syariah	2013	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
37	Bank Bukopin Syariah	2014	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
38	Bank Bukopin Syariah	2015	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
39	Bank Bukopin Syariah	2016	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0

40	Bank Bukopin Syariah	2017	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
41	Bank Mandiri Syariah	2010	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
42	Bank Mandiri Syariah	2011	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
43	Bank Mandiri Syariah	2012	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
44	Bank Mandiri Syariah	2013	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
45	Bank Mandiri Syariah	2014	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
46	Bank Mandiri Syariah	2015	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
47	Bank Mandiri Syariah	2016	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
48	Bank Mandiri Syariah	2017	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
49	Bank Mega Syariah	2010	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
50	Bank Mega Syariah	2011	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
51	Bank Mega Syariah	2012	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
52	Bank Mega Syariah	2013	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
53	Bank Mega Syariah	2014	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
54	Bank Mega Syariah	2015	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
55	Bank Mega Syariah	2016	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
56	Bank Mega Syariah	2017	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
57	Bank Panin Syariah	2010	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
58	Bank Panin Syariah	2011	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0
59	Bank Panin Syariah	2012	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
60	Bank Panin Syariah	2013	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
61	Bank Panin Syariah	2014	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
62	Bank Panin Syariah	2015	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
63	Bank Panin Syariah	2016	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
64	Bank Panin Syariah	2017	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0
65	Bank Victoria Syariah	2010	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
66	Bank Victoria Syariah	2011	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
67	Bank Victoria Syariah	2012	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
68	Bank Victoria Syariah	2013	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
69	Bank Victoria Syariah	2014	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
70	Bank Victoria Syariah	2015	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
71	Bank Victoria Syariah	2016	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
72	Bank Victoria Syariah	2017	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0

DPS 17	DPS 18	TDPS	PDPS	KOMITE AUDIT	Jumlah Dewan Direksi	Persentase Komisaris Independen	Nilai Komposit GCG	KEPEMILIKAN INSTITUSI	KEPEMILIKAN PUBLIK	KEPEMILIKAN PEMERINTAH
1	1	10	0,555556	3	6,00	0,500000000000000	1,40	87,42%	1	0
1	1	10	0,555556	3	6,00	0,500000000000000	1,30	87,42%	1	0
1	1	10	0,555556	3	6,00	0,500000000000000	1,15	87,42%	1	0
1	1	11	0,611111	3	5,00	0,600000000000000	1,15	87,42%	1	0
1	1	11	0,611111	4	7,00	0,571428571428571	3,00	87,42%	1	0
1	1	11	0,611111	4	5,00	0,400000000000000	3,00	87,42%	1	0
1	1	13	0,722222	4	7,00	0,600000000000000	2,00	87,42%	1	0
1	1	13	0,722222	3	7,00	0,600000000000000	3,00	87,42%	1	0
1	1	8	0,444444	5	3,00	1,333333333333330	2,10	100%	0	0
1	1	8	0,444444	3	3,00	1,000000000000000	1,90	100%	0	0
1	1	11	0,611111	3	3,00	1,000000000000000	1,80	100%	0	0
1	1	10	0,555556	3	3,00	1,000000000000000	1,55	100%	0	0
1	1	10	0,555556	3	3,00	1,000000000000000	1,00	100%	0	0
1	1	9	0,5	4	3,00	1,000000000000000	1,00	100%	0	0
1	1	12	0,666667	3	3,00	0,666670000000000	1,00	100%	0	0
1	1	12	0,666667	3	3,00	0,666670000000000	1,00	100%	0	0
0	1	10	0,555556	3	3,00	1,000000000000000	1,63	100%	0	0
0	1	10	0,555556	3	3,00	0,666666666666667	1,68	100%	0	0
1	1	10	0,555556	4	3,00	1,333333333333330	1,25	100%	0	0
0	1	9	0,5	6	4,00	1,000000000000000	1,30	100%	0	0
1	1	11	0,611111	5	4,00	1,250000000000000	2,00	100%	0	0
1	1	11	0,611111	5	4,00	0,750000000000000	2,00	100%	0	0
1	1	11	0,611111	4	3,00	0,750000000000000	2,00	100%	0	0
1	1	11	0,611111	4	4,00	0,750000000000000	2,00	100%	0	0
1	1	12	0,666667	4	4,00	0,250000000000000	1,61	100%	1	0
1	1	13	0,722222	4	5,00	0,200000000000000	1,55	100%	1	0
1	1	13	0,722222	5	5,00	0,400000000000000	1,38	100%	1	0
1	1	13	0,722222	4	5,00	0,200000000000000	1,35	100%	1	0
1	1	13	0,722222	4	4,00	0,500000000000000	1,86	100%	1	0
1	1	13	0,722222	5	5,00	0,800000000000000	1,61	100%	1	0
1	1	13	0,722222	6	5,00	0,400000000000000	1,60	100%	1	0
1	1	13	0,722222	6	5,00	0,600000000000000	1,57	100%	1	0
1	1	10	0,555556	3	4,00	0,000000000000000	1,60	86,54%	0	1
1	1	10	0,555556	3	4,00	0,000000000000000	1,60	92,82%	0	1
1	1	10	0,555556	2	4,00	0,000000000000000	1,50	91,26%	0	1
1	1	9	0,5	2	4,00	0,000000000000000	1,50	91,26%	0	1
1	1	10	0,555556	2	4,00	0,500000000000000	1,50	94,863%	0	1
1	1	10	0,555556	3	4,00	0,750000000000000	1,50	95,738%	0	1
1	1	10	0,555556	3	4,00	0,500000000000000	1,50	96,36%	0	1

1	1	10	0,555556	3	4,00	0,500000000000000	1,50	97,18%	0	1
0	1	12	0,666667	4	6,00	0,666666666666667	1,35	100%	0	0
1	1	12	0,666667	4	6,00	0,666666666666667	1,72	100%	0	0
1	1	12	0,666667	4	6,00	0,333333333333333	1,68	100%	0	0
1	1	13	0,722222	5	6,00	0,666666666666667	1,85	100%	0	0
1	1	12	0,666667	6	8,00	0,250000000000000	2,12	100%	0	0
1	1	12	0,666667	7	5,00	0,800000000000000	2,00	100%	0	0
1	1	13	0,722222	7	6,00	0,600000000000000	1,00	100%	0	0
1	1	13	0,722222	6	7,00	0,750000000000000	1,00	100%	0	0
1	1	13	0,722222	3	5,00	0,400000000000000	1,83	100%	0	0
1	1	13	0,722222	3	3,00	0,000000000000000	1,83	100%	0	0
1	1	13	0,722222	3	5,00	0,600000000000000	1,60	100%	0	0
1	1	13	0,722222	3	4,00	0,500000000000000	1,87	100%	0	0
1	1	13	0,722222	3	4,00	0,750000000000000	2,00	100%	0	0
1	1	13	0,722222	3	3,00	0,666666666666667	1,54	100%	0	0
1	1	12	0,666667	3	3,00	1,000000000000000	2,00	100%	0	0
1	1	12	0,666667	3	3,00	1,000000000000000	2,00	100%	0	0
0	0	7	0,388889	3	4,00	0,500000000000000	2,20	99,997%	0	0
0	0	7	0,388889	3	4,00	0,000000000000000	1,95	99,997%	0	0
1	1	10	0,555556	3	4,00	0,750000000000000	1,35	99,997%	0	0
1	1	10	0,555556	3	4,00	0,750000000000000	1,35	99,99%	0	0
1	1	10	0,555556	3	4,00	0,750000000000000	1,40	76,82%	1	0
1	1	10	0,555556	3	4,00	0,750000000000000	2,00	91,36%	1	0
1	1	10	0,555556	3	4,00	0,500000000000000	2,00	90,93%	1	0
1	1	10	0,555556	3	3,00	0,500000000000000	3,00	82,94%	1	0
1	1	9	0,5	3	3,00	0,333333333333333	1,75	53,97%	1	0
1	1	10	0,555556	3	3,00	0,333333333333333	1,69	53,97%	1	0
1	1	11	0,611111	3	3,00	0,333333333333333	2,07	53,58%	1	0
1	1	11	0,611111	3	4,00	0,250000000000000	1,66	53,18%	1	0
1	1	11	0,611111	3	4,00	0,750000000000000	1,93	48,32%	1	0
1	1	11	0,611111	3	4,00	0,750000000000000	3,00	48,32%	1	0
1	1	11	0,611111	3	4,00	0,666670000000000	2,00	67,95%	1	0
1	1	11	0,611111	3	4,00	0,666670000000000	2,00	51,42%	1	0

KEPEMILIKAN MANAJERIAL	KEPEMILIKAN INDIVIDU	PRIVAT OWNERSHIP >80%	MAJORITY CONTROL 50-80%	MINORITY CONTROL 20-50%	MANAGEMENT CONTROL <20%	ROA	ROE	Ln Total Asset
0	1	0	0	1	1	1,36	17,78	30,6964005268909
0	1	0	0	1	1	1,52	20,79	31,1116304217468
0	1	0	0	1	1	1,54	29,16	31,4344430942417
0	1	0	0	1	1	1,37	32,87	31,6327754957970
0	1	0	0	1	1	0,17	2,20	31,7647501349805
0	1	0	0	1	1	0,20	2,78	31,6765363056901
0	1	0	0	1	1	0,22	3,00	31,6525511832867
0	1	0	0	1	1	0,11	0,87	31,7532551208610
0	0	1	0	0	1	0,78	1,70	27,4970679200718
0	0	1	0	0	1	0,90	2,30	27,8274896309484
0	0	1	0	0	1	0,84	2,80	28,1023869419628
0	0	1	0	0	1	1,01	4,30	28,3446662702106
0	0	1	0	0	1	0,80	2,90	28,7277814027879
0	0	1	0	0	1	1,00	3,20	29,1011004153405
0	0	1	0	0	1	1,10	3,50	29,2395799097421
0	0	1	0	0	1	1,20	4,30	29,4162886375149
0	0	1	0	0	1	0,61	3,65	29,4865256666041
0	0	1	0	0	1	1,29	6,63	29,7592528217778
0	0	1	0	0	1	1,48	10,18	29,9961408173175
0	0	1	0	0	1	1,37	11,73	30,3194469458460
0	0	1	0	0	1	1,27	10,83	30,6010309868404
0	0	1	0	0	1	1,43	11,39	30,7672831674313
0	0	1	0	0	1	1,44	11,94	30,9743836785698
0	0	1	0	0	1	1,31	11,42	31,1812831799174
0	0	1	0	0	1	0,35	1,28	29,5562015966894
0	0	1	0	0	1	0,20	1,19	30,0469348942296
0	0	1	0	0	1	0,35	10,41	30,2764093629283
0	0	1	0	0	1	0,20	10,20	30,4875438495051
0	0	1	0	0	1	0,08	0,44	30,6437702283060
0	0	1	0	0	1	0,76	6,20	30,8186228446794
0	0	1	0	0	1	0,95	7,40	30,9519908950474
0	0	1	0	0	1	0,51	4,10	31,0823849840352
1	1	0	1	0	1	0,74	9,65	28,4167255996936
1	1	0	1	0	1	0,52	6,19	28,6353325821549
1	1	0	1	0	1	0,55	7,32	28,9164192904479
1	1	0	1	0	1	0,69	7,63	29,0996023569903
1	1	1	0	0	1	0,27	2,44	29,2720578418958
1	1	1	0	0	1	0,79	5,35	29,3935497513183
1	1	1	0	0	1	-1,12	-13,74	29,5626714151555

1	1	1	0	0	1	0,02	0,20	29,6004046176963
0	0	1	0	0	1	2,21	25,05	31,1117032958155
0	0	1	0	0	1	1,95	24,24	31,5161240052516
0	0	1	0	0	1	2,25	25,09	31,6242442349994
0	0	1	0	0	1	1,53	23,01	31,7893628211725
0	0	1	0	0	1	0,17	1,49	31,8350518839598
0	0	1	0	0	1	0,56	5,92	31,8847840158190
0	0	1	0	0	1	0,59	5,81	31,9983365952372
0	0	1	0	0	1	0,59	5,72	32,1076733097439
0	0	1	0	0	1	1,90	26,81	29,3475181006561
0	0	1	0	0	1	1,58	16,89	29,1653043547619
0	0	1	0	0	1	3,81	57,98	29,8416636024727
0	0	1	0	0	1	2,33	26,23	29,8416636024727
0	0	1	0	0	1	0,29	2,50	29,5832807626200
0	0	1	0	0	1	0,30	1,61	29,3465867535200
0	0	1	0	0	1	2,63	11,97	29,4450706264028
0	0	1	0	0	1	1,56	6,75	29,5818192751737
0	1	1	0	0	1	-2,53	-4,71	26,8516913857158
0	1	1	0	0	1	1,75	2,80	27,6508237432247
0	1	1	0	0	1	3,48	8,20	27,6495298889091
0	1	1	0	0	1	1,03	4,44	28,3920522018331
0	0	0	1	1	0	1,99	7,01	29,4566189446857
0	0	0	1	1	1	1,14	4,94	29,5959261396651
0	0	0	1	1	1	0,37	1,76	29,8009845284416
0	0	0	1	1	1	-10,77	-94,01	29,7861816136715
0	1	0	0	1	1	1,09	2,41	26,5403769969096
0	1	0	0	1	1	6,93	18,69	27,1878541406364
0	1	0	0	1	1	1,43	8,93	27,5659491191848
0	1	0	0	1	1	0,50	3,70	27,9109230010614
0	1	0	0	1	1	-1,87	-17,61	27,9954088749600
0	1	0	0	1	1	-2,36	-15,06	27,9525723204410
0	0	0	0	1	1	-2,19	-17,45	28,1166416941856
0	1	0	0	1	1	0,36	2,01	28,3257239466646

LAMPIRAN 2

OUPUT PERSAMAAN 1

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 1

```
******************************
* General SEM analysis results *
******************************

General project information
---------------------------

Version of WarpPLS used: 6.0
License holder: Trial license (3 months)
Type of license: Trial license (3 months)
License start date: 28-Oct-2019
License end date: 26-Jan-2020
Project path (directory): D:\2019-11-22\
Project file: model 01.prj
Last changed: 22-Nov-2019 10:26:09
Last saved: Never (needs to be saved)
Raw data path (directory): D:\2019-11-22\
Raw data file: DATA DISERTASI.xlsx


Model fit and quality indices
-----------------------------

Average path coefficient (APC)=0.228, P=0.010
Average R-squared (ARS)=0.217, P=0.013
Average adjusted R-squared (AARS)=0.184, P=0.025
Average block VIF (AVIF)=1.250, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.807, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.409, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36
Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if >= 0.7, ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if >= 0.9, ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=0.833, acceptable if >= 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.750, acceptable if >=
0.7


General model elements
----------------------

Missing data imputation algorithm: Arithmetic Mean Imputation
Outer model analysis algorithm: PLS Regression
Default inner model analysis algorithm: Warp3
Multiple inner model analysis algorithms used? No
Resampling method used in the analysis: Stable3
Number of data resamples used: 100
Number of cases (rows) in model data: 72
Number of latent variables in model: 6
Number of indicators used in model: 21
Number of iterations to obtain estimates: 9
Range restriction variable type: None
Range restriction variable: None
```

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 1

Range restriction variable min value: 0.000
Range restriction variable max value: 0.000
Only ranked data used in analysis? No

****
* Path coefficients and P values *
****

Path coefficients

	DPS	MCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	-0.246	0.127				
Kinerja	0.225	0.237	-0.234	0.075	-0.492	

P values

	DPS	MCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.013	0.133				
Kinerja	0.410	0.017	0.018	0.257	<0.001	

****
* Standard errors for path coefficients *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.109	0.113				
Kinerja		0.110	0.111	0.115	0.101	

****
* Effect sizes for path coefficients *
****

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 1

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.057	0.012				
Kinerja		0.047	0.055	0.013	0.250	

****
* Combined loadings and cross-loadings *
****

	DPS	MCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja	Type (a	SE	P value
DPS02	0.670	0.936	-0.360	-0.749	-0.091	-0.195	Reflect	0.095	<0.001
DPS03	0.873	0.175	-0.028	-0.242	-0.457	-0.435	Reflect	0.093	<0.001
DPS04	0.733	-0.175	0.028	0.242	0.457	0.435	Reflect	0.093	<0.001
DPS05	0.762	-0.039	-0.300	0.095	0.435	0.360	Reflect	0.102	<0.001
DPS11	0.788	-0.315	-0.458	-0.454	0.580	0.296	Reflect	0.100	<0.001
DPS13	0.722	-0.684	0.488	0.838	-0.617	-0.316	Reflect	0.096	<0.001
DPS15	0.684	-0.220	0.410	0.127	-0.531	-0.377	Reflect	0.100	<0.001
DPS16	0.740	0.794	-0.427	-0.724	0.095	-0.104	Reflect	0.093	<0.001
DPS18	0.766	-0.734	0.270	1.040	-0.329	-0.064	Reflect	0.105	<0.001
KomAud	-0.154	0.847	-0.279	-0.104	-0.124	-0.173	Reflect	0.090	<0.001
DDir	0.154	0.847	0.279	0.104	0.124	0.173	Reflect	0.090	<0.001
InstOwn	-0.145	-0.261	0.861	0.565	0.045	0.026	Reflect	0.089	<0.001
PubOwn	0.039	0.434	0.773	-0.119	-0.130	-0.204	Reflect	0.092	<0.001
IndivOw	-0.034	0.046	0.852	-0.235	0.064	0.282	Reflect	0.096	<0.001
>80%Pri	0.046	0.306	0.952	-0.342	-0.046	-0.053	Reflect	0.087	<0.001
50-80%M	-0.131	-0.854	0.769	0.802	-0.157	-0.292	Reflect	0.106	0.002
20-50%M	-0.050	-0.029	0.935	0.159	0.112	0.043	Reflect	0.087	<0.001
Size	-0.000	-0.000	-0.000	1.000	0.000	0.000	Reflect	0.086	<0.001
QCG	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1.000	-0.000	Reflect	0.086	<0.001
ROA	-0.049	-0.014	0.006	-0.059	-0.044	0.965	Reflect	0.086	<0.001
ROE	0.049	0.014	-0.006	0.059	0.044	0.965	Reflect	0.086	<0.001

Notes: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated. SEs and P values are for loadings. P values < 0.05 are desirable for reflective indicators.

****
* Normalized combined loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
DPS02	0.619	0.640	-0.246	-0.512	-0.062	-0.133
DPS03	-0.760	0.193	-0.031	-0.266	-0.502	-0.478
DPS04	0.760	-0.193	0.031	0.266	0.502	0.478

DPS05	-0.852	-0.043	-0.331	0.104	0.479	0.397
DPS11	0.766	-0.249	-0.362	-0.359	0.459	0.234
DPS13	0.803	-0.466	0.332	0.570	-0.420	-0.216
DPS15	0.862	-0.208	0.387	0.120	-0.502	-0.356
DPS16	0.667	0.558	-0.300	-0.509	0.067	-0.073
DPS18	0.711	-0.546	0.201	0.774	-0.244	-0.048
KomAud	-0.148	0.774	-0.269	-0.101	-0.120	-0.167
DDir	0.185	0.695	0.334	0.125	0.149	0.208
InstOwn	-0.138	-0.250	-0.804	0.540	0.043	0.025
PubOwn	0.042	0.462	0.894	-0.126	-0.139	-0.217
IndivOw	-0.042	0.058	0.838	-0.295	0.080	0.354
>80%Pri	0.043	0.286	-0.905	-0.320	-0.043	-0.049
50-80%M	-0.104	-0.677	0.617	0.637	-0.125	-0.232
20-50%M	-0.053	-0.031	0.893	0.169	0.119	0.045
Size	-0.000	-0.000	-0.000	1.000	0.000	0.000
QCG	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1.000	-0.000
ROA	-0.051	-0.014	0.006	-0.062	-0.046	0.890
ROE	0.050	0.014	-0.006	0.061	0.045	0.828

Note: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated, both after separate Kaiser normalizations.

****
* Pattern loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
DPS02	0.725	0.936	-0.360	-0.749	-0.091	-0.195
DPS03	-0.583	0.175	-0.028	-0.242	-0.457	-0.435
DPS04	0.583	-0.175	0.028	0.242	0.457	0.435
DPS05	-0.635	-0.039	-0.300	0.095	0.435	0.360
DPS11	0.812	-0.315	-0.458	-0.454	0.580	0.296
DPS13	0.518	-0.684	0.488	0.838	-0.617	-0.316
DPS15	0.680	-0.220	0.410	0.127	-0.531	-0.377
DPS16	0.816	0.794	-0.427	-0.724	0.095	-0.104
DPS18	0.041	-0.734	0.270	1.040	-0.329	-0.064
KomAud	-0.154	0.959	-0.279	-0.104	-0.124	-0.173
DDir	0.154	0.734	0.279	0.104	0.124	0.173
InstOwn	-0.145	-0.261	-0.826	0.565	0.045	0.026
PubOwn	0.039	0.434	0.787	-0.119	-0.130	-0.204
IndivOw	-0.034	0.046	0.702	-0.235	0.064	0.282
>80%Pri	0.046	0.306	-0.961	-0.342	-0.046	-0.053
50-80%M	-0.131	-0.854	0.298	0.802	-0.157	-0.292
20-50%M	-0.050	-0.029	0.919	0.159	0.112	0.043
Size	-0.000	-0.000	-0.000	1.000	0.000	0.000
QCG	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1.000	-0.000
ROA	-0.049	-0.014	0.006	-0.059	-0.044	0.957
ROE	0.049	0.014	-0.006	0.059	0.044	0.974

Note: Loadings and cross-loadings are oblique-rotated.

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 1

****
* Normalized pattern loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
DPS02	0.496	0.640	-0.246	-0.512	-0.062	-0.133
DPS03	-0.641	0.193	-0.031	-0.266	-0.502	-0.478
DPS04	0.641	-0.193	0.031	0.266	0.502	0.478
DPS05	-0.700	-0.043	-0.331	0.104	0.479	0.397
DPS11	0.642	-0.249	-0.362	-0.359	0.459	0.234
DPS13	0.353	-0.466	0.332	0.570	-0.420	-0.216
DPS15	0.643	-0.208	0.387	0.120	-0.502	-0.356
DPS16	0.574	0.558	-0.300	-0.509	0.067	-0.073
DPS18	0.031	-0.546	0.201	0.774	-0.244	-0.048
KomAud	-0.148	0.924	-0.269	-0.101	-0.120	-0.167
DDir	0.185	0.879	0.334	0.125	0.149	0.208
InstOwn	-0.138	-0.250	-0.790	0.540	0.043	0.025
PubOwn	0.042	0.462	0.838	-0.126	-0.139	-0.217
IndivOw	-0.042	0.058	0.881	-0.295	0.080	0.354
>80%Pri	0.043	0.286	-0.900	-0.320	-0.043	-0.049
50-80%M	-0.104	-0.677	0.237	0.637	-0.125	-0.232
20-50%M	-0.053	-0.031	0.975	0.169	0.119	0.045
Size	-0.000	-0.000	-0.000	1.000	0.000	0.000
QCG	0.000	0.000	-0.000	-0.000	1.000	-0.000
ROA	-0.051	-0.014	0.006	-0.062	-0.046	0.996
ROE	0.050	0.014	-0.006	0.061	0.045	0.996

Note: Loadings and cross-loadings shown are after oblique rotation and Kaiser normalization.

****
* Structure loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
DPS02	0.670	0.526	-0.407	0.472	-0.174	0.170
DPS03	-0.733	-0.316	0.039	-0.463	-0.031	-0.277
DPS04	0.733	0.316	-0.039	0.463	0.031	0.277
DPS05	-0.462	-0.133	-0.076	-0.234	0.045	-0.015
DPS11	0.528	-0.218	-0.287	-0.053	0.076	0.239
DPS13	0.632	0.114	0.152	0.389	-0.159	0.081
DPS15	0.524	0.075	0.137	0.247	-0.097	0.020
DPS16	0.740	0.479	-0.428	0.472	-0.096	0.196
DPS18	0.357	0.084	0.075	0.296	-0.124	0.093
KomAud	0.168	0.847	-0.351	0.569	-0.057	0.048
DDir	0.465	0.847	0.114	0.713	0.083	0.151
InstOwn	0.219	0.240	-0.861	0.421	-0.293	0.192
PubOwn	-0.044	0.125	0.773	0.068	0.277	-0.227

IndivOw	-0.201	-0.189	0.652	-0.285	0.147	-0.036
>80%Pri	0.115	0.149	-0.952	0.136	-0.324	0.203
50-80%M	-0.103	-0.243	0.319	-0.129	0.071	-0.272
20-50%M	-0.129	-0.062	0.935	-0.058	0.389	-0.214
Size	0.566	0.757	-0.198	1.000	-0.003	0.133
QCG	-0.095	0.015	0.345	-0.003	1.000	-0.423
ROA	0.174	0.038	-0.210	0.024	-0.411	0.965
ROE	0.339	0.190	-0.237	0.234	-0.407	0.965

Note: Loadings and cross-loadings are unrotated.

****
* Normalized structure loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
DPS02	0.619	0.485	-0.376	0.435	-0.161	0.157
DPS03	-0.760	-0.327	0.040	-0.480	-0.032	-0.288
DPS04	0.760	0.327	-0.040	0.480	0.032	0.288
DPS05	-0.852	-0.246	-0.140	-0.431	0.084	-0.028
DPS11	0.766	-0.316	-0.417	-0.077	0.111	0.347
DPS13	0.803	0.145	0.194	0.495	-0.202	0.103
DPS15	0.862	0.124	0.226	0.406	-0.160	0.033
DPS16	0.667	0.432	-0.386	0.426	-0.086	0.177
DPS18	0.711	0.167	0.150	0.590	-0.247	0.185
KomAud	0.154	0.774	-0.321	0.520	-0.052	0.044
DDir	0.382	0.695	0.094	0.585	0.068	0.124
InstOwn	0.204	0.224	-0.804	0.393	-0.274	0.180
PubOwn	-0.051	0.144	0.894	0.078	0.320	-0.262
IndivOw	-0.258	-0.243	0.838	-0.367	0.189	-0.047
>80%Pri	0.109	0.142	-0.905	0.129	-0.308	0.193
50-80%M	-0.199	-0.471	0.617	-0.250	0.137	-0.526
20-50%M	-0.123	-0.060	0.893	-0.056	0.372	-0.204
Size	0.405	0.542	-0.142	0.716	-0.002	0.096
QCG	-0.083	0.013	0.302	-0.002	0.875	-0.370
ROA	0.161	0.035	-0.193	0.022	-0.378	0.890
ROE	0.290	0.163	-0.204	0.201	-0.349	0.828

Note: Loadings and cross-loadings shown are unrotated and after Kaiser normalization.

****
* Indicator weights *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja	Type (a	SE	P value
VIF	WLS	ES							
DPS02	0.199	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.111	0.038
6.837	1	0.134							

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 1

DPS03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.000	1.000	Inf
0	0.000									
DPS04	0.436	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.102	<0.001	Inf
1	0.320									
DPS05	-0.137	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.113	0.114	3.064
1	0.063									
DPS11	0.157	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.112	0.083	1.523
1	0.083									
DPS13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.000	1.000	Inf
0	0.000									
DPS15	0.290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.107	0.004	Inf
1	0.152									
DPS16	0.220	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.110	0.024	8.051
1	0.163									
DPS18	0.241	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.109	0.015	Inf
1	0.086									
KomAud	0.000	0.591	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.098	<0.001	1.231
1	0.500									
DDir	0.000	0.591	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.098	<0.001	1.231
1	0.500									
InstOwn	0.000	0.000	-0.236	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.109	0.017	3.068
1	0.203									
PubOwn	0.000	0.000	0.212	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.110	0.029	2.660
1	0.164									
IndivOw	0.000	0.000	0.179	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.111	0.056	2.306
1	0.117									
>80%Pri	0.000	0.000	-0.261	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.108	0.009	17.485
1	0.249									
50-80%M	0.000	0.000	0.087	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.115	0.224	3.338
1	0.028									
20-50%M	0.000	0.000	0.256	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.109	0.010	10.769
1	0.240									
Size	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	Reflect	0.086	<0.001	0.000
1	1.000									
QCG	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	Reflect	0.086	<0.001	0.000
1	1.000									
ROA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.518	Reflect	0.100	<0.001	3.952
1	0.500									
ROE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.518	Reflect	0.100	<0.001	3.952
1	0.500									

Notes: P values < 0.05 and VIFs < 2.5 are desirable for formative indicators;
VIF = indicator variance inflation factor;
  WLS = indicator weight-loading sign (-1 = Simpson's paradox in l.v.); ES = indicator effect size.

****
* Latent variable coefficients *
****

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 1

R-squared coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
				0.069	0.365

Adjusted R-squared coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
				0.042	0.327

Composite reliability coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
0.613	0.835	0.241	1.000	1.000	0.965

Cronbach's alpha coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
0.264	0.604	-2.437	1.000	1.000	0.927

Average variances extracted

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
0.374	0.717	0.608	1.000	1.000	0.932

Full collinearity VIFs

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
1.576	2.377	1.194	3.046	1.341	1.311

Q-squared coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
				0.086	0.380

Minimum and maximum values

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
-3.077	-1.020	-0.807	-2.237	-1.551	-6.286
1.585	3.014	1.940	1.666	2.691	2.444

Medians (top) and modes (bottom)

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
0.215	-0.491	-0.418	-0.099	-0.135	-0.016
-0.641	-0.491	-0.807	0.078	0.570	-6.286

Skewness (top) and exc. kurtosis (bottom) coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
-0.600	1.081	0.819	-0.146	0.986	-3.272
0.996	0.455	-1.013	-0.855	1.436	20.458

Tests of unimodality: Rohatgi-Sz□kely (top) and Klaassen-Mokveld-van Es (bottom)

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes

Tests of normality: Jarque□Bera (top) and robust Jarque□Bera (bottom)

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
No	No	No	Yes	No	No
No	No	No	Yes	No	No

****
* Correlations among latent variables and errors *
****

Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
DPS	0.611	0.374	-0.169	0.566	-0.095	0.266
GCG	0.374	0.847	-0.140	0.757	0.015	0.118
OwnStru	-0.169	-0.140	0.780	-0.198	0.345	-0.232
Size	0.566	0.757	-0.198	1.000	-0.003	0.133
QCG	-0.095	0.015	0.345	-0.003	1.000	-0.423
Kinerja	0.266	0.118	-0.232	0.133	-0.423	0.965

Note: Square roots of average variances extracted (AVEs) shown on diagonal.

P values for correlations

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
DPS	1.000	0.001	0.156	<0.001	0.429	0.024
GCG	0.001	1.000	0.241	<0.001	0.898	0.325

OwnStru	0.156	0.241	1.000	0.096	0.003	0.050
Size	<0.001	<0.001	0.096	1.000	0.981	0.264
QCG	0.429	0.898	0.003	0.981	1.000	<0.001
Kinerja	0.024	0.325	0.050	0.264	<0.001	1.000

Correlations among l.v. error terms with VIFs

	(e)QCG	(e)Kine
(e)QCG	1.000	0.003
(e)Kine	0.003	1.000

Notes: Variance inflation factors (VIFs) shown on diagonal. Error terms included (a.k.a. residuals) are for endogenous l.vs.

P values for correlations

	(e)QCG	(e)Kine
(e)QCG	1.000	0.982
(e)Kine	0.982	1.000

****
* Block variance inflation factors *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	1.016	1.016				
Kinerja		1.634	1.114	1.651	1.070	

Note: These VIFs are for the latent variables on each column (predictors), with reference to the latent variables on each row (criteria).

****
* Indirect and total effects *
****

Indirect effects for paths with 2 segments

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 1

Kinerja 0.122   -0.063

Number of paths with 2 segments

	DPS	GCG	OwnStru Size	QCG	Kinerja

Kinerja 1 1

P values of indirect effects for paths with 2 segments

	DPS	GCG	OwnStru Size	QCG	Kinerja

Kinerja 0.067   0.223

Standard errors of indirect effects for paths with 2 segments
---
	DPS	GCG	OwnStru Size	QCG	Kinerja

Kinerja 0.080   0.082

Effect sizes of indirect effects for paths with 2 segments

	DPS	GCG	OwnStru Size	QCG	Kinerja

Kinerja 0.032   0.013

Sums of indirect effects

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 1

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.122	-0.063				

Number of paths for indirect effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	1	1				

P values for sums of indirect effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.067	0.223				

Standard errors for sums of indirect effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.080	0.082				

Effect sizes for sums of indirect effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja

Kinerja 0.032 0.013

Total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	-0.246	0.127				
Kinerja	0.122	0.162	-0.198	0.080	-0.494	

Number of paths for total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	1	1				
Kinerja	1	2	1	1	1	

P values for total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.013	0.133				
Kinerja	0.067	0.076	0.039	0.245	<0.001	

Standard errors for total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.109	0.113				
Kinerja	0.080	0.112	0.111	0.115	0.101	

Effect sizes for total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja

QCG	0.057	0.012			
Kinerja	0.032	0.034	0.055	0.013	0.250

****
* Causality assessment coefficients *
****

Path-correlation signs

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	1	1				
Kinerja		1	1	1	1	

Notes: path-correlation signs; negative sign (i.e., -1) = Simpson's paradox.

R-squared contributions

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.057	0.012				
Kinerja		0.047	0.055	0.013	0.250	

Notes: R-squared contributions of predictor lat. vars.; columns = predictor lat. vars.; rows = criteria lat. vars.; negative sign = reduction in R-squared.

Path-correlation ratios

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	1.069	1.320				

Kinerja	1.083	0.712	0.476	0.976

Notes: absolute path-correlation ratios; ratio > 1 indicates statistical suppression; 1 < ratio <= 1.3: weak suppression; 1.3 < ratio <= 1.7: medium; 1.7 < ratio: strong.

Path-correlation differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.016	0.031				
Kinerja	0.017	0.080	0.088	0.012		

Note: absolute path-correlation differences.

P values for path-correlation differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.446	0.396				
Kinerja	0.442	0.244	0.223	0.458		

Note: P values for absolute path-correlation differences.

Warp2 bivariate causal direction ratios

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.673	1.518				
Kinerja	0.665	0.876	1.071	0.845		

Notes: Warp2 bivariate causal direction ratios; ratio > 1 supports reversed link; 1 < ratio <= 1.3: weak support; 1.3 < ratio <= 1.7: medium; 1.7 < ratio: strong.

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 1

Warp2 bivariate causal direction differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.060	0.050				
Kinerja		0.069	0.033	0.010	0.078	

Note: absolute Warp2 bivariate causal direction differences.

P values for Warp2 bivariate causal direction differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.304	0.335				
Kinerja		0.275	0.388	0.465	0.249	

Note: P values for absolute Warp2 bivariate causal direction differences.

Warp3 bivariate causal direction ratios

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.725	1.765				
Kinerja		0.802	1.171	1.985	0.913	

Notes: Warp3 bivariate causal direction ratios; ratio > 1 supports reversed link; 1 < ratio <= 1.3: weak support; 1.3 < ratio <= 1.7: medium; 1.7 < ratio: strong.

Warp3 bivariate causal direction differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 1

QCG	0.064	0.074			
Kinerja		0.041	0.047	0.165	0.044

Note: absolute Warp3 bivariate causal direction differences.

P values for Warp3 bivariate causal direction differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.292	0.262				
Kinerja		0.362	0.342	0.072	0.353	

Note: P values for absolute Warp3 bivariate causal direction differences.

LAMPIRAN 3

OUPUT PERSAMAAN 2

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 2

```
******************************
* General SEM analysis results *
******************************

General project information
---------------------------

Version of WarpPLS used: 6.0
License holder: Trial license (3 months)
Type of license: Trial license (3 months)
License start date: 28-Oct-2019
License end date: 26-Jan-2020
Project path (directory): D:\2019-11-22\
Project file: model 01.prj
Last changed: 22-Nov-2019 10:28:31
Last saved: 22-Nov-2019 10:27:34
Raw data path (directory): D:\2019-11-22\
Raw data file: DATA DISERTASI.xlsx


Model fit and quality indices
-----------------------------

Average path coefficient (APC)=0.231, P=0.010
Average R-squared (ARS)=0.230, P=0.010
Average adjusted R-squared (AARS)=0.198, P=0.019
Average block VIF (AVIF)=1.245, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.736, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.449, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36
Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if >= 0.7, ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if >= 0.9, ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.750, acceptable if >= 0.7


General model elements
----------------------

Missing data imputation algorithm: Arithmetic Mean Imputation
Outer model analysis algorithm: PLS Regression
Default inner model analysis algorithm: Warp3
Multiple inner model analysis algorithms used? No
Resampling method used in the analysis: Stable3
Number of data resamples used: 100
Number of cases (rows) in model data: 72
Number of latent variables in model: 6
Number of indicators used in model: 13
Number of iterations to obtain estimates: 8
```

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 2

Range restriction variable type: None
Range restriction variable: None
Range restriction variable min value: 0.000
Range restriction variable max value: 0.000
Only ranked data used in analysis? No

****
* Path coefficients and P values *
****

Path coefficients

	DPS	MCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	-0.295	0.097				
Kinerja	0.289	0.237	-0.234	0.075	-0.492	

P values

	DPS	MCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.004	0.200				
Kinerja	0.350	0.017	0.018	0.257	<0.001	

****
* Standard errors for path coefficients *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.107	0.114				
Kinerja		0.110	0.111	0.115	0.101	

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 2

****
* Effect sizes for path coefficients *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.087	0.009				
Kinerja		0.047	0.055	0.013	0.250	

****
* Combined loadings and cross-loadings *
****

	DPS	MCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja	Type (a	SE	P value
TDPS	1.000	0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.000	Reflect	0.086	<0.001
KomAud	0.121	0.847	-0.306	-0.482	-0.051	-0.171	Reflect	0.090	<0.001
DDir	-0.121	0.847	0.306	0.482	0.051	0.171	Reflect	0.090	<0.001
InstOwn	-0.294	-0.362	0.861	0.793	-0.045	-0.038	Reflect	0.089	<0.001
PubOwn	0.435	0.233	0.773	-0.168	-0.095	-0.168	Reflect	0.092	<0.001
IndivOw	-0.491	0.150	0.752	-0.056	0.060	0.275	Reflect	0.096	<0.001
>80%Pri	0.181	0.295	0.952	-0.428	0.015	-0.008	Reflect	0.087	<0.001
50-80%M	-0.457	-0.942	0.719	1.127	-0.255	-0.359	Reflect	0.106	0.002
20-50%M	0.053	-0.009	0.935	0.088	0.097	0.027	Reflect	0.087	<0.001
Size	-0.000	0.000	-0.000	1.000	0.000	-0.000	Reflect	0.086	<0.001
QCG	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1.000	-0.000	Reflect	0.086	<0.001
ROA	0.012	0.053	-0.015	-0.176	0.004	0.965	Reflect	0.086	<0.001
ROE	-0.012	-0.053	0.015	0.176	-0.004	0.965	Reflect	0.086	<0.001

Notes: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated. SEs and P values are for loadings. P values < 0.05 are desirable for reflective indicators.

****
* Normalized combined loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
TDPS	1.000	0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.000
KomAud	0.092	0.742	-0.233	-0.367	-0.039	-0.130
DDir	-0.149	0.707	0.378	0.595	0.063	0.211
InstOwn	-0.241	-0.297	-0.812	0.650	-0.037	-0.031

PubOwn	0.429	0.230	0.881	-0.165	-0.094	-0.165
IndivOw	-0.571	0.175	0.763	-0.065	0.070	0.320
>80%Pri	0.163	0.265	-0.891	-0.385	0.013	-0.007
50-80%M	-0.280	-0.578	0.558	0.691	-0.157	-0.220
20-50%M	0.056	-0.010	0.893	0.093	0.103	0.028
Size	-0.000	0.000	-0.000	1.000	0.000	-0.000
QCG	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1.000	-0.000
ROA	0.013	0.053	-0.016	-0.177	0.004	0.898
ROE	-0.013	-0.054	0.016	0.180	-0.004	0.849

Note: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated, both after separate Kaiser normalizations.

****
* Pattern loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
TDPS	1.000	0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.000
KomAud	0.121	1.161	-0.306	-0.482	-0.051	-0.171
DDir	-0.121	0.532	0.306	0.482	0.051	0.171
InstOwn	-0.294	-0.362	-0.799	0.793	-0.045	-0.038
PubOwn	0.435	0.233	0.850	-0.168	-0.095	-0.168
IndivOw	-0.491	0.150	0.627	-0.056	0.060	0.275
>80%Pri	0.181	0.295	-0.966	-0.428	0.015	-0.008
50-80%M	-0.457	-0.942	0.315	1.127	-0.255	-0.359
20-50%M	0.053	-0.009	0.934	0.088	0.097	0.027
Size	-0.000	0.000	-0.000	1.000	0.000	-0.000
QCG	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1.000	-0.000
ROA	0.012	0.053	-0.015	-0.176	0.004	0.973
ROE	-0.012	-0.053	0.015	0.176	-0.004	0.958

Note: Loadings and cross-loadings are oblique-rotated.

****
* Normalized pattern loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
TDPS	1.000	0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.000
KomAud	0.092	0.885	-0.233	-0.367	-0.039	-0.130
DDir	-0.149	0.657	0.378	0.595	0.063	0.211
InstOwn	-0.241	-0.297	-0.655	0.650	-0.037	-0.031
PubOwn	0.429	0.230	0.837	-0.165	-0.094	-0.165
IndivOw	-0.571	0.175	0.729	-0.065	0.070	0.320
>80%Pri	0.163	0.265	-0.869	-0.385	0.013	-0.007

50-80%M	-0.280	-0.578	0.193	0.691	-0.157	-0.220
20-50%M	0.056	-0.010	0.988	0.093	0.103	0.028
Size	-0.000	0.000	-0.000	1.000	0.000	-0.000
QCG	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	1.000	-0.000
ROA	0.013	0.053	-0.016	-0.177	0.004	0.982
ROE	-0.013	-0.054	0.016	0.180	-0.004	0.982

Note: Loadings and cross-loadings shown are after oblique rotation and Kaiser normalization.

****
* Structure loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
TDPS	1.000	0.457	-0.194	0.561	-0.005	0.162
KomAud	0.364	0.847	-0.351	0.569	-0.057	0.048
DDir	0.409	0.847	0.114	0.713	0.083	0.151
InstOwn	0.163	0.240	-0.861	0.421	-0.293	0.192
PubOwn	0.152	0.125	0.773	0.068	0.277	-0.227
IndivOw	-0.406	-0.189	0.652	-0.285	0.147	-0.036
>80%Pri	0.224	0.149	-0.952	0.136	-0.324	0.203
50-80%M	-0.265	-0.243	0.319	-0.129	0.071	-0.272
20-50%M	-0.132	-0.062	0.935	-0.058	0.389	-0.214
Size	0.561	0.757	-0.198	1.000	-0.003	0.133
QCG	-0.005	0.015	0.345	-0.003	1.000	-0.423
ROA	0.093	0.038	-0.210	0.024	-0.411	0.965
ROE	0.219	0.190	-0.237	0.234	-0.407	0.965

Note: Loadings and cross-loadings are unrotated.

****
* Normalized structure loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
TDPS	0.794	0.363	-0.154	0.445	-0.004	0.128
KomAud	0.319	0.742	-0.308	0.499	-0.050	0.042
DDir	0.342	0.707	0.095	0.595	0.069	0.126
InstOwn	0.153	0.226	-0.812	0.396	-0.276	0.181
PubOwn	0.174	0.142	0.881	0.077	0.316	-0.258
IndivOw	-0.475	-0.221	0.763	-0.334	0.172	-0.043
>80%Pri	0.209	0.139	-0.891	0.127	-0.303	0.190
50-80%M	-0.464	-0.425	0.558	-0.226	0.124	-0.476
20-50%M	-0.126	-0.060	0.893	-0.056	0.372	-0.204
Size	0.402	0.543	-0.142	0.717	-0.002	0.096

QCG	-0.005	0.013	0.303	-0.002	0.878	-0.371
ROA	0.086	0.035	-0.195	0.022	-0.382	0.898
ROE	0.193	0.167	-0.209	0.206	-0.358	0.849

Note: Loadings and cross-loadings shown are unrotated and after Kaiser normalization.

****
* Indicator weights *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja	Type (a	SE	P value	VIF	WLS	ES
TDPS	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.086	<0.001	0.000	1	1.000
KomAud	0.000	0.591	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.098	<0.001	1.231	1	0.500
DDir	0.000	0.591	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.098	<0.001	1.231	1	0.500
InstOwn	0.000	0.000	-0.236	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.109	0.017	3.068	1	0.203
PubOwn	0.000	0.000	0.212	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.110	0.029	2.660	1	0.164
IndivOw	0.000	0.000	0.179	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.111	0.056	2.306	1	0.117
>80%Pri	0.000	0.000	-0.261	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.108	0.009	17.485	1	0.249
50-80%M	0.000	0.000	0.088	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.115	0.223	3.338	1	0.028
20-50%M	0.000	0.000	0.256	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.109	0.010	10.769	1	0.240
Size	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	Reflect	0.086	<0.001	0.000	1	1.000
QCG	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	Reflect	0.086	<0.001	0.000	1	1.000
ROA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.518	Reflect	0.100	<0.001	3.952	1	0.500
ROE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.518	Reflect	0.100	<0.001	3.952	1	0.500

Notes: P values < 0.05 and VIFs < 2.5 are desirable for formative indicators; VIF = indicator variance inflation factor;
  WLS = indicator weight-loading sign (-1 = Simpson's paradox in l.v.); ES = indicator effect size.

****

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 2

* Latent variable coefficients *
****

R-squared coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
				0.096	0.365

Adjusted R-squared coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
				0.070	0.327

Composite reliability coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
1.000	0.835	0.241	1.000	1.000	0.965

Cronbach's alpha coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
1.000	0.604	-2.437	1.000	1.000	0.927

Average variances extracted

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
1.000	0.717	0.608	1.000	1.000	0.932

Full collinearity VIFs

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
1.499	2.356	1.206	2.740	1.348	1.268

Q-squared coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
				0.106	0.380

Minimum and maximum values

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 2

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
-2.603	-1.020	-0.807	-2.237	-1.551	-6.286
1.275	3.014	1.940	1.666	2.691	2.444

Medians (top) and modes (bottom)

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
-0.018	-0.491	-0.418	-0.099	-0.135	-0.016
-0.664	-0.491	-0.807	0.078	0.570	-6.286

Skewness (top) and exc. kurtosis (bottom) coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
-0.368	1.081	0.819	-0.146	0.986	-3.272
-0.338	0.455	-1.013	-0.855	1.436	20.458

Tests of unimodality: Rohatgi-Sz□kely (top) and Klaassen-Mokveld-van Es (bottom)

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes

Tests of normality: Jarque□Bera (top) and robust Jarque□Bera (bottom)

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Yes	No	No	Yes	No	No
Yes	No	No	Yes	No	No

****
* Correlations among latent variables and errors *
****

Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
DPS	1.000	0.457	-0.194	0.561	-0.005	0.162
GCG	0.457	0.847	-0.140	0.757	0.015	0.118
OwnStru	-0.194	-0.140	0.780	-0.198	0.345	-0.232
Size	0.561	0.757	-0.198	1.000	-0.003	0.133
QCG	-0.005	0.015	0.345	-0.003	1.000	-0.423
Kinerja	0.162	0.118	-0.232	0.133	-0.423	0.965

Note: Square roots of average variances extracted (AVEs) shown on diagonal.

P values for correlations

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
DPS	1.000	<0.001	0.102	<0.001	0.965	0.175
GCG	<0.001	1.000	0.241	<0.001	0.898	0.325
OwnStru	0.102	0.241	1.000	0.096	0.003	0.050
Size	<0.001	<0.001	0.096	1.000	0.981	0.264
QCG	0.965	0.898	0.003	0.981	1.000	<0.001
Kinerja	0.175	0.325	0.050	0.264	<0.001	1.000

Correlations among l.v. error terms with VIFs

	(e)QCG	(e)Kine
(e)QCG	1.000	-0.011
(e)Kine	-0.011	1.000

Notes: Variance inflation factors (VIFs) shown on diagonal. Error terms included (a.k.a. residuals) are for endogenous l.vs.

P values for correlations

	(e)QCG	(e)Kine
(e)QCG	1.000	0.928
(e)Kine	0.928	1.000

****
* Block variance inflation factors *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	1.000	1.000				
Kinerja		1.634	1.115	1.651	1.070	

Note: These VIFs are for the latent variables on each column (predictors), with reference to the latent variables on each row (criteria).

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 2

```
*****************************
* Indirect and total effects *
*****************************

Indirect effects for paths with 2 segments
------------------------------
        DPS     GCG     OwnStru Size    QCG     Kinerja




Kinerja 0.146   -0.048


Number of paths with 2 segments
------------------------------
        DPS     GCG     OwnStru Size    QCG     Kinerja




Kinerja 1       1


P values of indirect effects for paths with 2 segments
------------------------------
        DPS     GCG     OwnStru Size    QCG     Kinerja




Kinerja 0.036   0.280


Standard errors of indirect effects for paths with 2 segments
------------------------------
        DPS     GCG     OwnStru Size    QCG     Kinerja




Kinerja 0.080   0.082
```

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 2

Effect sizes of indirect effects for paths with 2 segments

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.024	0.010				

Sums of indirect effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.146	-0.048				

Number of paths for indirect effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	1	1				

P values for sums of indirect effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.036	0.280				

Standard errors for sums of indirect effects

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 2

Effect sizes for sums of indirect effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.080	0.082				

Effect sizes for sums of indirect effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.024	0.010				

Total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	-0.295	0.097				
Kinerja	0.146	0.177	-0.198	0.080	-0.494	

Number of paths for total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	1	1				
Kinerja	1	2	1	1	1	

P values for total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja

QCG	0.004	0.198			
Kinerja	0.036	0.059	0.039	0.245	<0.001

Standard errors for total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.107	0.114				
Kinerja	0.080	0.111	0.111	0.115	0.101	

Effect sizes for total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.087	0.009				
Kinerja	0.024	0.037	0.055	0.013	0.250	

****
* Causality assessment coefficients *
****

Path-correlation signs

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	1	1				
Kinerja		1	1	1	1	

Notes: path-correlation signs; negative sign (i.e., -1) = Simpson's paradox.

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 2

R-squared contributions

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.087	0.009				
Kinerja		0.047	0.055	0.013	0.250	

Notes: R-squared contributions of predictor lat. vars.; columns = predictor lat. vars.; rows = criteria lat. vars.; negative sign = reduction in R-squared.

Path-correlation ratios

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	1.001	1.013				
Kinerja		1.083	0.712	0.476	0.976	

Notes: absolute path-correlation ratios; ratio > 1 indicates statistical suppression; 1 < ratio <= 1.3: weak suppression; 1.3 < ratio <= 1.7: medium; 1.7 < ratio: strong.

Path-correlation differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.000	0.001				
Kinerja		0.017	0.080	0.088	0.012	

Note: absolute path-correlation differences.

P values for path-correlation differences

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 2

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.499	0.496				
Kinerja		0.442	0.244	0.223	0.458	

Note: P values for absolute path-correlation differences.

Warp2 bivariate causal direction ratios

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.824	1.518				
Kinerja		0.665	0.876	1.071	0.845	

Notes: Warp2 bivariate causal direction ratios; ratio > 1 supports reversed link; 1 < ratio <= 1.3: weak support; 1.3 < ratio <= 1.7: medium; 1.7 < ratio: strong.

Warp2 bivariate causal direction differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.005	0.050				
Kinerja		0.069	0.033	0.010	0.078	

Note: absolute Warp2 bivariate causal direction differences.

P values for Warp2 bivariate causal direction differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja

QCG	0.483	0.335			
Kinerja		0.275	0.388	0.465	0.249

Note: P values for absolute Warp2 bivariate causal direction differences.

Warp3 bivariate causal direction ratios

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.110	1.765				
Kinerja		0.802	1.171	1.985	0.913	

Notes: Warp3 bivariate causal direction ratios; ratio > 1 supports reversed link; 1 < ratio <= 1.3: weak support; 1.3 < ratio <= 1.7: medium; 1.7 < ratio: strong.

Warp3 bivariate causal direction differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.262	0.074				
Kinerja		0.041	0.047	0.165	0.044	

Note: absolute Warp3 bivariate causal direction differences.

P values for Warp3 bivariate causal direction differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.009	0.262				
Kinerja		0.362	0.342	0.072	0.353	

Note: P values for absolute Warp3 bivariate causal direction differences.

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 2

LAMPIRAN 4

OUPUT PERSAMAAN 3

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 3

```
******************************
* General SEM analysis results *
******************************

General project information
---------------------------

Version of WarpPLS used: 6.0
License holder: Trial license (3 months)
Type of license: Trial license (3 months)
License start date: 28-Oct-2019
License end date: 26-Jan-2020
Project path (directory): D:\2019-11-22\
Project file: model 02.prj
Last changed: 22-Nov-2019 10:30:11
Last saved: 22-Nov-2019 10:29:48
Raw data path (directory): D:\2019-11-22\
Raw data file: DATA DISERTASI.xlsx


Model fit and quality indices
-----------------------------

Average path coefficient (APC)=0.231, P=0.010
Average R-squared (ARS)=0.230, P=0.010
Average adjusted R-squared (AARS)=0.198, P=0.019
Average block VIF (AVIF)=1.245, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.736, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.449, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36
Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if >= 0.7, ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if >= 0.9, ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.750, acceptable if >= 0.7


General model elements
----------------------

Missing data imputation algorithm: Arithmetic Mean Imputation
Outer model analysis algorithm: PLS Regression
Default inner model analysis algorithm: Warp3
Multiple inner model analysis algorithms used? No
Resampling method used in the analysis: Stable3
Number of data resamples used: 100
Number of cases (rows) in model data: 72
Number of latent variables in model: 6
Number of indicators used in model: 13
Number of iterations to obtain estimates: 8
```

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 3

Range restriction variable type: None
Range restriction variable: None
Range restriction variable min value: 0.000
Range restriction variable max value: 0.000
Only ranked data used in analysis? No

****
* Path coefficients and P values *
****

Path coefficients

	DPS	MCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	-0.295	0.097				
Kinerja	0.289	0.237	-0.234	0.075	-0.492	

P values

	DPS	MCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.004	0.200				
Kinerja	0.350	0.017	0.018	0.257	<0.001	

****
* Standard errors for path coefficients *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.107	0.114				
Kinerja		0.110	0.111	0.115	0.101	

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 3

****
* Effect sizes for path coefficients *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.087	0.009				
Kinerja		0.047	0.055	0.013	0.250	

****
* Combined loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja	Type (a	SE	P value
PDPS	1.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	-0.000	Reflect	0.086	<0.001
KomAud	0.121	0.847	-0.306	-0.482	-0.051	-0.171	Reflect	0.090	<0.001
DDir	-0.121	0.847	0.306	0.482	0.051	0.171	Reflect	0.090	<0.001
InstOwn	-0.294	-0.362	0.861	0.793	-0.045	-0.038	Reflect	0.089	<0.001
PubOwn	0.435	0.233	0.773	-0.168	-0.095	-0.168	Reflect	0.092	<0.001
IndivOw	-0.491	0.150	0.852	-0.056	0.060	0.275	Reflect	0.096	<0.001
>80%Pri	0.181	0.295	0.952	-0.428	0.015	-0.008	Reflect	0.087	<0.001
50-80%M	-0.457	-0.942	0.719	1.127	-0.255	-0.359	Reflect	0.106	0.002
20-50%M	0.053	-0.009	0.935	0.088	0.097	0.027	Reflect	0.087	<0.001
Size	0.000	0.000	-0.000	1.000	-0.000	-0.000	Reflect	0.086	<0.001
QCG	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	1.000	-0.000	Reflect	0.086	<0.001
ROA	0.012	0.053	-0.015	-0.176	0.004	0.965	Reflect	0.086	<0.001
ROE	-0.012	-0.053	0.015	0.176	-0.004	0.965	Reflect	0.086	<0.001

Notes: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated. SEs and P values are for loadings. P values < 0.05 are desirable for reflective indicators.

****
* Normalized combined loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
PDPS	1.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	-0.000
KomAud	0.092	0.742	-0.233	-0.367	-0.039	-0.130
DDir	-0.149	0.707	0.378	0.595	0.063	0.211
InstOwn	-0.241	-0.297	-0.812	0.650	-0.037	-0.031

PubOwn	0.429	0.230	0.881	-0.165	-0.094	-0.165
IndivOw	-0.571	0.175	0.763	-0.065	0.070	0.320
>80%Pri	0.163	0.265	-0.891	-0.385	0.013	-0.007
50-80%M	-0.280	-0.578	0.558	0.691	-0.157	-0.220
20-50%M	0.056	-0.010	0.893	0.093	0.103	0.028
Size	0.000	0.000	-0.000	1.000	-0.000	-0.000
QCG	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	1.000	-0.000
ROA	0.013	0.053	-0.016	-0.177	0.004	0.898
ROE	-0.013	-0.054	0.016	0.180	-0.004	0.849

Note: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated, both after separate Kaiser normalizations.

****
* Pattern loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
PDPS	1.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	-0.000
KomAud	0.121	1.161	-0.306	-0.482	-0.051	-0.171
DDir	-0.121	0.532	0.306	0.482	0.051	0.171
InstOwn	-0.294	-0.362	-0.799	0.793	-0.045	-0.038
PubOwn	0.435	0.233	0.850	-0.168	-0.095	-0.168
IndivOw	-0.491	0.150	0.627	-0.056	0.060	0.275
>80%Pri	0.181	0.295	-0.966	-0.428	0.015	-0.008
50-80%M	-0.457	-0.942	0.315	1.127	-0.255	-0.359
20-50%M	0.053	-0.009	0.934	0.088	0.097	0.027
Size	0.000	0.000	-0.000	1.000	-0.000	-0.000
QCG	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	1.000	-0.000
ROA	0.012	0.053	-0.015	-0.176	0.004	0.973
ROE	-0.012	-0.053	0.015	0.176	-0.004	0.958

Note: Loadings and cross-loadings are oblique-rotated.

****
* Normalized pattern loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
PDPS	1.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	-0.000
KomAud	0.092	0.885	-0.233	-0.367	-0.039	-0.130
DDir	-0.149	0.657	0.378	0.595	0.063	0.211
InstOwn	-0.241	-0.297	-0.655	0.650	-0.037	-0.031
PubOwn	0.429	0.230	0.837	-0.165	-0.094	-0.165
IndivOw	-0.571	0.175	0.729	-0.065	0.070	0.320
>80%Pri	0.163	0.265	-0.869	-0.385	0.013	-0.007

50-80%M	-0.280	-0.578	0.193	0.691	-0.157	-0.220
20-50%M	0.056	-0.010	0.988	0.093	0.103	0.028
Size	0.000	0.000	-0.000	1.000	-0.000	-0.000
QCG	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	1.000	-0.000
ROA	0.013	0.053	-0.016	-0.177	0.004	0.982
ROE	-0.013	-0.054	0.016	0.180	-0.004	0.982

Note: Loadings and cross-loadings shown are after oblique rotation and Kaiser normalization.

****
* Structure loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
PDPS	1.000	0.457	-0.194	0.561	-0.005	0.162
KomAud	0.364	0.847	-0.351	0.569	-0.057	0.048
DDir	0.409	0.847	0.114	0.713	0.083	0.151
InstOwn	0.163	0.240	-0.861	0.421	-0.293	0.192
PubOwn	0.152	0.125	0.773	0.068	0.277	-0.227
IndivOw	-0.406	-0.189	0.652	-0.285	0.147	-0.036
>80%Pri	0.224	0.149	-0.952	0.136	-0.324	0.203
50-80%M	-0.265	-0.243	0.319	-0.129	0.071	-0.272
20-50%M	-0.132	-0.062	0.935	-0.058	0.389	-0.214
Size	0.561	0.757	-0.198	1.000	-0.003	0.133
QCG	-0.005	0.015	0.345	-0.003	1.000	-0.423
ROA	0.093	0.038	-0.210	0.024	-0.411	0.965
ROE	0.219	0.190	-0.237	0.234	-0.407	0.965

Note: Loadings and cross-loadings are unrotated.

****
* Normalized structure loadings and cross-loadings *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
PDPS	0.794	0.363	-0.154	0.445	-0.004	0.128
KomAud	0.319	0.742	-0.308	0.499	-0.050	0.042
DDir	0.342	0.707	0.095	0.595	0.069	0.126
InstOwn	0.153	0.226	-0.812	0.396	-0.276	0.181
PubOwn	0.174	0.142	0.881	0.077	0.316	-0.258
IndivOw	-0.475	-0.221	0.763	-0.334	0.172	-0.043
>80%Pri	0.209	0.139	-0.891	0.127	-0.303	0.190
50-80%M	-0.464	-0.425	0.558	-0.226	0.124	-0.476
20-50%M	-0.126	-0.060	0.893	-0.056	0.372	-0.204
Size	0.402	0.543	-0.142	0.717	-0.002	0.096

QCG	-0.005	0.013	0.303	-0.002	0.878	-0.371
ROA	0.086	0.035	-0.195	0.022	-0.382	0.898
ROE	0.193	0.167	-0.209	0.206	-0.358	0.849

Note: Loadings and cross-loadings shown are unrotated and after Kaiser normalization.

****
* Indicator weights *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja	Type (a	SE	P value	VIF	WLS	ES
PDPS	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.086	<0.001	0.000	1	1.000
KomAud	0.000	0.591	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.098	<0.001	1.231	1	0.500
DDir	0.000	0.591	0.000	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.098	<0.001	1.231	1	0.500
InstOwn	0.000	0.000	-0.236	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.109	0.017	3.068	1	0.203
PubOwn	0.000	0.000	0.212	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.110	0.029	2.660	1	0.164
IndivOw	0.000	0.000	0.179	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.111	0.056	2.306	1	0.117
>80%Pri	0.000	0.000	-0.261	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.108	0.009	17.485	1	0.249
50-80%M	0.000	0.000	0.088	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.115	0.223	3.338	1	0.028
20-50%M	0.000	0.000	0.256	0.000	0.000	0.000	Reflect	0.109	0.010	10.769	1	0.240
Size	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	Reflect	0.086	<0.001	0.000	1	1.000
QCG	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	Reflect	0.086	<0.001	0.000	1	1.000
ROA	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.518	Reflect	0.100	<0.001	3.952	1	0.500
ROE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.518	Reflect	0.100	<0.001	3.952	1	0.500

Notes: P values < 0.05 and VIFs < 2.5 are desirable for formative indicators; VIF = indicator variance inflation factor;
WLS = indicator weight-loading sign (-1 = Simpson's paradox in l.v.); ES = indicator effect size.

****

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 3

* Latent variable coefficients *
****

R-squared coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
				0.096	0.365

Adjusted R-squared coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
				0.070	0.327

Composite reliability coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
1.000	0.835	0.241	1.000	1.000	0.965

Cronbach's alpha coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
1.000	0.604	-2.437	1.000	1.000	0.927

Average variances extracted

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
1.000	0.717	0.608	1.000	1.000	0.932

Full collinearity VIFs

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
1.499	2.356	1.206	2.740	1.348	1.268

Q-squared coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
				0.106	0.380

Minimum and maximum values

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 3

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
-2.603	-1.020	-0.807	-2.237	-1.551	-6.286
1.275	3.014	1.940	1.666	2.691	2.444

Medians (top) and modes (bottom)

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
-0.018	-0.491	-0.418	-0.099	-0.135	-0.016
-0.664	-0.491	-0.807	0.078	0.570	-6.286

Skewness (top) and exc. kurtosis (bottom) coefficients

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
-0.368	1.081	0.819	-0.146	0.986	-3.272
-0.338	0.455	-1.013	-0.855	1.436	20.458

Tests of unimodality: Rohatgi-Sz□kely (top) and Klaassen-Mokveld-van Es (bottom)

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes

Tests of normality: Jarque□Bera (top) and robust Jarque□Bera (bottom)

DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Yes	No	No	Yes	No	No
Yes	No	No	Yes	No	No

****
* Correlations among latent variables and errors *
****

Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
DPS	1.000	0.457	-0.194	0.561	-0.005	0.162
GCG	0.457	0.847	-0.140	0.757	0.015	0.118
OwnStru	-0.194	-0.140	0.780	-0.198	0.345	-0.232
Size	0.561	0.757	-0.198	1.000	-0.003	0.133
QCG	-0.005	0.015	0.345	-0.003	1.000	-0.423
Kinerja	0.162	0.118	-0.232	0.133	-0.423	0.965

Note: Square roots of average variances extracted (AVEs) shown on diagonal.

P values for correlations

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
DPS	1.000	<0.001	0.102	<0.001	0.965	0.175
GCG	<0.001	1.000	0.241	<0.001	0.898	0.325
OwnStru	0.102	0.241	1.000	0.096	0.003	0.050
Size	<0.001	<0.001	0.096	1.000	0.981	0.264
QCG	0.965	0.898	0.003	0.981	1.000	<0.001
Kinerja	0.175	0.325	0.050	0.264	<0.001	1.000

Correlations among l.v. error terms with VIFs

	(e)QCG	(e)Kine
(e)QCG	1.000	-0.011
(e)Kine	-0.011	1.000

Notes: Variance inflation factors (VIFs) shown on diagonal. Error terms included (a.k.a. residuals) are for endogenous l.vs.

P values for correlations

	(e)QCG	(e)Kine
(e)QCG	1.000	0.928
(e)Kine	0.928	1.000

****
* Block variance inflation factors *
****

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	1.000	1.000				
Kinerja		1.634	1.115	1.651	1.070	

Note: These VIFs are for the latent variables on each column (predictors), with reference to the latent variables on each row (criteria).

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 3

****
* Indirect and total effects *
****

Indirect effects for paths with 2 segments

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.146	-0.048				

Number of paths with 2 segments

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	1	1				

P values of indirect effects for paths with 2 segments

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.036	0.280				

Standard errors of indirect effects for paths with 2 segments
---

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.080	0.082				

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 3

Effect sizes of indirect effects for paths with 2 segments

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.024	0.010				

Sums of indirect effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.146	-0.048				

Number of paths for indirect effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	1	1				

P values for sums of indirect effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.036	0.280				

Standard errors for sums of indirect effects

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 3

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.080	0.082				

Effect sizes for sums of indirect effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
Kinerja	0.024	0.010				

Total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	-0.295	0.097				
Kinerja	0.146	0.177	-0.198	0.080	-0.494	

Number of paths for total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	1	1				
Kinerja	1	2	1	1	1	

P values for total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja

QCG	0.004	0.198			
Kinerja	0.036	0.059	0.039	0.245	<0.001

Standard errors for total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.107	0.114				
Kinerja	0.080	0.111	0.111	0.115	0.101	

Effect sizes for total effects

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.087	0.009				
Kinerja	0.024	0.037	0.055	0.013	0.250	

****
* Causality assessment coefficients *
****

Path-correlation signs

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	1	1				
Kinerja		1	1	1	1	

Notes: path-correlation signs; negative sign (i.e., -1) = Simpson's paradox.

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 3

R-squared contributions

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.087	0.009				
Kinerja		0.047	0.055	0.013	0.250	

Notes: R-squared contributions of predictor lat. vars.; columns = predictor lat. vars.; rows = criteria lat. vars.; negative sign = reduction in R-squared.

Path-correlation ratios

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	1.001	1.013				
Kinerja		1.083	0.712	0.476	0.976	

Notes: absolute path-correlation ratios; ratio > 1 indicates statistical suppression; 1 < ratio <= 1.3: weak suppression; 1.3 < ratio <= 1.7: medium; 1.7 < ratio: strong.

Path-correlation differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.000	0.001				
Kinerja		0.017	0.080	0.088	0.012	

Note: absolute path-correlation differences.

P values for path-correlation differences

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 3

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.499	0.496				
Kinerja		0.442	0.244	0.223	0.458	

Note: P values for absolute path-correlation differences.

Warp2 bivariate causal direction ratios

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.824	1.518				
Kinerja		0.665	0.876	1.071	0.845	

Notes: Warp2 bivariate causal direction ratios; ratio > 1 supports reversed link; 1 < ratio <= 1.3: weak support; 1.3 < ratio <= 1.7: medium; 1.7 < ratio: strong.

Warp2 bivariate causal direction differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.005	0.050				
Kinerja		0.069	0.033	0.010	0.078	

Note: absolute Warp2 bivariate causal direction differences.

P values for Warp2 bivariate causal direction differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja

QCG	0.483	0.335		
Kinerja	0.275	0.388	0.465	0.249

Note: P values for absolute Warp2 bivariate causal direction differences.

Warp3 bivariate causal direction ratios

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.110	1.765				
Kinerja	0.802	1.171	1.985	0.913		

Notes: Warp3 bivariate causal direction ratios; ratio > 1 supports reversed link; 1 < ratio <= 1.3: weak support; 1.3 < ratio <= 1.7: medium; 1.7 < ratio: strong.

Warp3 bivariate causal direction differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.262	0.074				
Kinerja	0.041	0.047	0.165	0.044		

Note: absolute Warp3 bivariate causal direction differences.

P values for Warp3 bivariate causal direction differences

	DPS	GCG	OwnStru	Size	QCG	Kinerja
QCG	0.009	0.262				
Kinerja	0.362	0.342	0.072	0.353		

Note: P values for absolute Warp3 bivariate causal direction differences.

HASIL OUTPUT PERSAMAAN 3